STUDI PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN PESISIR SUMPANG MINANGAE KOTA PAREPARE

SINOPSIS

OLEH:
Azwan Arman
45 13 042 070

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2017

STUDI PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN PESISIR SUMPANG MINANGAE KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar SarjanaTeknik (S.T.)

OLEH

AZWAN ARMAN
45 13 042 070

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2017

SKRIPSI

STUDI PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN PESISIR SUMPANG MINANGAE KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE

Disusun dan diajukan oleh

AZWAN ARMAN
45 13 042 070

Menyetujui :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr.Agus Salim,ST. MSi.	**Jufriadi ,ST.MSP.**
NIDN: 0929086702	**NIDN: 09311016802**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Teknik	Ketua Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Dr. Hamsina, ST., M.Si.	**Jufriadi, ST,. MSP.**
NIDN: 0924067601	**NIDN: 0931016802**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : AZWAN ARMAN
Nim : 45 13 042 070
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis/ajukan ini benar-benar hasil karya sendiri,dengan arahan komisi pembimbing dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebahagian atau keseluruhan Skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima segala konsekuensi/sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Oktober 2017
Yang menyatakan,

AZWAN ARMAN

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu' Alaikum Wr. Wb

Puja Dan Puji Syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kita curahkan atas segala limpahan Rahmat Karunia serta Hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **"Studi Pemanfaatan Lahan Kawasan Pesisir Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota ParePare "**Tugas Akhir ini merupakan syarat yang wajib dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana STRATA SATU (S-1) pada Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar dan merupakan salah satu proses akhir dari kegiatan pembelajaran di Universitas pada umumnya dan Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota Pada khususnya.

Penulis menyadari telah sepenuhnya mengerahkan segala kemampuan dan usaha, namun sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan lupa serta keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, masih banyak terdapat kekurangan dari tugas akhir ini.

Oleh karenanya, dengan rasa tulus dan ikhlas, selayaknyalah penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT Maha Pemberi segalanya atas rahmat, karunia dan kemudahan yang diberikan kepada penyusun.
2. Bapak Dr.Ir Agus Salim,ST.MSi Selaku Pembimbing I dan Jufriadi ,ST ,MSP selaku Pembimbing II. Yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran

serta kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis sejak awal penulisan Skripsi ini hingga selesai.

3. Ibu DR. Hamsina ST, M.Si selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.
4. Kemudian penyampaian terkhusus dari hati yang paling dalam baik yang tersirat maupun yang tersurat ku haturkan dari lisan sederhana yang terkemas dalam huruf aksara sederhana untuk kedua orang yang tak akan mungkin tergantikan ialah ayah dan ibu tercinta. ayahanda Arman Yakin dan ibunda Hj Sumiati B Spd..
5. Teman-teman Jurusan Perencaanan Wilayah Dan Kota Universitas Bosowa ‘Makassar, tekhusus Kawan – Kawan Seperjuanganku Angkatan 2013. Bahkan teman se geng Motor, dan seluruh kawan kawanku yang akan aku rindukan kelak nanti.
6. Kepada Kakanda Om Aidil,Ical,Sem,Irsan,Basri,Sallu,Fikran,Oca Yang Telah Memberikan Semangat yang tak henti-hentinya Dalam Penulisan Skiripsi ini.
7. Bapak Ir. Ilham Yahya, ST.MSP yang sangat luar biasa memberikan bantuan baik secara materi maupun non materi selama masa perkuliahan. kungkapkan terima kasih yang tak mampu terlukiskan dalam bentuk apapun, atas segalah bantuan moril dan material serta dorongan dan doa yang tak henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi..
8. Teman - teman KKN KWU Angkatan 42 Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap.
9. Bapak dan Ibu Staf pengajar serta karyawan (i) jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Makassar, atas segala bimbingan, didikan

dan bantuan selama penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan sejak awal hingga selesai.

10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi ini.

Akhir kata, semoga ALLAH SWT senantiasa mencurahkan segala Keberkahan dan Rahmatnya kepada mereka yang telah luar biasa membantu penulis dalam menyelesaikan study ini, amin. Terimakasih.

Makassar, Oktober 2017

AZWAN ARMAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

DAFTAR GRAFIK ..... **xiii**

DAFTAR PETA ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN. **1**

A. LatarBelakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuandan Manfaat Penelitian 5

1. TujuanPenelitian 5

2. ManfaatPenelitian 5

D. Ruang Lingkup Penelitian 5

E. Sistematika Penulisan 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. **10**

A. Pengertian Lahan 10

B. Konsep Pola Pemanfaatan Lahan 11

C. Kawasan Pesisir 14

1. Pantai 14
2. Tata Ruang Kawasan Pantai 16
3. Batasan Wilayah Pesisir 17
4. Tipologi Pengembangan Kawasan Pesisir Pantai 19
5. Kebijakan Pengembangan Wilayah Pesisir 21
1. Peraturan Perundang-Undangan. 21
2. Lembaga Pengelolaan Wilayah Pesisir. 22
D. Potensi Wilayah Pesisir 23
1. Sumber Daya Dapat Diperbaruhi. 24
2. Sumber Daya Tidak Dapat diperbaharui 27
3. Jasa-Jasa Lingkungan 27
BAB III METODE PENILITIAN 29
A. Lokasi Penelitian 29
1. Tahap Persiapan Penelitian 29
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 52
B. Jenis danSumber Data 54
1. Jenis Data 29
2. Sumber Data 30
C. Populasi Dan Sampel 31
1. Populasi Penelitian. 31

2. Sampel penelitian. 31
D. TeknikPengumpulan Data 31
E. Metode Analisis Data 32
1. Analisis Deskriktif Kualitatif. 33
2. Analisis Deskriktif Kuantitatif 35
F. Variabel Penelitian 35
G. Definisi Operasional 36
H. Kerangka Pikir 39

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN. 40

A. Gambaran Umum Wilayah Kota ParePare 40
1. Aspek Fisik Dasar 40
a. Letak Geografis dan Luas Wilayah 40
b. Topografi/ Kelerengan 42
c. Geologi 47
d. Jenis Tanah 51
e. Air Dan Permukaan 54
f. Klimatologi 57
2. Aspek kependudukan 58
3. Penggunaan Lahan 61
B. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Bacukiki Barat 63

1. Aspek Fisik Dasar 63
a. Letak Geografis dan Luas Wilayah 63
b. Kondisi Hidrologi 66
c. Jenis Tanah 68
d. Kemiringan Lereng 70
e. Penggunaan lahan 72
2. Aspek kependudukan 76
C. Gambaran Umum Kawasan Pesisir Sumpang Minangae. 77
1. Aspek fisik dasar kawasan 77
a. Letak geografis 77
b. kemringan lereng. 79
c. Kondisi Jenis Tanah. 82
d. Kondisi Geomorfologis. 84
e. Kondisi Ocenografi dan Kualitas Air. 85
f. Kondisi Suhu 94
2. Ekosistem Pesisir Sumpang Minangae 95
3. Penggunaan Lahan 98
4. Aspek Kependudukan 104

D. Pembahasan. **106**

1. Faktor Yang Menyebabkan Perubahan Pemanfaatan Lahan Kawasan Pesisir Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota ParePare 106

    a. Harga Lahan Terhadap Perubahan Pemanfaatan Lahan Kawasan Pesisir Sumpang Minangae Kota ParePare 106

    b. Potensi Ekonomi Terhadap Perubahan Pemanfaatan Lahan Kawasan Pesisir Sumpang Minangae Kota ParePare 110

    c. Daya Dukung Lahan Terhadap Perubahan Pemanfaatan Lahan Kawasan Pesisir Sumpang Minangae Kota ParePare 112

    d. Konversi Lahan Terhadap Perubahan Pemanfaatan Lahan Kawasan Pesisir Sumpang Minangae Kota ParePare. 114

2. Analisis Faktor Yang Menyebabkan Perubahan Pemanfaatan Lahan Kawasan Pesisir Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota ParePare..... 116

    e. Analsis Harga Lahan 116

    f. Analisis Potensi Ekonomi 119

    g. Analisis Daya Dukung Lahan 121

h. Analisis Konversi Lahan 123

3. Analisis Penggunaan Lahan 5 Tahun Terakhir Kawasan Pesisir Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota ParePare 125

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 130

B. Saran 131

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Skala Nilai Hasil Uji Kontingensi.....	34
Tabel 4.1	Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Dari Permukaan Laut Tiap Kecamatan.....	43
Tabel 4.2	Gambaran Kapasitas Priuksi Air Permukaan Tahun 2012-2017	58
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	60
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan.....	60
Tabel 4.5	Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan.....	61
Tabel 4.6	Luas Letak dan Ketinggian Kelurahan Dari Permukaan Laut.....	66
Tabel 4.7	Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan.....	74
Tabel 4.8	Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan.....	76
Tabel 4.9	Jumlah Penduduk Sex Rasio.....	78
Tabel 4.10	Luas Penggunaan Lahan Kelurahan 2013..	100
Tabel 4.11	Luas Penggunaan Lahan Kelurahan 2017.....	102
Tabel 4.12	Perkembangan Jumlah Penduduk.....	104
Tabel 4.13	Perkembangan Jumlah Keluarga Kelurahan.....	105
Tabel 4.14	Perkembangan Jumlah Penduduk sex Rasio Dan Kepadatan	105

	Penduduk.....	
Tabel 4.15	Skala Nilai Hasil Ujian Kontongengsi.....	107
Tabel 4.16	Aktivitas Industri Terhadap Harga Lahan.....	109
Tabel 4.17	Pemanfaatan Lahan Terhadap Potensi Ekonomi.....	111
Tabel 4.18	Perubahan Pemanfaatan Lahan Terhadap Daya Dukung Lahan.....	112
Tabel 4.19	Konversi Lahan Terhadap Pemanfaatna lahan.....	113
Tabel 4.20	Hubungan Faktor Harga Lahan Dengan Aktivitas Industri.....	116
Tabel 4.21	Hubungan Pemanfaatan Lahan Terhadap Potensi Ekonomi.....	118
Tabel 4.22	Hubungan Perubahan Pemanfaatan Lahan Terhadap Daya Dukung Lahan.....	120
Tabel 4.23	Hubungan Konversi Lahan Terhadap Pemanfaatan Lahan.....	122
Tabel 4.24	Penggunaan Lahan Persentase Luas Dan Perbahan Di Kelurahan Sumpang Minangae.....	125
Tabel 4.25	Peralihan Penggunaan Lahan Tahun 2013 Menjadi 2017.....	128

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Luas Wilayah Kabupaten Kolaka Utara.....	70
Grafik 4.2	Guna lahan Kabupaten Kolaka Utara.....	79
Grafik 4.3	Luas Wilayah Kota/Kecamatan Lasusua.....	86
Grafik 4.4	Guna Lahan Kota/Kecamatan Lasusua.....	93
Grafik 4.5	Jumlah Penduduk Kota/Kecamtan Lasusua.....	95
Grafik 4.6	Perebaran Jumlah penduduk Kota/Kecamatan Lasusua.....	98
Grafik 4.7	Kepadatan Penduduk Kota/Kecamatan Lasusua.....	100
Grafik 4.8	Luas Tanaman Perkebunan Kota lasusua.....	109
Grafik 4.9	Populasi Ternak di Kota lasusua.....	110
Grafik 4.10	Jumlah Penduduk 4 Tahun Terakhir.....	126
Grafik 4.11	Estimasi Jumlah Penduduk 20 Tahun Kedepan.....	128

DAFTAR PETA

1	Peta Orientasi Kabupaten Kolaka Utara.....	70
2	Peta Administrasi Kabupaten Kolaka Utara.....	71
3	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kolaka Utara.....	82
4	Peta Administrasi Kota/Kecamatan Lasusua.....	89
5	Peta Topografi Kota/Kecamatan Lasusua.....	90
6	Peta Kemiringan Lereng Kawasan Perkotaan Lasusua.....	115
7	Peta Jenis Tanah Kawasan Perkotaan Lasusua.....	117
8	Peta Curah Hujan Kawasan Perkotaan Lasusua.....	118
9	Peta Penggunaan Lahan kawasan Perkotaan Tahun 2015.....	120
10	Peta Penggunaan Lahan kawasan Perkotaan Tahun 2011.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya pesisir dan lautan, merupakan salah satu modal dasar pembangunan di Indonesia yang sangat diharapkan saat ini, di samping sumber daya alam darat. Tetapi sumber daya alam darat, minyak dan gas serta mineral tertentu semakin berkurang akibat eksploitasi yang telah berlangsung sejak lama.

Kegiatan pengelolaan wilayah pesisir menghadapi berbagai ancaman baik dari aspek ekologi yaitu terjadinya penurunan kualitas lingkungan, seperti pencemaran, perusakan ekosistem dan penangkapan ikan yang berlebihan *(overfishing)* maupun dari aspek sosial yaitu rendahnya aksesibilitas dan kurangnya penerimaan masyarakat lokal.

Oleh karena itu, di dalam mengantisipasi perubahan-perubahan dan ancaman-ancaman tersebut, pengelolaan wilayah pesisir harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Sejalan dengan UU No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, bahwa perencanaan tata ruang memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi

sebagai satu kesatuan. Sehingga nantinya dengan adanya penataan ruang diharapkan pengelolaan wilayah pesisir dapat menguntungkan secara ekonomi dan tidak merugikan secara ekologi.

Memasuki era otonomi daerah, dari sekian banyak potensi pembangunan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), wilayah pesisir merupakan sumber pertumbuhan baru yang berpotensi untuk dikelola secara terpadu, bertahap dan terprogram yang melibatkan dua atau lebih ekosistem untuk mencapai tingkat pemanfaatan sistem sumber daya alam secara optimal. Hal ini tidaklah berlebihan mengingat tiga alasan yaitu : Pertama, fakta fisik bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.058 pulau, dengan panjang garis pantai + 81.000 Km. Wilayah lautan meliputi 5,8 juta Km^2 atau 70% dari luas total teritorial Indonesia. Kedua, sepanjang garis pantai dan bentangan perairan laut terkandung kekayaan sumber daya alam yang berlimpah mulai dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sampai yang tidak dapat di perbaharui. Belum lagi jasa jasa lingkungan (*enviromental service*) berupa pemandangan pantai dan laut yang indah yang dapat dijadikan sebagai aset pariwisata. Ketiga, semakin bertambahnya jumlah penduduk, secara tidak langsung berdampak pada peningkatan kebutuhan sumber daya alam sebagai input dalam proses produksi atau proses pembangunan lainnya. Di lain pihak sumber daya daratan (*terristrial*) yang kita miliki semakin menipis, yang mengakibatkan

mau atau tidak mau akan berpaling ke kawasan pesisir dan lautan untuk memenuhi segenap kebutuhan sumber daya alam bagi kelangsungan pembangunan (Rokhmin Dahuri, dkk, 2001:1)

Dijelaskan pula bahwa lahan sebagai sumber alam yang penting dalam pemanfaatannya harus memperhatikan unsur pengawetan, kesesuaian, kemampuan serta bentuk penggunaannya, agar tidak mengakibatkan kerusakan dan kerugian bagi mausia itu sendiri terutama dibagian Kawasan Pesisisr

Pola pemanfaatan lahan pada hakikatnya adalah hasil perpaduan antara faktor sejarah, faktor fisik, faktor sosial budaya dan ekonomi. Pola pemanfaatan lahan di suatu wilayah mencerminkan pada orientasi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut, seperti tingkat kehidupan sosial dan ekonomi, budaya dan teknologi. Jumlah penduduk dan perubahan, penyebaran dan bidang nafkah adalah sesuatu yang merupakan faktor penentu di dalam pola maupun orietasi pemanfaatan lahan.

Sebagai salah satu ekosistem pesisir, hutan mangrove merupakan ekosistem yang unik dan rawan. Ekosistem ini mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis, fungsi ekologis hutan mangrove antara lain :perlindungan garis pantai,mencega intrusi air laut,habitat (tempat tinggal),tempat mencari makan (feeding ground),tempat asuhan dan pembesaran (nursery ground),tempat pemijahan (spawning ground) bagi aneka biota

perairan,serta sebagai pengatur iklim mikro, sedangkan fungsi ekonomisnya antara lain penghasil keperluan rumah tangga untuk keperluan industry.

Masyarakat yang ada di Kecamatan Bacukiki Barat dalam memenuhi keperluan hidupnya dengan mengintervensi ekosistem mangrove hal ini dapat dilihat dari adanya alih fungsi lahan hutan mangrove menjadi tambak masyarakat dan area permukiman karena mempertimbangkan berbagai keperluan guna untuk memenuhi kebutuhan tampa melihat dampak banjir rob yang sekarang terjadi.

Dampak yang ditimbukan dengan rusaknya ekosistem mangrove sebagai imbas dari masyarakat sehinggah dalam jangka panjang akan mengganggu keseimbangan ekosistem mangrove khususya ekosisitem pesisir yang ada di Kecmatan Bacukiki Barat Kota ParePare.

Dalam Suatu perencanaan wilayah pesisir secara sektoral biasanya berkaitan dengan hanya satu macam pemanfaatan sumber daya atau lahan pesisir oleh satu instansi pemerintah untuk memenuhi tujuan tertentu,seperti perikanan tangkap,tamabak,pariwisata,pelabuhan,atau industry minyak dan gas.Pengelolaan semacam ini dapat menimbulkan komplik kepentingan antarsektor yang berkepentingan yang melakukan aktivitas pembangunanpada wilayah pesisir dan lautan yang sama.Selain itu,pendekatan sektoral semacam ini pada umumnya tidak atau kurang

mengindahkan dampaknya terhadap yang lain,sehingga dapat mematikan usaha sektor lain.

Dalam konteks yang lebih luas, beberapa alasan pokok diatas memerlukan penanganan lebih lanjut, yaitu dalam bentuk pengelolaan yang terprogram secara terencana dan terpadu. Perencanaan yang terpadu diarahkan sebagai suatu upaya untuk mencapai tingkat pemanfaatan sistem sumber daya alam pesisir secara optimal dengan memperhatikan dampak lintas lingkungan yang ditimbulkan guna mendapatkan keuntungan ekonomis secara berkesinambungan untuk kemakmuran rakyat sebagai contoh berubahnya fungsi hutan mangrove menjadi tambak masyarakat yang menjadi suatu isu di Kawasan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota ParePare.

Berkaitan dengan potensi yang dimiliki wilayah pesisir Kota ParePare pada umumnya dan Kecamatan Bacukiki Barat pada khususnya, maka di masa yang akan datang menjadi tantangan bagi kawasan tersebut untuk merebut peluang potensi yang ada, sehingga perencanaan penataan wilayah pesisir perlu diarahkan secara terpadu guna mengharmoniskan dan mengoptimalkan antara kepentingan untuk memelihara lingkungan dengan pengelolaan kawasan pesisir secara menyeluruh.

Dengan adanya perubahan pada pengalihan fungsi lahan memiliki dampak pada Kawasan Pesisir Bacukiki Barat yaitu dengan adanya Banjir

Rob yang mengakibatkan Ekosistem Pesisir Sumpang Minangae Menjadi rusak dan besar kemungkinan akan mengakibatkan ancaman abrasi di sekitar pesisir Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

Sesuai dengan itu, maka diperlukan arahan penataan ruang untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam pesisir Kota ParePare khususnya di Kecamatan Bacukiki Barart dengan menetapkan fungsi kawasan sehingga dapat berkembang dengan optimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Faktor apa yang mempengaruhi Perubahan pemanfaatan lahan kawasan pesisir pantai Sumpang Minagae Kecamatan Bacukiki Barat saat ini?
2. bagaimana perubahan pola pengunaan lahan yang terjadi dalam kurung waktu 5 tahun terakhir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Studi ini merupakan salah satu bagian atau tahapan dari serangkaian proses penelitian yang disusun menurut sisitematika dengan tujuan :

1. faktor yang mempengaruhi perubahan pemanfaatan lahan kawasan pesisir Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat.

2. bagaimana perubahan pola pengunaan lahan yang terjadi dalam kurung waktu 5 tahun terakhir

Beberapa upaya pemanfaatan yang dapat dilakukan adalah dengan konservasi, reklamasi, dan rehabilitasi. Pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda hanya dapat dilakukan secara optimal dan berkesinambungan dengan perencanaan dan pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan. Besarnya sumberdaya wilayah pesisir dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Ketidakterpaduan pemanfaatan ruang pesisir dapat konflik kepentingan antar berbagai sektor. Meningkatnya kemiskinan masyarakat pesisir dan lemahnya penegakan hukum dalam pemanfaatan wilayah pesisir merupakan masalah klasik yang dapat timbul dari tidak terpadunya pengelolaan tata ruangwilayah pesisir

Disamping itu, kegunaan dari penelitian ini dapat sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah sebagai pengambil keputusan bagi kebijaksanaan dan altertnatif penanganan masalah kawasan pesisir. Selain itu penelitian ini dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

D. Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan pada penulisan ini di fokuskan pada analisis fisik lahan kawasan pesisir Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat dalam proses alokasi dan arahan pemanfaatan lahan kawasan.

E. Sisitematika Pembahasan

Dalam penulisan laporan ini dilakukan dengan mengurut data sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kegunaan, sehingga semua aspek yang dibutuhkan dalam proses selanjutnya terangkum secara sistematis, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Tahap I **PENDAHULUAN**, berisikan bahasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, lingkup pembahasan dan sistematika pembahasan.

Tahap II **TINJAUAN PUSTAKA**, pada bagian kedua ini membahas Tinjauan Pustaka yang meliputi pengertian yang terdiri atas pantai, tata ruang kawasan pantai, batasan wilayah pesisir, serta lahan dan sumber daya pesisir; Kebijakan pengembangan wilayah pesisir yang menggambarkan peraturan perundang - undangan dan lembaga pengelola wilayah pesisir; serta Potensi wilayah pesisir.

Tahap III **METODOLOGI PENELITIAN**, yang berisikan gambaran mengenai lokasi studi, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis, dan kerangka pikir.

Tahap VI **HASIL DAN PEMBAHASAN**, berisi Gambaran Umum Studi Pemanfaatan Wilayah Pesisir Sumpang Mianagae Kecamatan Bacukiki Barat Kota ParePare Serta Menggunakan Medode Analisis analisis ChiKuadrat, dan analisis SuperImpose

Tahap VI **PENUTUP**, yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Lahan

Lahan adalah areal atau kawasan yang diperuntukan untuk penggunaan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam satuan hektar (Ha). Sedangkan pola penggunaan lahan adalah areal model atau bentuk penggunaan lahan yang diterapkan, seperti perladangan, tegalan, hutan, penghijauan, perkampungan, dan lain-lain. Haeruddin, (1999).

Lahan menurut pengertian Hoover, (1985), dalam Irwan. A.S : (2000) mengartikan lahan sebagai ruang (space) yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, pengertian memandang lahan dari sudut ekonomi regional atau dari sudut pembangunan wilayah.

Penggunaan lahan adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia (PP Nomor 16 Tahun 2004). Pembagian jenis-jenis penggunaan lahan dalam penelitian ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1997, yaitu :

1. Permukiman/perkampungan adalah areal lahan yang digunakan untuk kelompok bangunan padat ataupun jarang tempat tinggal penduduk dan dimukimi secara menetap.

2. Industri adalah areal lahan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi berupa proses pengolahan bahan-bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang setengah jadi menjadi barang jadi.
3. Pertambangan adalah areal lahan yang dieksploitasi bagi pengambilan bahan-bahan galian yang dilakukan secara terbuka dan atau tertutup.
4. Sawah adalah areal lahan pertanian yang digenangi air secara periodik dan atau terus menerus, ditanami padi dan atau diselingi dengan tanaman tebu, tembakau dan atau tanaman semusim lainnya.
5. Pertanian lahan kering semusim adalah lahan pertanian yang tidak pernah diairi dan mayoritas ditanami dengan tanaman umur pendek.

B. Konsep Pola Pemanfaatan Lahan

Menurut Arsyad (1989), Penggunaan lahan adalah segala macam campur tangan manusia baik sementara maupun terus menerus terhadap lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya penggunaan lahan dapat dikelompokan kedalam dua kategori, yaitu penggunaan lahan untuk kehidupan sosial, termasuk didalamnya lahan-lahan untuk perumahan, sekolah, rumah-rumah ibadah, tanah lapang untuk rekreasi dan kegiatan

olahraga, sarana kesehatan (puskesmas/pustu) dan sebagainya yang pada umumnya menyatu dengan pemukiman.

Menurut Martono (1997), Perencanaan penggunaan lahan dimaksudkan untuk mengetahui pemanfaatan yang paling sesuai terhadap daya dukung lahan agar produktifitasnya tinggi (optimal) tetapi tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Menurut Silalahi (1992) dalam usaha untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai pola pemanfaatan lahan suatu daerah, langkah pertama yang harus ditempuh ialah mengadakan penyederhanaan sebutan dari jenis-jenis pemanfaatan lahan yang beraneka ragam itu dengan membuat klasifikasi penggunaan lahan secara sistematis.

Sitorus (1986) istilah klasifikasi lahan telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang studi. Oleh karena itu istilah tersebut mempunyai beberapa perbedaan dalam pengertiannya. Klasifikasi lahan didefenisikan sebagai pengaturan - pengaturan satuan lahan kedalam berbagai kategori berdasarkan sifat-sifat lahan atau kesesuaiannya untuk berbagai penggunaan.

Vink (1986) Overlay peta dapat dilakukan secara manual (overlay manual), maupun dengan cara digital (overlay GIS). Dikatakan bahwa dalam pola penggunaan lahan seperti halnya mendeteksi perubahan pemanfaatan lahan, dua metode ini dapat digunakan. Pada metode

interprestasi manual dan digital, tekanan diberikan pada perubahan penggunaan lahan dan perubahan-perubahan tersebut diversifikasi. Metode tersebut langsung diarahkan pada letak perubahan, sehingga hasilnya dapat diandalkan.

Menurut Nambo (1990) mengemukakan berbagai masalah yang dihadapi dalam penggunaan lahan di Indonesia menunjukan bahwa masalah ini perlu segera di upayakan alternatif pemecahannya. Masalah penggunaan lahan di Indonesia yaitu : (1) terjadinya kemunduran produktifitas yang tidak disertai usaha konservasi tanah; (2) terjadinya produktifitas lahan sebagai akibat penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya; (3) terdesaknya lahan pertanian yang relatif subur oleh jenis penggunaan lahan non pertanian utamanya di daerah perkotaan.

Menurut Sandy (1980) penggunaan lahan hendaknya dilandasi pada asas-asas sebagai berikut ; penggunaan optimal, pola penggunaan lahan yang seimbang, manfaat lestari dimana telah termasuk prioritas kepada jenis-jenis penggunaan lahan yang biasa dialih gunakan dan langkah-langkah pengawasan lahan.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa para perencana harus mengambil langkah-langkah yaitu tahap pertama perencana mengumpulkan data lahan selengkap mungkin baik dari segi fisik maupun hukum, tahap kedua mengalokasikan lahan untuk berbagai lahan sesuai dengan sasaran

kebijaksanaan pembangunan dan selanjutnya berusaha mengendalikan perkembangan penggunaan lahan.

Soemarwoto (1994) selanjutnya proses perubahan pola pemanfaatan lahan dapat diikuti dengan membandingkan potret udaraatau citra satelit dari berbagai tahun, dari perbandingan itu dapat dilihat bertambahnya luas daerah permukiman dan berkurangnya lahan pertanian.

C. Kawasan Pesisir

1. Pantai

Wilayah pantai merupakan wilayah laut yang masih menerima pengaruh dari daratan. Pengaruh yang dimaksud meliputi fenomena transportasi material sedimen yang dibawa oleh sungai-sungai yang bermuara ke laut atau ke wilayah yang masih sering atau masih dimanfaatkan oleh manusia (Purnomosidi, 1997:11).

Pantai adalah daerah yang merentang dari daratan sampai ke bagian terluar dari batasan pulau, yang kurang lebih bersesuaian dengan daerah yang secara bergantian banjir atau terkena fluktuasi muka laut selama periode kwartenir akhir. Untuk pantai yang ada di Indonesia terdapat 3 (tiga) jenis pantai (PSDL-LP Unhas: 1997), yaitu :

a. Pantai Paparan

Merupakan pantai yang didasari dengan pengendapan yang lebih dominan (pantai netral) dengan ciri :

(i). Muara sungainya mempunyai delta, air terus mengandung lumpur sedimentasi.

(ii). Pantainya mempunyai kedalaman yang teratur dengan perubahan kedalamnnya juga teratur.

(iii). Daratan pantainya sangat lebar dan dapat mencapai lebih dari 20 Km.

b. Pantai Samudera

Merupakan pantai yang berhadapan langsung dengan samudera yang merupakan pantai dimana proses erosinya lebih dominan. Dengan ciri muara sungainya berada dalam teluk, delta tidak berkembang dengan baik serta mempunyai air yang cukup jernih.Jenis pantai ini terdapat di sepanjang pantai barat Sumatera, selatan Jawa, selatan dan utara Nusa Tenggara, pulau timur pantai utara Irian Jaya, utara Seram, timur dan barat pulau Halmahera dan pantai timur serta utara pulau Sulawesi.

c. Pantai Pulau

d. Merupakan pantai yang mempunyai bentuk melingkari pulau yang dapat dibentuk oleh endapan sungai antara lain batu gamping dan endapan gunung api .

Jenis pantai ini terdapat di pulau-pulau kecil yang tersebar dari ujung barat hingga timur Indonesia, seperti pantai di kepulauan Nias, Riau, Pulau Seribu, Sengkang, Selayar, Banda dan Sangihe Talaud.

2. Tata Ruang Kawasan Pantai

Tata ruang kawasan pantai merupakan suatu kegiatan pengelolaan secara terpadu dengan menetapkan peruntukan ruang kawasan pantai dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan keamanan.

Fungsi tata ruang kawasan pantai adalah merupakan suatu usaha/upaya yang terpadu untuk melestarikan fungsi daripada kawasan pantai yang meliputi kebijaksanaan penataan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, dan pengendaliannya.

Setiap usaha pengelolaan wilayah pesisir, sebelumnya diperlukan perencanaan yang matang dalam mengalokasikan sumber daya alam. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses persiapan pembuatan keputusan untuk pelaksanaan sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

Sempadan Pantai

Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/kpts/Um/II/1980 menjelaskan mengenai kriteria lokasi kawasan lindung dan termasuk di dalamnya adalah sempadan pantai yang merupakan kawasan pelindungan setempat.

Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Tujuan perlindungan adalah melindungi wilayah pantai dari kegitan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Kriteria sempadan pantai adalah sederetan tepi pantai sekurang-kurangnya berjarak 100 meter diukur dari pasang tertinggi kearah darat, dengan pertimbangan pertahanan keamanan, kepentingan umum dan permukimanan yang sudah ada.

3. Batas Wilayah Pesisir

Pertanyaan pertama yang seringkali muncul dalam pengelolaan kawasan pesisir adalah bagaimana menentukan batas-batas dari suatu batas wilayah pesisir (*coastal zone*). Sampai sekarang belum ada defenisi wilayah pesisir yang baku namun terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, sehingga wilayah pesisir memiliki dua macam batas yaitu batas yang sejajar dengan garis pantai dan batas yang tegak lurus dengan garis pantai.Penetapan batas-batas wilayah pesisir yang tegak lurus dengan garis pantai sejauh ini belum ada kesepakatan, sehingga batas-batas wilayah pesisir berbeda dari satu dengan negara lainnya terlebih lagi dengan adanya perbedaan karakteristik lingkungan, sumberdaya dan sistem pemerintahan sendiri (Rokhmin Dahuri dkk, 2001:5).

Wilayah pesisir juga merupakan pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat wilayah pesisir meliputi wilayah daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut perembesan air asin. Ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh bagian laut yang terjadi di darat seperti sedimentasi, dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencamaran (Soegiarto dalam Rokhmin Dahuri, dkk, 2001 : 8).

Secara fisik, kawasan pesisir dapat terdiri dari daerah-daerah daratan (*terrestial atau inland areas*), lahan-lahan pantai (*coastal waters*), perairan lepas pantai (*offshore waters*) dan perairan di luar yurisdiksi nasional. Peran dan pengaruh manusia di tiga daerah sangat nyata terlihat. Oleh karena itu daerah-daerah tersebut biasanya merupakan fokus perhatian pengelolaan. Namun batas-batas wilayah pesisir yang ditetapkan tiap negara berbeda-beda.

Di Indonesi ada semacam kesepakatan tentang defenisi kawasan ini, namun belum resmi yaitu kawasan pesisir adalah wilayah daratan dan lautan yang bertemu di garis pantai. Wilayah daratan merupakan wilayah yang mencakup daerah yang tergenang atau tidak tergenang air yang dipengaruhi oleh proses-proses laut, seperti pasang surut, angin laut dan intrusi garam. Sedangkan wilayah laut mencakup wilayah perairan yang dipengaruhi oleh proses-proses alami daratan sepeti sedimentasi dan

aliran air tawar ke laut dan perairan yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia di darat. Dengan demikian jarak batas-batas dan laut dari garis pantai suatu kawasan pesisir di Indonesia dapat berbeda-beda tergantung kekuatan pengaruh masing-masing faktor darat dan laut.

4. Tipologi Pengembagan Kawasan Pesisir Pantai

Penanganan kawasan pantai dilakukan dengan mempertimbangkan tipologi pantai. Pembagiaan tipe pantai kawasan perencanaan didasarkan pada klasifikasi tipologi pantai yang disusun oleh PSDAL UNHAS dengan Direktorat Bina Tata Perkotaan dan Pedesaan Departemen Pekerjaan Umum, Tahun 1997, secara garis besar dapat diklasifikasikan kedalam 5 (lima) jenis, yaitu :

- Tipe A, pantai berupa teluk dan tanjung yang panjang dan beberapa pulau terletak di mulut teluk, kemiringan dasar yang curam (>0,1) dan terbentuk dari kerikil, daratan pantai yang berbukit, tinggi ombak datang di bawah 1 meter, kecepatan arus di bawah 1 meter/detik tipe pasang surut adalah setengah harian, priode ulang kejadiaan badai di atas 1 tahun.

  Pantai tipe A sangat potensial dikembangkan menjadi kawasan perdagangan, jasa pelayanan, pergudangan, pelabuhan, industri, permukiman dan resort/pariwisata.

- Tipe B, pantai berupa teluk tanpa pulau terletak di mulut teluk, kemiringan dasar yang landai (0,01<s0,1)dan terbentuk dari pasir,

memiliki lingkungan muara, tinggi ombak datang antara 1-2 meter, kecepatan arus antara 0,5-1 meter/detik, tipe pasut adalah campuran dan perioda ulang kejadiaan badai di atas 15 tahun.

Pantai tipe B cukup potensial dikembangkan menjadi kawasan perdagangan dan prasarana penunjang pantai tipe A, namun perlu dilakukan rekayasa khusus untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pusat kota misalnya pembuatan dermaga, reklamasi pantai dan sebagainya.

- Tipe C, pantai berupa laguna, kemiringan dasar yang datar (s<0,01) dan terbentuk dari lumpur, memiliki lingkungan rawa pantai, tingi ombak datang di bawah 1 meter, kecepatan arus di bawah 0,5m/detik, tipe pasang surut adalah setengah harian, periode ulag kejadiaan badai di atas 15 tahun.

  Pantai tipe C tidak potensial untuk kegiatan binaan penduduk, perlu rekayasa khusus melalui penguatan dan peningkatan khusus untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pusat kawasan kota misalnya pembuatan dermaga, reklamasi pantai dan sebagainya.

- Tipe D, pantai terbuka, kemiringan dasar yang landai (0,01<s<1) dan terbentuk dari pasir, memiliki lingungan muara, tingi ombak datang diantara 1<H(1/3)<2 meter, kecepatan arus diantara 0,5 dan 1 m/detik,

tipe pasag surut campuran, periode, kejadiaan ulang badai 5 sampai 15 tahun.

Pantai Tipe D pada umumnya dimanfaatkan untuk budidaya air payau, hutan rawa, pengambangan ecoturisme, penikmatan penjelajahan hutan pantai dan melihat flora dan fauna langka serta permukiman.

- Tipe E, pantai terbuka keiringan dasar yang curam (s<0,1) dan terbetuk dari kerikil memiliki lingkungan muara, tinggi omak datang di atas 2 meter, kecepatan arus di atas 1 m/detik, tipe pasang surut harian, perioda kejadiaan ulang badai di antara 5-15 tahun

  Tipe E, umumnya dimanfaatkan untuk pelabuhan dengan rekayasa *break water* yang lebih panjang untuk membuat kolam pelabuhan yang lebih luas, pengembangan ecoturisme, memancing dan permukiman.

5. Kebijakan Pengembangan Wilayah Pesisir

a. Peraturan Perundang-undangan

Pembangunan sektor kelautan tidak dapat dilepaskan dari makna Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960 tentang pokok perairan Indonesia juncto Undang-Undang No 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982. dalam undang-undang tersebut ditetapkan konsep Wawasan Nusantara yang menjadi dasar bagi penetapan batas wilayah perairan nasional Indonesia.

Undang-undang ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa bentuk geografi Indonesia sebagai negara kepulauan, serta lautan yang terletak

diantaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh. Sesuai dengan konsep wawasan nusantara tersebut, laut wilayah Indonesia adalah laut teritorial selebar 12 mil laut yang garis luarnya diukur dari garis pangkal yang menghubungkan titik-titik pangkal terluar dari pulau terluar di wilayah kepulauan Indonesia.

Selain itu, dalam Undang-Undang N0 1 tahun 1973 tentang Landasan Kontinen, ditetapkan pula kewenangan untuk mengelola wilayah dasar perairan beserta segenap sumberdaya alam yang terkandung didalamnya sampai kedalaman 200 meter dari permukaan laut.

Melalui Undang-undang No 5 tahun 1983, Indonesia menetapkan kedaulatannya untuk mengelola perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Perairan ZEE adalah jalur laut yang berbatasan dengan jalur laut wilayah Indonesia dengan batas terluar adalah 200 mil laut, diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Negara mempunyai hak eksklusif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konversi sumber daya alam hayati dan non hayati yang terkandung didalamnya. Namun jika Indonesia tidak mampu memanfaatkanya, maka negara lain berhak memanfaatkan sampai batas ambang lestari dan izin yang diberikan.

b. Lembaga Pengelola Kawasan Pesisir

Undang-undang Pemerintahan Daerah No. 22 tahun 1999, memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya daerahnya. Pasal 3 dan 10 undang-undang ini menyatakan

wilayah Daerah Provinsi terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut dan wilayah daerah kabupaten/ kota adalah sejauh sepertiga dari wilayah laut daerah provinsi. Pasal 10 Undang-undang No. 22 tahun 1999 memberikan kewenangan Pemda di wilayah laut meliputi :

- Eksplorasi; eksploitasi; konesravasi dan pengeloaan kekayaan laut;
- Pengaturan kepentingan administratif;
- Pengaturan tata ruang;
- Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah atau yang duilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; dan
- Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

Kewenangan yang diberikan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan suatu yuridiksi (kewenangan pengelolaan), bukan merupakan kedaulatan *(sovereignty)* dan juga bukanlah kepemilikan *(property)*.

6. Potensi Wilayah Pesisir

Dalam suatu wilayah pesisir terdapat satu atau lebih dari sistem lingkungan atau ekosistem yang dapat bersifat alamiah maupun buatan. Ekosistem alami yang terdapat di kawasan pesisir antara lain terumbu karang (*coastal feefs*), hutan bakau (*mangrove*), padang lamun (*sea grass*), pantai berpasir (*sandy beach*), formasi pes-caprea, formasi baringtonia, estuaria, laguna, dan delta. Sistem ekosistem buatan yang

antara lain berupa tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, industri, agroindustri dan kawasan permukiman.

Potensi pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*), sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*) dan jasa-jasa lingkungan (*enviromental services*). Secara garis besar potensi-potensi pembangunan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Sumber Daya Dapat Diperbaharui

a) Hutan Mangrove

Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting di wilayah pesisir dan lautan. Selain mempunyai fungsi ekologi sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan berbagai biota, penahan abrasi, amukan angin topan dan tsunami, penyerap limbah dan pencegah interusi air laut dan lain sebagainya. Hutan mangrove juga mempunyai fungsi ekonomis penting serta penyedia kayu, daun-daunan sebagai bahan baku obat-obatan dan sebagainya. Saenger Etal (1983, dalam Rokhim Dahuri : 82) telah mengidentifikasi lebih dari 70 macam kegunaan pohon mangrove baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Megill (1968, dalam Supriharyono, M.S, Dr : 28) hampir 75% tumbuhan mangrove hidup

diantara 35^0 Lintang Utara – 35^0 lintang selatan dan terbanyak terdapat di kawasan Asia Tenggara.

b) Terumbu Karang

Ekosistem terumbu karang mempunyai produktifitas organik dan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dibandingkan ekosistem lainnya. Disamping mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, pelinding fisik, tempat pemijahan, terumbu karang juga menghasilkan berbagai produk yang mempunyai nilai ekonomis penting seperti berbagi jenis ikan karang, udang karang, alga, teripang dan kerang mutiara.

Beberapa tempat di Indonesia, karang batu (*hard coral*) dipergunakan bagi berbagai kepentingan seperti konstruksi jalan dan bangunan, bahan baku perhiasan dan industri pembuatan kapur. Dari segi estetika terumbu karang menampilkan pemandangan indah yang tidak di miliki oleh ekosistem lainnya. Potensi lestari sumberdaya ikan dan terumbu karang di perairan laut Indonesia diperkirakan sebesar 80.802 ton/Km^2/tahun (Dirjen Perikanan, 1991) dengan luas total terumbu karang 50.000 Km^2 yang kuat menahan gaya gelombamg laut.

c) Padang Lamun dan Rumput Laut

Lamun (*seagrass*) adalah tumbuhan yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri untuk hidup dibawah permukaan air laut. Lamun hidup diperairan dangkal dan berpair atau sering juga dijumpai pada ekosistem

terumbu karang. Lamun membentuk padang yang lua dan lebat di dasar laut yang terjangkau cahaya matahari dengan tingkat penyinaran yang memadai untuk pertumbuhan

Koessoebiono, 1995 mengemukakan bahwa padang lamun di lingkungan pesisir mempunyai fungsi utama antara lain :

i. Menstabilkan dasar laut dengan sisitem perakaran yang saling silang;
ii. Merupakan habitat berbagai macam ikan kecil dan udang;
iii. Tempat hidup bagi ganggang dan zat renik lainnya;
iv. Padang lamun yang segar merupakan bahan makanan bagi ikan duyung, penyu dan babi laut serta di Kepulauan Seribu juga merupakan bahan makanan bagi penduduk setempat; dan

d) Sumber Daya Perikanan Laut

Potensi sumber daya perikanan laut terdiri atas sumber daya perikanan pelagis besar (451.830 ton/tahun), sumber daya perikanan pelagis kecil (2.423.000 ton/tahun), sumber daya perikana demersal (3.163.630 ton/tahun), udang (100.720 ton/tahun), ikan karang (80.082 ton/tahun) dan cumi-cumi 328.960 ton/tahun). Potensi tersebut secara

nasional 6,7 juta ton/tahun merupakan potensi lestari dengan tingkat pemanfaatan mencapai 48% (Dirjen Perikanan, 1995).

b. Sumberdaya Tidak Dapat Diperbaharui

Wilayah pesisir dan lautan memiliki juga sumber daya tidak dapat diperbaharui (*non renewable resource*) yang meliputi seluruh mineral dan geologi. Mineral terdiri dari tiga kelas yaitu kelas A yaitu mineral strategis seperti minyak, gas dan batu bara; Kelas B yaitu mineral vital yaitu seperti emas, timah, nikel, bauksit, biji besi dan croumite; Kelas C yang merupakan mineral industri seperti bahan bangunan dan galian granit, kapur, tanah liat, kaolin dan pasir.

c. Jasa Jasa Lingkungan

Wilayah pesisir dan lautan Indonesia juga memiliki berbagai macam jasa-jasa lingkungan (*environmental service)*, dimana jasa-jasa ini meliputi kawasan pesisir dan lautan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan, penampungan limbah, pengatur iklim (*climate regulator)*, kawasan perlindungan dan sistem penunjang kehidupan serta fungsi ekologi lainnya.

Wilayah pesisir dan lautan juga memiliki potensi sumber daya energi yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal walaupun telah dijajaki kemungkinan sebagai sumber daya energi alternatif dengan resiko terhadap lingkungan yanga kecil. Sumber energi yang dapat dimanfaatkan tersebut antara lain arus pasang surut, gelombang, perbedaan salinitas, angin dan pemanfaatan perbedaan suhu laut di lapisan permukaan dengan lapisan dalam perairan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. LokasiPenelitian

Lokas ipenelitian yang menjadi objek kajian adalah Kawasan Pesisir SumpangMinangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota ParePare.Adapun pertimbangan peneliti dalam mengambil lokasi ini yakni dikarenakan secara spasial dan SDA pemanfaatan potensi di wilayah penelitian sangat berkembang, dan dengan pengalihan fungsi lahan tanaman mangrove menjadi tambak masyarat menimbulkan dampak yang perlu perhatian khusus yang artinya terdapat banyak ketimpangan dalam pemanfaatannya yang kemudian berujung pada terjadinya degradasi Lahan.Dengan dasar pertimbangan di atas sehingga penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul Studi Pemanfaatan Lahan Kawasan Pesisir Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota ParePare.

B. Jenis Dan Sumber Data

Bagian ini menguraikan tentang jenis data dan sumber data dalam penelitian ini. Adapun jenis dan sumber data yang dimaksud yakni sebagai berikut :

1. Jenis Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data dan informasi yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian lapangan, meliputi;

a) Observasi lapangan

b) Pemetaan data tata guna lahan eksisting di lapangan

c) Data mengenai pendapat masyarakat tentang aktivitas kawasan industri di Kecamatan Bacukiki Barat.

d) Data pemetaan potensi sumber daya alam di Kecamatan Bacukiki

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data dan informasi yang di dapat tidak langsung dilapangan oleh peneliti melainkan dari buku-buku atau dokumentasi yang sudah diterbitkan sebelumnya, yang diperuntukkan untuk melengkapi data primer, meliputi;

Jenis Data Sekunder dalam Penelitian ini, meliputi

a) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota ParePare

b) Kota ParePare dalam angka 5 tahun terakhir

c) Kecamatan Bacukiki Barat dalam angka 5 tahun terakhir

d) Profil Kecamatan Bacukiki Barat 5 tahun terakhir

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari dua sumber, karena jenis data yang dibutuhkan juga adadua.Adapun sumber data, sebagaiberikut;

a) Sumber data primer, data yang didapatdari survey yang dilakukan secara langsung dilapangan oleh peneliti.

b) Sumber data sekunder, didapat dari hasil survey yang dilakukan pada instansi terkait terutama dinas bersangkutan, berupa buku

atau dokumen yang sudah diterbitkan kepublik, sehingga mudah disadur, seperti; Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ParePare, Kota ParePare Dalam Angka tahun terakhir, serta produk-produk perencanaan lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan yang langsung pada objek yang menjadi sasaran penelitian untuk memahami kondisi dan potensi kawasan pesisir yang menjadi objek penelitian.
b. Pendataan instansional, yaitu salah satu teknik pengumpulan data melalui insatansi terkait guna mengetahui data kuantitatif dan kualitatif objek penelitian.
c. Kepustakaan (*library research*) adalah cara pengumpulan data dan informasi melalui literatur yang terkait dengan studi yang akan dilakukan.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. PopulasiPenelitian

Definisi dari populasi adalah keseluruhan kelompok dari individu atau butir-butir lain yang merupakan tumpahan perhatian. (Focus Of Interest) dalam suatu penelitian, populasi dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk yang terdapat di Kecamatan Bacukiki Barat. Dalam penelitian ini jumlah Populasi seluruh masyarakat yang bermukim di Kecamatan Bcaukiki Barat Sekitar 1.872 jiwa.

2. Sampel Penelitian

Kumpulan sebagian dari obyek atau individu yang akan diteliti yang dapat mewakili populasi. Berdasarkan populasi data, maka teknik pengambilan sampel diambil secara acak (Sampel Random). Sampel yang di ambil dalam penelitian ini adalah; jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Bacukiki Barat dengan jumlahsampel1.872 Jiwa.

$$n = \frac{N}{N\,(d^2) + 1}$$

Keterangan;

n = Jumlah Sampel yang diambil

N = Jumlah Penduduk atau KK di Daerah Penelitian

d = Derajat Kebebasan (15-20%)

$$n = \frac{1.872}{1.872(0{,}15^2) + 1}$$

$$n = \frac{1.872}{1.872(0{,}0225) + 1}$$

n = 44 Responden

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian kali ini juga diklasifikasikan atas 2 (dua) bagian dengan tetap berdasar pada 2 (dua) metode analisis

data yaitu kualitatif dan kuantitatif. Namun karena penelitian kali ini lebih mengarah ke segi kaulitatif, maka metode kualitatif yang lebih dominan akan digunakan dalam upaya menjawab atau menyelesaikan pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian kali ini.

Adapun alat analisis yang digunakan adalah :

1. Untuk menjawab rumusan masalah pertama maka akan digunakan dengan pendekatan matematis untuk mengetahui faktor Yang Mempengaruhi terjadinya perubahan pemanfaatan lahan, yaitu :

   Analisis Chi Kuadrat (X^2)

$$X^2 = \frac{(f_{\cdot} - fh)^2}{(fh)}$$

   Dimana :

   X^2 : Hasil Chi-Kuadrat yang dihitung

   $f_{\cdot}$: Frekuensi yang diperoleh

   fh: Frekuensi yang diharapkan

   Untuk menghitung frekuensi yang diharapkan digunakan rumus :

$$fh = \frac{(n_o^i - n_o^j)^2}{N}$$

   Dimana :

   fh: Frekuensi yang diharapkan

   n_o^i: Jumlah Baris

   n_o^j: Jumlah Kolom

   N : Jumlah Sampel (Sugiyono 1999:175)

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan apabila keadaan berikut dicapai, yakni : X^2 hitung < X^2 tabel yang berarti $H_{\circ}$ diterima, sebaliknya apabils X^2 hitung > X^2 tabel berarti $H_{\circ}$ ditolak atau H^1.

Untuk mengetahui koefisien korelasi variabel X terhadap variabel Y berdasarkan hasil yang diperoleh, digunakan uji kontingensi, yaitu :

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}} \quad C_{max} = \sqrt{\frac{m}{(m-1)}}$$

Dimana :

C : Hasil koefisien kontigensi

C_{max} : Hasil maksimal koefisien kontigensi

X^2 : Hasil Chi-kuadrat yang dihitung

N : Jumlah sampel (Rahman 1991 : 136)

Untuk mengetahui besarnya hubungan variabel X dengan Y digunakan sebagai patokan interpretasi nilai persentase yang digunakan, yaitu :

Tabel 3.1

Skala Nilai Hasil Uji Kontingensi

Interval Kontingensi	Tingkat Hubungan
0,0-0,199	Sangat Lemah
0,20-0,399	Lemah

0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80,1	Sangat Kuat

Sumber : Hasil Analisis

2. Untuk menjawab rumusan masalah kedua maka akan digunakan metode superimpouse atau overlay peta yang berbasis Sistem Informasi Geografis. Proses overlay peta dilakukan dengan menggunakan salah satu aplikasi berbasis *SIG (Sistem Informasi Geografis)*. Prinsip dalam model analisis ini adalah untuk mengetahui seberapa besar perubahan guna lahan yang terjadi di Kecamatan Bacukiki Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Proses pekerjaannya dilakukan dengan menggunakan apilkasi software ArcGis versi 10.3. Secara teknis proses overlay dilakukan dengan cara melakukan tumpang tindih antara peta guna lahan tahun 2013 dan peta guna lahan tahun 2017. Dari hasil overlay/tumpang tindih tersebut maka dapat diketahui seberapa guna lahan yang terjadi di Kecamatan Bacukiki Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

F. VariabelPenelitian

Variabel penelitian merupakan parameter untuk mengetahui factor factor yang mempengaruhi pemanfaatan lahan kawasan pesisir Sumpang Minangae Kota ParePare dan bagaimana perubahan pola

pengunaan lahan yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Penetapan variabel dilakukan dengan cara memahami elemen yang memiliki keterkaitan terhadap objek yang diteliti. Variabel yang dimaksud yaitu :

A. Ekonomi
B. Harga Lahan
C. Daya Dukung Lahan
D. Konversi Lahan

G. Definisi Operasional

Definisi operasional perlu untuk memberikan pemahaman mengenai topik operasional yang akan dilakukan. Beberapa definisi penelitian yang penting diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh adalah akibat yang dilahirkan oleh suatu obyek kepada obyek lainnya (pengaruh aktifitas industri terhadap pola penggunaan lahan)
2. Aktifitas adalah interaksi sistem kegiatan dengan sistem jaringan dapat berwujud lalu-lintas orang, kendaraan, barang.
3. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
4. Lahan adalah areal atau kawasan yang diperuntukan untuk penggunaan suatu pembangunan tertentu.
5. Lahan adalah tanah atau lahan terbuka yang dihubungkan dengan arti atau fungsi sosial atau ekonominya bagi masyarakat dapat

berupa tanah/lahan terbuka, tanah/lahan garapan yang belum diolah atau diusahakan.

6. Penggunaan lahan adalah akumulasi dari berbagai jenis penggunaan lahan yang terstruktur di suatu kawasan atau wilayah. Menunjukkan pada kegiatan ekonomi dan sosial di atas lahan.
7. Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya, proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.
8. Perubahan pemanfaatan lahan adalah suatu bentuk penyimpangan antara arahan dalam rencana tata ruang dan aktualisasi di lapangan dalam proses pemanfaatan ruang.
9. Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.
10. Harga lahan adalah penilaian atas lahan yang diukur berdasarkan harga nominal dalam satuan uang untuk satu satuan luas tertentu.

11. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia.
12. Tinggi diartikan sebagai mempunyai pengaruh atau efek yang tinggi terhadap factor tersebut pada lokasi penelitian.
13. Sedang diartikan sebagai mempunyai pengaruh yang sedang atau efek yang sederhana/biasa terhadap factor tersebut pada lokasi penelitian.
14. Rendah diartikan sebagai tidak mempunyai pengaruh terhadap factor tersebut pada lokasi penelitian.
15. Wilayah pantai merupakan wilayah laut yang masih menerima pengaruh dari daratan. Pengaruh yang dimaksud meliputi fenomena transportasi material sedimen yang dibawa oleh sungai-sungai yang bermuara ke laut atau ke wilayah yang masih sering atau masih dimanfaatkan oleh manusia
16. Potensi pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*), sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*) dan jasa-jasa lingkungan (*enviromental services*).

H. Kerangka Fikir

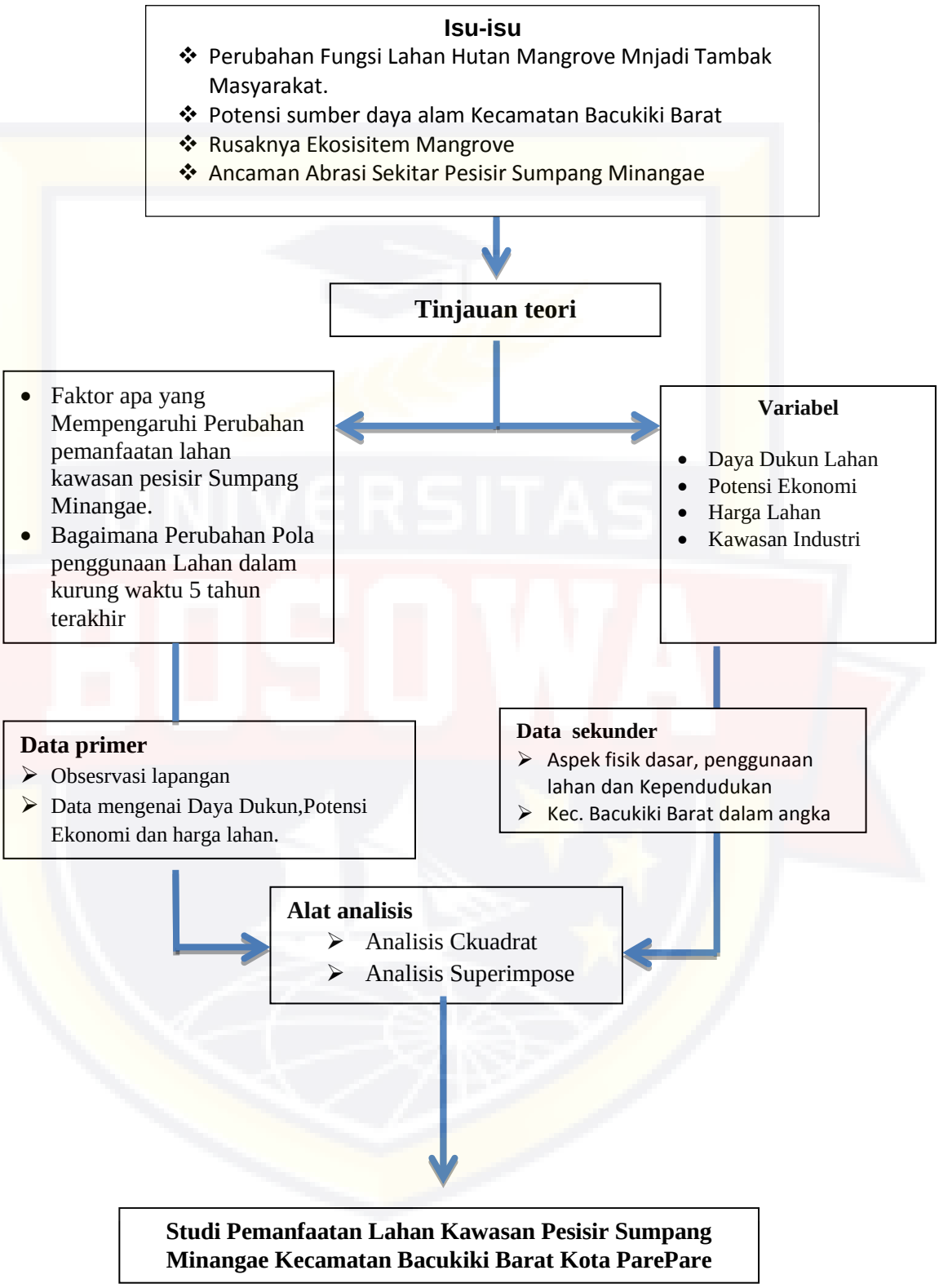

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Makro Kota Pare-Pare

1. Aspek Fisik Dasar

Aspek fisik dasar wilayah Kabupaten Kolaka Utara, dalam hal ini meliputi kondisi geografis, Topografi, Geologi, Jenis Tanah, Klimatologi, Hidrologi dan kondisi pola penggunaan lahan;

a. Letak Geografis

Kota Parepare merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki posisi strategis karena terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut, baik arah Utara – Selatan maupun Timur – Barat, dengan luas 99,33 km2 yang secara geografis terletak antara 3o57’ 39” - 4o04’ 49” Lintang Selatan dan 119o36’ 24” - 119o43’ 40” Bujur Timur. Terdiri atas 4 (empat) kecamatan dan 22 (dua puluh dua) kelurahan, yang secara administrasi memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Pinrang
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Barru,
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Selat Makassar

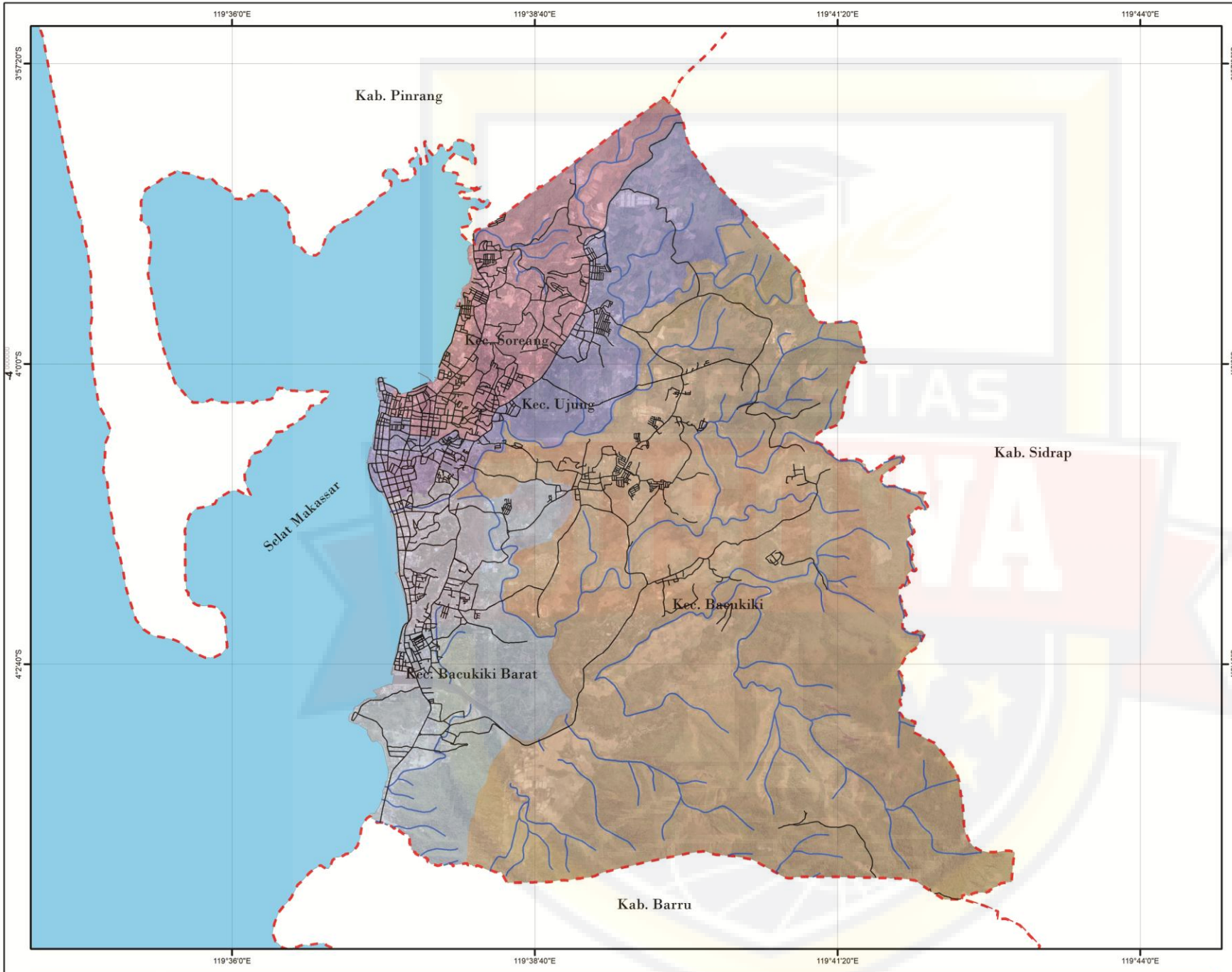

PETA ADMINISTRASI KOTA PAREPARE

STUDI PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN PESISIR SUMPANG MINANGAE KOTA PAREPARE

AZWAN ARMAN / 45 13 042 070

PETA ADMINISTRASI KOTA PAREPARE

Skala :

N
W E
S

1:60,000

0 600 1,200 2,400 Meter

Diagram Lokasi

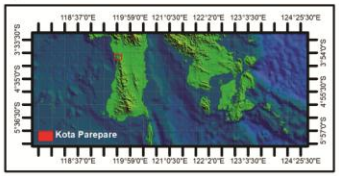

Proyeksi :..... *Universal Transverse Mercator*
Sistem Grid : ..... *Grid Geografi*
Datum : .....*world Geodetic system 1984 (WGS 84)*
Zona : .....*Selatan 50 S*

Keterangan :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Laut

Kecamatan

- Bacukiki
- Bacukiki Barat
- Soreang
- Ujung

Sumber Peta :

1. Peta Citra Satelit SAS Planet
2. Pemerintah Kota Parepare
3. RTRW Kota Parepare
4. Hasil Tim Survey 2017

b. Topografi dan Kemiringan Lereng

Kondisi Topografi dan ketinggian wilayah menggambarkan keadaan bentang alam wilayah Kota ParePare. Kondisi topografi di Kota ParePare terbagi dalam tiga bentuk permukaan tanah, yaitu dataran perbukitan dan pegunungan.

Wilayah Kota Parepare apabila ditinjau dari aspek topografinya terdiri dari daerah datar sampai bergelombang, dengan klasifikasi kurang lebih 80% luas daerahnya merupakan daerah perbukitan dan sisanya daerah datar dengan ketinggian 25 – 500 meter diatas permukaan laut (mdpl), dengan dataran tinggi bergelombang dan berbukit (88,96%) dengan fungsi dominan untuk lahan perkebunan (18,56%), kehutanan (43,04%),dan daerah permukiman (1,57%), serta sebagaian kecil merupakan dataran rendah yang rata hingga landai (11,04%) dengan fungsi permukiman (2,80%), pertanian (9,40%) dan perikanan (0,24%). Kota Parepare sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian atau perbukitan terutama pada wilayah Kecamatan Bacukiki dengan ketinggian >500 meter dpl. Khusus untuk Kecamatan Ujung dan Kecamatan Soreang, berada pada ketinggian 0-500 m dpl..

Tabel 4.1

Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Dari Permukaan Laut Tiap Kecamatan Di Kota Parepare

No	Kecamatan	Luas Ketinggian Wilayah (Ha)				
		0-7 m	8-25 m	26-100 m	101-500 m	>500 m
1	Bacukiki	154,6	776,4	2668,78	3119,0	316,11
2	Ujung	87,16	214,78	476,64	54,40	-
3	Soreang	70,84	38,6	914,64	105,92	-
4	Bacukiki Barat	-	-	-	-	-
Jumlah		312,6	1029,78	5060,06	2279,32	316,11

Sumber : Data Pokok Kota ParePare

Tingkat kemiringan lereng merupakan kondisi fisik topografi suatu wilayah yang sangat mempengaruhi terhadap kesesuaian lahan dan penataan lingkungan alami. Untuk kawasan terbangun, kondisi topografi berpengaruh terhadap terjadinya longsor dan ketahanan konstruksi bangunan. Kemiringan lereng adalah faktor utama yang menentukan fungsi kawasan, untuk diarahkan sebagai kawasan lindung atau kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kawasan fungsional sepertipersawahan, ladang dan kawasan terbangun membutuhkan lahan dengan kemiringan dibawah15%, sedangkan lahan dengan kemiringan diatas 40% akan sangat sesuai untuk perkebunan, pertanian tanaman keras dan hutan.Karakteristik tiap kemiringan lereng diuraikan sebagai berikut : Kelerengan 0% - 5% dapat digunakan secara intensif dengan pengelolaan kecil.

- Kelerengan 5% - 10% dapat digunakan untuk kegiatan perkotaan dan pertanian, namun bila terjadi kesalahan dalam pengelolaannya masih mungkinterjadi erosi.
- Kelerengan 10% - 30% yakni daerah yang sangat mungkin mengalami erosi, terutama bila tumbuhan pada permukaannya ditebang, daerah ini masihdapat dibudidayakan namun dengan usaha lebih.
- Kelerengan > 30% yakni daerah yang sangat peka terhadap bahaya erosi, dan kegiatan di atasnya harus bersifat non budidaya. Apabila terjadi penebangan hutan akan membawa akibat terhadap lingkungan yang lebih luas.

Faktor kemiringan lereng sangat berkaitan dengan kemampuan lahan untuk mengakomodasikan berbagai aktifitas masyarakat dalam suatu ruang. Aktifitas masyarakat akan relatif mudah dilakukan pada lahan yang landai dengan kemiringan 0-2%. Kemiringan lahan untuk kegiatan perkotaan sebaiknya tidak melebihi dari 15% agar memudahkan pembangunan sarana dan prasarana kota. Lahan dengan kemiringan lereng lebih dari 15% . Morfologi wilayah Kota Parepare secara umum dapat dibagi menjadi tiga satuan yaitu: dataran rendah, perbukitan dan pegunungan. (1) Morfologi dataran rendah terdapat pada bagian yang sempit sekitar muara Sungai Karajae, sepanjang pesisir

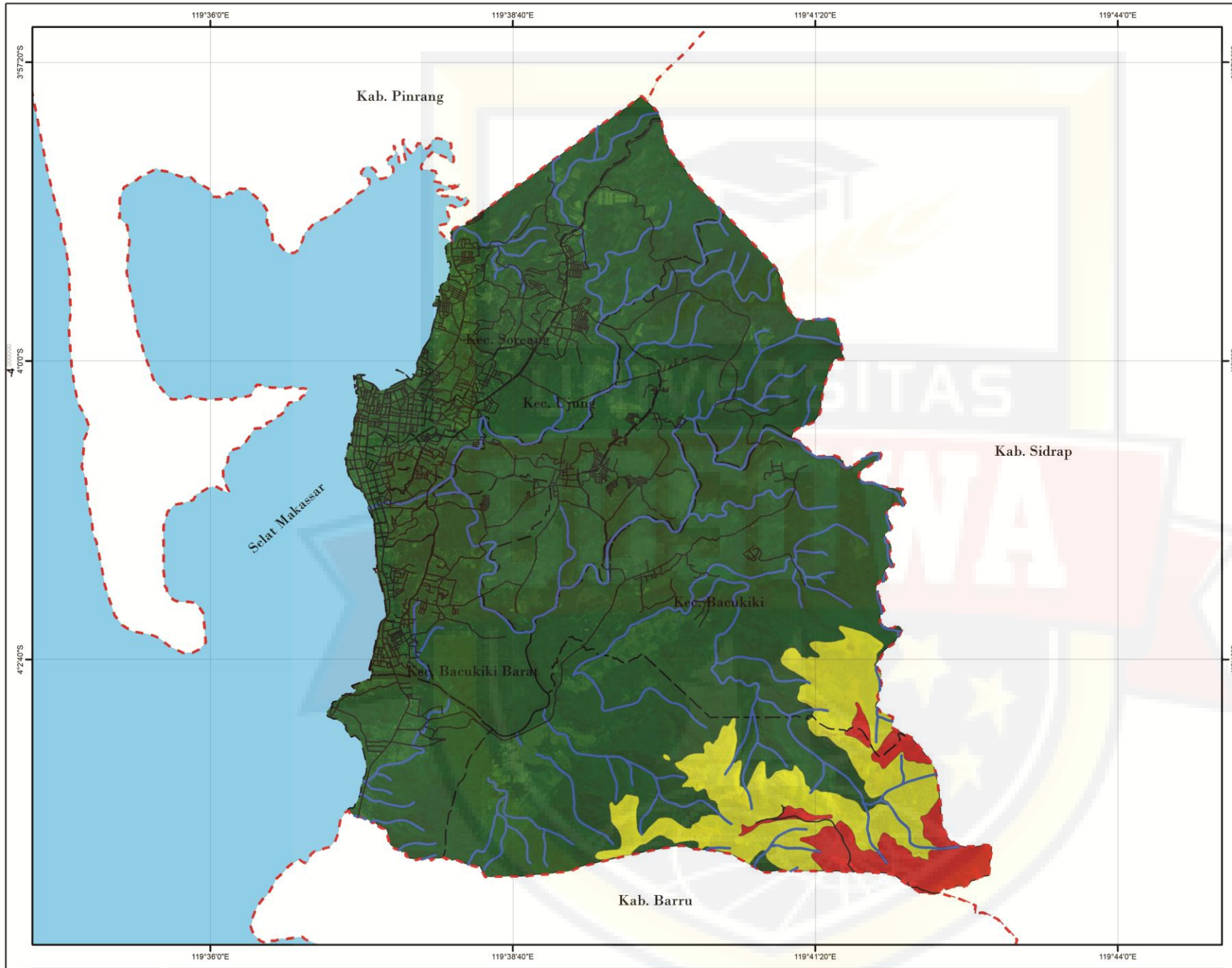

PETA TOPOGRAFI KOTA PAREPARE

STUDI PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN PESISIR SUMPANG MINANGAE KOTA PAREPARE

AZWAN ARMAN / 45 13 042 070

PETA TOPOGRAFI KOTA PAREPARE

Skala :

N
W E
S

1:60,000

0 600 1,200 2,400 Meter

Diagram Lokasi

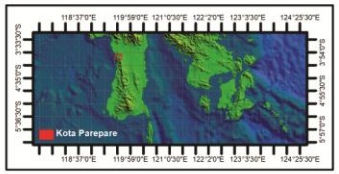

Proyeksi :..... *Universal Transverse Mercator*
Sistem Grid : ..... *Grid Geografi*
Datum : .....*world Geodetic system 1984 (WGS 84)*
Zona : .....*Selatan 50 S*

Keterangan :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Laut

Topografi

- 0-300
- 300-500
- 500-1000

Sumber Peta :

1. Peta Citra Satelit SAS Planet
2. Pemerintah Kota Parepare
3. RTRW Kota Parepare
4. Hasil Tim Survey 2017

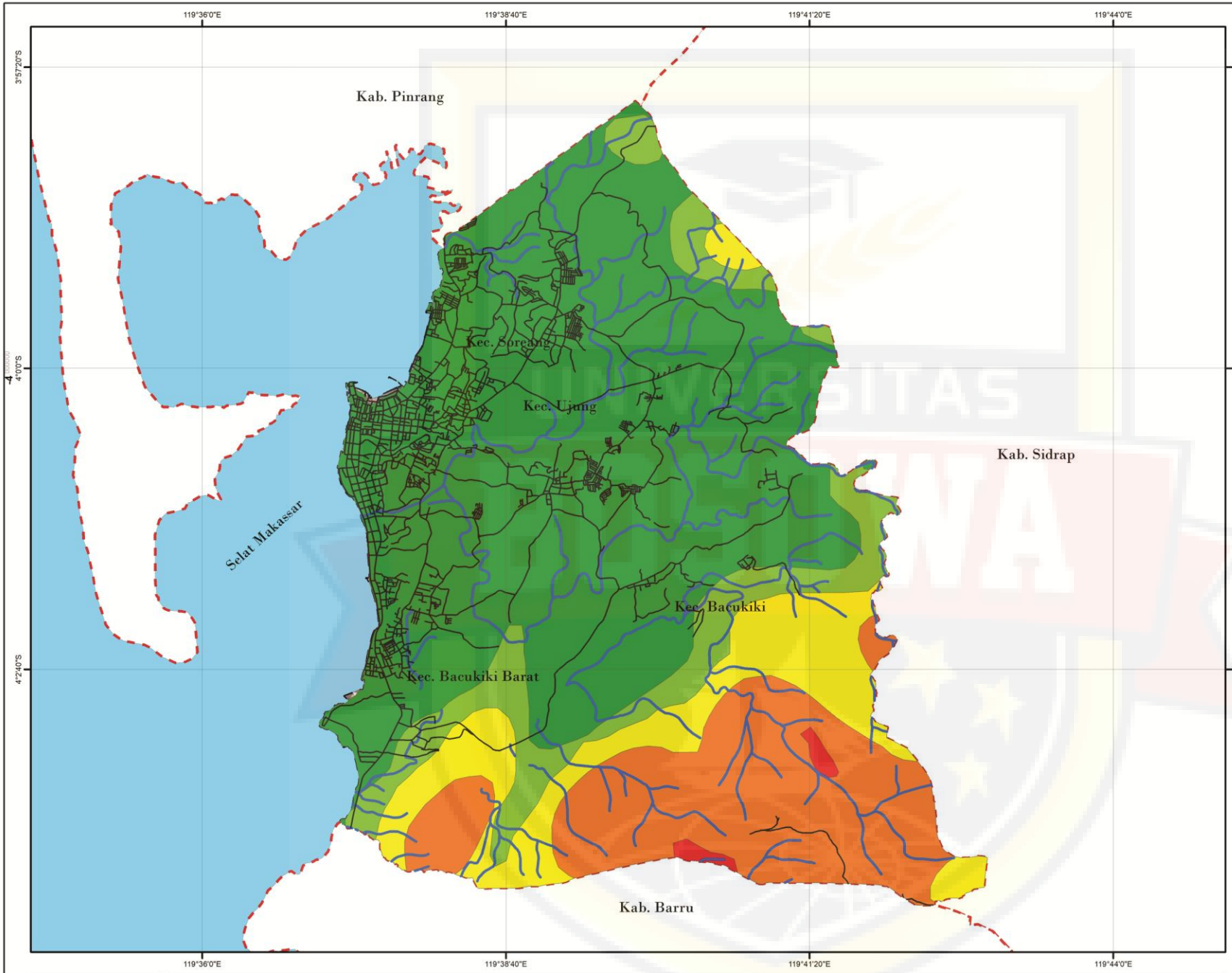

PETA KEMIRINGAN LERENG KOTA PAREPARE

STUDI PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN PESISIR SUMPANG MINANGAE KOTA PAREPARE

AZWAN ARMAN / 45 13 042 070

PETA KEMIRINGAN LERENG KOTA PAREPARE

Skala :

N
W E
S

1:60,000

0 600 1,200 2,400 Meter

Diagram Lokasi

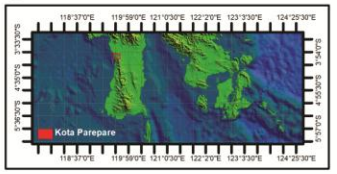

Proyeksi :..... *Universal Transverse Mercator*
Sistem Grid :..... *Grid Geografi*
Datum :.....*world Geodetic system 1984 (WGS 84)*
Zona :.....*Selatan 50 S*

Keterangan :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Laut

KEMIRINGAN LERENG

- 0-8 M
- 8-15 M
- 15-25 M
- 25-40 M
- >40 M

Sumber Peta :

1. Peta Citra Satelit SAS Planet
2. Pemerintah Kota Parepare
3. RTRW Kota Parepare
4. Hasil Tim Survey 2017

c. Kondisi Geologi

Formasi geologi yang terdapat Kota Parepare sebagai pembentuk struktur batuan di wilayah Kota Parepare antara lain endapan alluvial, batu gamping koral dan batuan vulkanik seperti tuff, breksi, konglomerat dan lava. Sedangkan struktur tanah dan batuan di wilayah Kota Parepare meliputi struktur batuan (geologi) yang terdiri dari struktur batuan gunung api kering (Qv) dan batuan gunung api bersipat menengah dan basah (Tnv) dan struktur batuan Tnv yang terletak di daerah sebelah selatan wilayah Kota Parepare, sedangkan kondisi fisiografi secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yakni daratan rendah dan perbukitan, dengan urainnya ;

- **Dataran Rendah**

Adapun bentuk dataran rendah di wilayah Kota Parepareterdapat dua (2) jenis, yakni alluvial dan martin, Untuk jenis alluvial terbentuk dari deposit alluvium berbahan halus yang berasal bagian hulu sungai dan daerah sekitarnya, s ungai utama dan anak sungainya beserta aliran permukaan mendeposisikan bahan-bahan suspensi, debu, pasir, kerikil dan kerakal sehingga terbentuk dataran alluvial luas yang berumur subresen yang dijumpai dalam bentuk lahan tanggul sungai, alur-alur draenase.

Proses-proses erosi, deposisi dan sedimentasi serta pergerakan air dapat membentuk lahan baru dengan bentuk wilayah datar, sedangkan kelompok martin adalah bentuk daratan pantai yang terbentuk karena danya proses agradasi yakni proses pengendapan material yang diangkut dari sungai, sehingga terjadinya penambahan daratan. Disamping ituadanya proses lain seperti pengangkatan daratan atau penurunan air laut, namun kedua proses ini terjadi secara terpisah sehingga dapat membentuk teras martin, sedangkan bentuk martin yang terdapat di Kota Parepare berupa daratan pasang surut, endapan delta dan beting pasir.

- **Perbukitan**

  Kelompok perbukitan adalah batuan basal yang tergolong batuan vulkanik dengan proses endogen dan eksogen yang dapat mengubah bentuk asli morfologi volkan menjadi perbukitan, yaitu melalui proses-proses pengangktan, erosi, gradasi, deposisi dan gerakan massa, sehingga terbentuklah perbukitan dengan amplitudo kurang dari 200 meter dila dibandingkan dengan daerah sekitarnya dan membentuk bukit-bukit kecil dengan pola acak.

Bentuk-bentuk lahan yang termasuk dalam kelompok perbukitan di Kota Parepare adalah pola acak berlereng (8-15 %), berlereng (15-25 %), berlereng 925-40 %) lebih dari 40 %. Sedangkan jenis tanah yang terdapat di Kota Parepare meliputi :

- Tanah Inceptisol adalah jenis tanah yang mulai memperlihatkan perkembangan horizon genetic sehingga tanah ini lebih tua dari pada tanah entisolnTanah Inceptisol berkembang pada rejim temperature yang panas maka inceptisol tersebut dikategorikan sebagai sub ordo Tropeps dan grup Dystropepts.
- Ordo Alfisol adalah jenis tanah yang dicirikan dengan horizon argil, penetapan ordo alfisol ini masih bersifat sementara karena salah satu persyaratan utama yaitu kejenuhan basa harus lebih dari 35% pada horizon lapisan bawah.
- Ordo Ultisol adalah jenis tanah yang termasuk ordo ultisol adalah tanah-tanah yang telah mengalami perkembangan yang lebih lanjut yang dapat disebabkan oleh proses pencucian yang sangat intensif. Tanah ini dicirikan oleh adanya horizon argilik dan kejenuhan basa kurang dari 35% pada horizon bawah

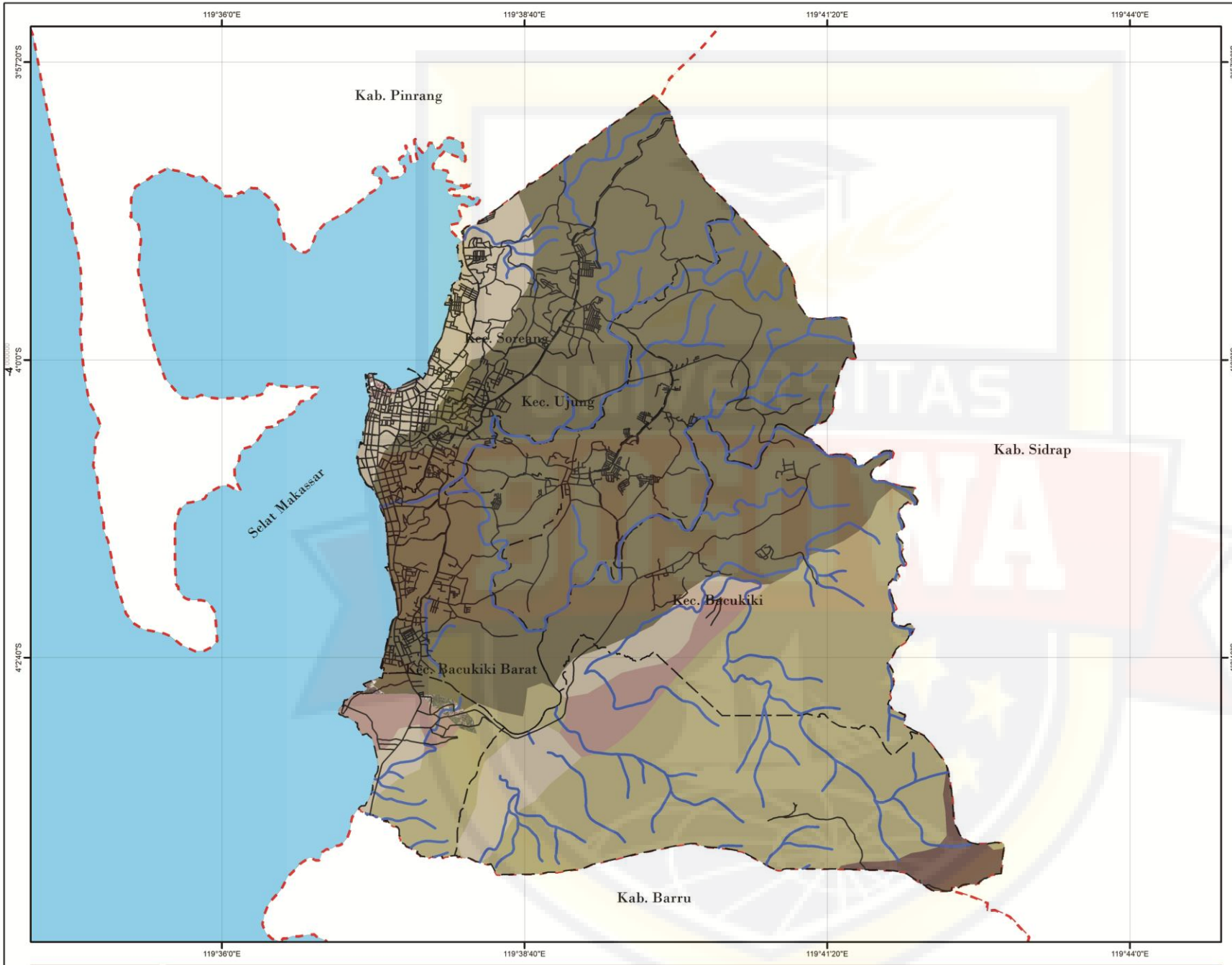

PETA GEOLOGI KOTA PAREPARE

STUDI PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN PESISIR SUMPANG MINANGAE KOTA PAREPARE

AZWAN ARMAN / 45 13 042 070

PETA GEOLOGI KOTA PAREPARE

Skala :

1:60,000

0 600 1,200 2,400 Meter

Diagram Lokasi

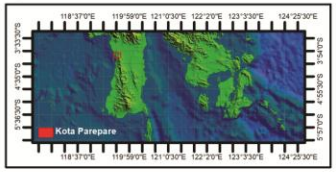

Proyeksi :..... *Universal Transverse Mercator*
Sistem Grid : ..... *Grid Geografi*
Datum : .....*world Geodetic system 1984 (WGS 84)*
Zona : .....*Selatan 50 S*

Keterangan :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Laut

Jenis Batuan

- Batuan Sedimen Laut Berselingan Dengan Batuan Gunung Api
- Breksi, Lava, Konglomerat, Tufa
- Kerikil, Pasir, Lempung, Lumpur, Batugamping Koral
- Pusat Erupsi

Sumber Peta :

1. Peta Citra Satelit SAS Planet
2. Pemerintah Kota Parepare
3. RTRW Kota Parepare
4. Hasil Tim Survey 2017

d. Jenis Tanah

Tatanan statigrafi pada umumnya terdiri dari endapan Aluvium, Miosen tengah-akhir serta Eosen akhir-Miosen tengah dengan sedikit terobosan Andesit. Endapan Aluvium terdiri dari lempung, pasir, lumpur, kerikil dan bongkah batuan yang tidak padu (lepas). Endapan ini berasal dari hasil desintegrasi batuan yang lebih tua. Struktur tanah yang terbentuk meliputi jenis tanah entisol, inceptisol, molisol, dan ultisol. Morfologi dataran rendah dan pantai terdapat di sebelah barat, memanjang dari utara ke selatan dan pada umumnya diisi oleh endapan sedimen Sungai dan pantai berpotensi pengembangan pertanian dan perikanan (tambak). Sedangkan morfologi perbukitan dengan ketinggian ± 50 – 200 meter dari permukaan laut yangberada pada bagian tengah ke arah Timur dan Selatan pada umumnya wilayah perbukitan yang berpotensi untuk pengembangan perkebunan. Berdasarkan Litostratigrafi, wilayah Kota Parepare mencakup 4 (empat) satuan batuan. (1) Satuan tufa kasar dan tufa halus yang bersifat masam. Satuan tufa kasar dan tufa halus ini menempati pada bagian Utara Kota Parepare, bersesuaian dengan satuan morfologi dataran rendah. (2) Satuan Batugapamping yang dijumpai di daerah

Tanah Mailiye dalam komposisi kalkarenit. Kemudian menumpang tidak selaras di atas satuan tufa yaitu satuan breksi vulkanik. Satuan batuan ini terdiri dari fragmen dan matrik yang bersifat andesitan. Batuan ini tersingkap dengan baik di bagian Selatandan Barat Kota Parepare. (3) Satuan Batuan Bekuyang dijumpai di pantai Lumpue, batuan beku ini bersifat masam. (4) Satuan keempat termuda, yaitu satuan alluvial yang menempati sebagian pantai Kota Parepare. Bahannya berupa bongkahan, kerakal, kerikil, pasir dan lempungserta endapan pantai yang sampai sekarang pembentuknya masih berlangsung. Formasi geologi di Kota Parepare sebagai pembentuk struktur batuan antara lain: endapan alluvial dan pantai, pasir, lempung, lumpur dan batu gamping koral.Selain itu terdapat juga batu gunung api berupa tufa, breksi, konglomerate dan lava. Jenis tanah di Kota Parepare antara lain berupa :

- Tanah Regosol, tanah ini memiliki tekstur yang kasar dengan tanah kadar pasir yang lebih dari 60% dan memiliki solum yang dangkal.
- Tanah Alluvial, adalah tanah endapan yang tidak memiliki horizon yang lengkap karena kerap kali tercuci akibat erosi pada daerah kemiringan.

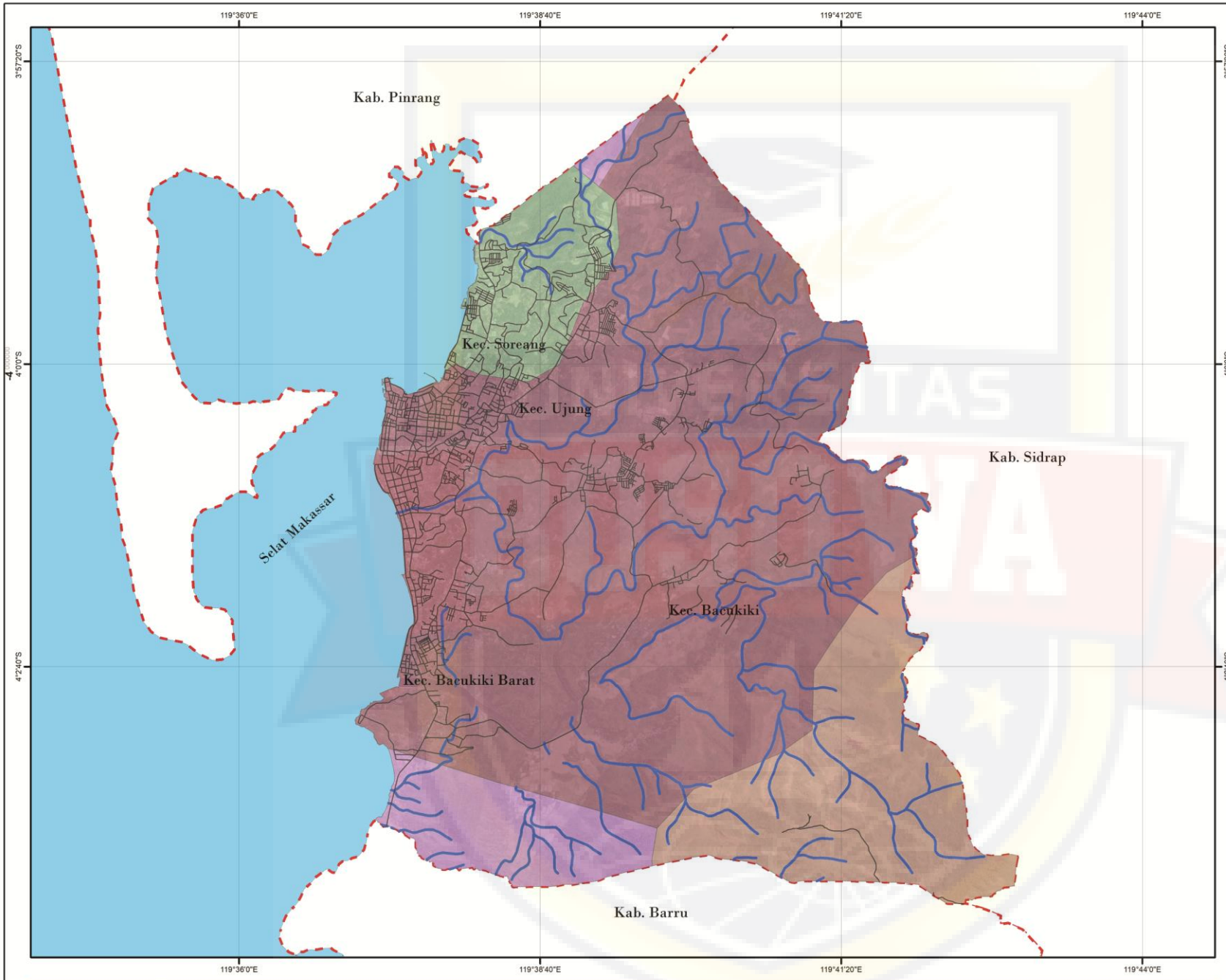

PETA JENIS TANAH KOTA PAREPARE

STUDI PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN PESISIR SUMPANG MINANGAE KOTA PAREPARE

AZWAN ARMAN / 45 13 042 070

PETA JENIS TANAH

Skala :

1:60,000

0 600 1,200 2,400 Meter

Diagram Lokasi

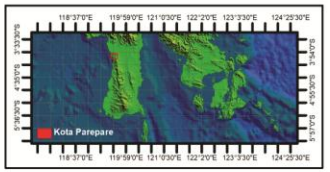

Proyeksi :..... *Universal Transverse Mercator*
Sistem Grid : ..... *Grid Geografi*
Datum : .....*world Geodetic system 1984 (WGS 84)*
Zona : .....*Selatan 50 S*

Keterangan :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Laut

JENIS TANAH

- Aluvial (Kelabu Tua)
- Aluvial (Coklat Kekelabuan)
- Komplex Mediteren (Coklat Kekelabuan)
- Mediteran (Coklat Tua)
- Regosol (Coklat)

Sumber Peta :

1. Peta Citra Satelit SAS Planet
2. Pemerintah Kota Parepare
3. RTRW Kota Parepare
4. Hasil Tim Survey 2017

e. Air Dan Permukaan

Secara hidrologis, penyediaan air bersih bagi masyarakat bersumber dari air permukaan, yaitu Sungai Karajae dan air tanah yang tersebar pada beberapa titik di Kota Parepare. Sumber air tanah yang dapat dimanfaatkan masyarakat adalah air tanah dangkal dan tanah dalam. Sumber air tanah dalam yang saat ini masih berfungsi yaitu sumur dalam P-2B Soreang, P-1D Harapan, P-5B Wekke'e dan P-4B Takkalao serta P-2C Soreang yang jumlah seluruh kapasitasnya mencapai 100 liter/detik. Untuk tanah dangkal berasal dari sumber Labatu dengan kapasitas 145 liter/detik.

Ditinjau dari keadaan hidrologisnya, Kota Parepare dalam memanfaatkan sumber air baku yang melayani masyarakat adalah air permukaan dari aliran air sungai Karajae. Sungai ini mempunyai debit air 99 liter/detik pada musim kemarau dan 500 liter/detik pada musim hujan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan dan pengawasan daerah aliran sungai di Kota Parepare sangat mendesak dilakukan, terlebih lagi dengan wilayah yang terkait langsung dengannya, seperti kawasan hutan lindung, kawasan konservasi dan daerah resapan hujan.

Selain pemanfaatan air permukaan, pengembangan pemanfaatan air baku bagi sistem penyediaan air bersih di Kota Parepare juga memanfaatkan air tanah dengan kedalaman 100 m

yang terletak di dalam wilayah Kota Parepare. Oleh sebab itu untuk terus memperoleh manfaat sumber air baku dari air tanah yang terletak di wilayah Kota Parepare perlu diadakan penghijauan dan revegetasi daerah aliran air tanah.

- Air tanah di Kota ParePare dapat dibagi kedalam 4 (empat) kelompok, yaitu :

  (a) Kondisi air tanah pada wilayah dataran dengan batuan akuifer terdiri dari alluvial, kerikil, batu pasir, dan konglomerat berupa akuifer air tanah bebas dengan produktivitas sedang, maka air tanah bebas antara 0,5 - 10 meter dengan debit air tanah dari sumur penduduk lebih kecil dari 5 liter/detik.

  (b) Kondisi air tanah pada wilayah bergelombang dengan batuan akuifer berupa batuan sedimen dan batuan metamorfosa sangat sulit menemukan air tanah khususnya pada batuan metamorf kecuali pada batu gamping berupa sungai-sungai bawah tanah.

  (c) Kondisi air tanah pada wilayah perbukitan dengan batuan akuifer terdiri atas dominasi batuan metamorfosa dan sedikit batuan sedimen, sehingga keterdapatan air tanah menjadi semakin sulit dan langka.

(d) Kondisi air tanah pada wilayah pegunungan dengan kondisi geologi disusun hampir semuanya oleh batuan metamorfosa, sehingga keberadaan akuifer air tanah adalah sangat langka, kecuali beberapa mata air yang menjadi hulu dari berbagai sungai besar yang mengalir di daerah ini.

Tabel 4.2

Gambaran Kapasitas Priuksi Air Permukaan

Tahun 2012-2017

Air Permukaan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IPA 1 Sungai Karajae	16,34	16,33	16,29	15,07	39,19	40
IPA 2 Sungai Karajae	13,11	14,09	16,02	15,09	16,98	20
IPA 3 Sungai Karajae	10,45	6,43	8,18	9,42	16,57	20
IPA 4 Sungai Karajae	-	-	12,90	14,62	16,41	20
IPA 5 Sungai Karajae	9,10	10,57	8,80	9,17	17,32	20
Jumlah	49,00	47,42	62,19	66,37	106,47	120

Sumber : PDAM Kota ParePare, 2017

f. Klimatologi

Kondisi iklim di wilayah Kota Parepare terbagi dalamdua zona yakni zona hujan masing-masing zona C2 dan D2. Zona iklim tipe C2 ditandai dengan jumlahbulan basah sekitar 5-6 bulan dan jumlah bulan kering 2-3 bulan. Zona ini meliputi wilayah bagian barat Kota Parepare sampai pesisir pantai dengan luas ± 60% dari luas wilayah Kota Parepare, sedangkan Zona iklim tipe D2 ditandai dengan jumlah bulan basah sekitar 3-4 bulan dan jumlah bulan kering 2-3 bulan. Zona ini meliputi wilayah bagian timur Kota Parepare dengan luas ±40% dari luas wilayah Kota Parepare. Dengan demikian, Kota Parepare didominasi oleh tipe iklim C2 dimana jumlah bulan basah lebih dominan dibanding bulan kering. Karena wilayah Kota Parepare memiliki dua (2) pola musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Dari data curah hujan yang diperolehdari stasiun pengamatan Kecamatan Ujung menunjukkan bahwa rerata curah hujan tahunan berkisar 1796 mm/thn. Curah hujan bulanan yang terjadi di wilayah ini umumnya lebih kecil dari 400 mm/thn kecuali pada bulan desember. Besar curah hujan rata-rata bulanan berkisar antara 40-428 mm dengan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dan tertinggi pada bulan desember, tabel 2.5 berikut ini :

Curah hujan tertinggi di Kota Parepare adalah 556 mm/tahun dan terendah menunjukkan angka 0mm/tahun atau nol hari pada Bulan

Agustus di Kecamatan Bacukiki. Rata-rata kecepatan angin berkisar antara 2,5-5,8 m/detik yang bertiup dari arah Barat ke Timur selama Bulan November sampai April,sedangkan temperatur suhu udara rata-rata berkisar 28,1-28,8 0C.

2. **Perkembangan Jumlah Penduduk**

- **Kependudukan**

Penduduk Kota Parepare pada tahun 2015 sekitar 138.699 jiwa yang terdiri dari 68.094 jiwa laki-laki dan 70.605 jiwa perempuan. Sex rasionya adalah sekitar 96 yang berarti terdapat sekitar 96 orang laki-laki diantara 100 perempuan. Diduga salah satu penyebabnya adalah karena penduduk laki-laki di daerah ini lebih banyak keluar daerah untuk sekolah, bekerja dan mencari pekerjaan. Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 1980,1990,dan 2000, 2010 laju pertumbuhan penduduk Kota Parepare pada kurun waktu 1980-1990 adalah 1,62 persen per tahun, 1990-2000 turun menjadi 0,66 persen pertahun. Sementara pada tahun 2015 pertumbuhan penduduknya adalah sekitar 1,42 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut, oleh banyak pihak dianggap sebagai suatu hal yang merisaukan apalagi bila tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi tidak merata juga berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial, terutama bila tidak diimbangi dengan

pertambahan lapangan kerja. Dengan kata lain apabila pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan penduduk akan menjadi masalah, terlebih bila terdapat kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi. Pertumbuhan penduduk yang positif akan memperluas lahan hunian dan mengurangi lahan usaha bagi penduduk itu sendiri. Tren data yang ada memperlihatkan bahwa kepadatan penduduk Kota Parepare semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 kepadatan penduduk Kota Parepare adalah sekitar 1.378 orang/km2 naik menjadi 1.396 orang/km2 pada tahun 2015. Peningkatan kepadatan penduduk tentunya akan menambah beban pemerintah dalam penyediaan berbagai macam fasilitas, tetapi jika hal itu diikuti dengan peningkatan potensi penduduk terutama dari segi ekonomi, maka peningkatan kepadatan penduduk justru akan memberikan dampak yang positif. Pada tahun 2015 jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) di Kota Parepare adalah sekitar 39.942 orang, penduduk usia produktif (15-64 tahun) sekitar 92.304 orang, dan penduduk usia lanjut (65 tahun keatas) sekitar 6.453 orang. Angka beban tanggungan penduduk Kota Parepare pada tahun 2015 adalah sebesar 50,26 artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban ekonomi sekitar 50 orang usia tidak produktif. Angka beban tanggungan ini menurun disbanding tahun 2014 yang berkisar 51 orang.

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota ParePare Tahun 2010, 2014,dan 2015

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)			Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	
	2010	2014	2015	2010-2015	2014-2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bacukiki	14.477	16.753	17.349	3,69	3,56
Bacukiki Barat	39.085	41.497	42.313	1,60	1,48
Ujung	32.227	33.684	34.006	1,08	0,96
Soreang	43.469	44.769	45.031	0,71	0,59
ParePare	129 262	136.903	138.699	1,42	1,31

Sumber : Badan Pusat Statistik 2017

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk dan Rasio jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota ParePare Tahun 2010, 2014,dan 2015

Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	LakiLaki	Perempuan	Jumlah	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Bacukiki	8.558	8.791	17.349	97
Bacukiki Barat	20.775	21.538	42.313	96
Ujung	16.588	17.418	34.006	95
Soreang	22.173	22.858	45.031	97
ParePare	68.094	70.605	138.699	96

Sumber : Badan Pusat Statistik 2017

3. Penggunaan Lahan

Kota ParePare merupakan Kawasan yang sepenuhnya memiliki kawasan Pesisir. Jenis penggunaan lahan yang bervariasi menjadikan Kecamatan Bacukiki Barat memiliki wilayah yang berkarakteristik dengan jenis tanah yang Berpariasi menjadikan Kecamatan Bacukiki Barat sebagai kelurahan yang memiliki potensi.

Selain penggunaan lahan kawasan, Kecamatan Bacukiki Barat memiliki penggunaan lahan lain, yang didalamnya terdapat unsur-unsur penggunaan lahan sangat bervariatif, seperti sawah, permukiman, tambak, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut

Tabel 4.5
Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan
Di Kota ParePare

Kecamatan	Penggunaan Lahan			Total/Luas Lahan
	Sawah	Pertanian Bukan Sawah	Bukan Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bacukiki	612	4.796	1.262	6.670
Bacukiki Barat	56	1.010	234	1.300
Ujung	119	348	663	1.300
Soreang	47	443	243	663
Jumlah	883	6.587	2.512	9.933

Sumber : Badan Pusat Statistik 2017

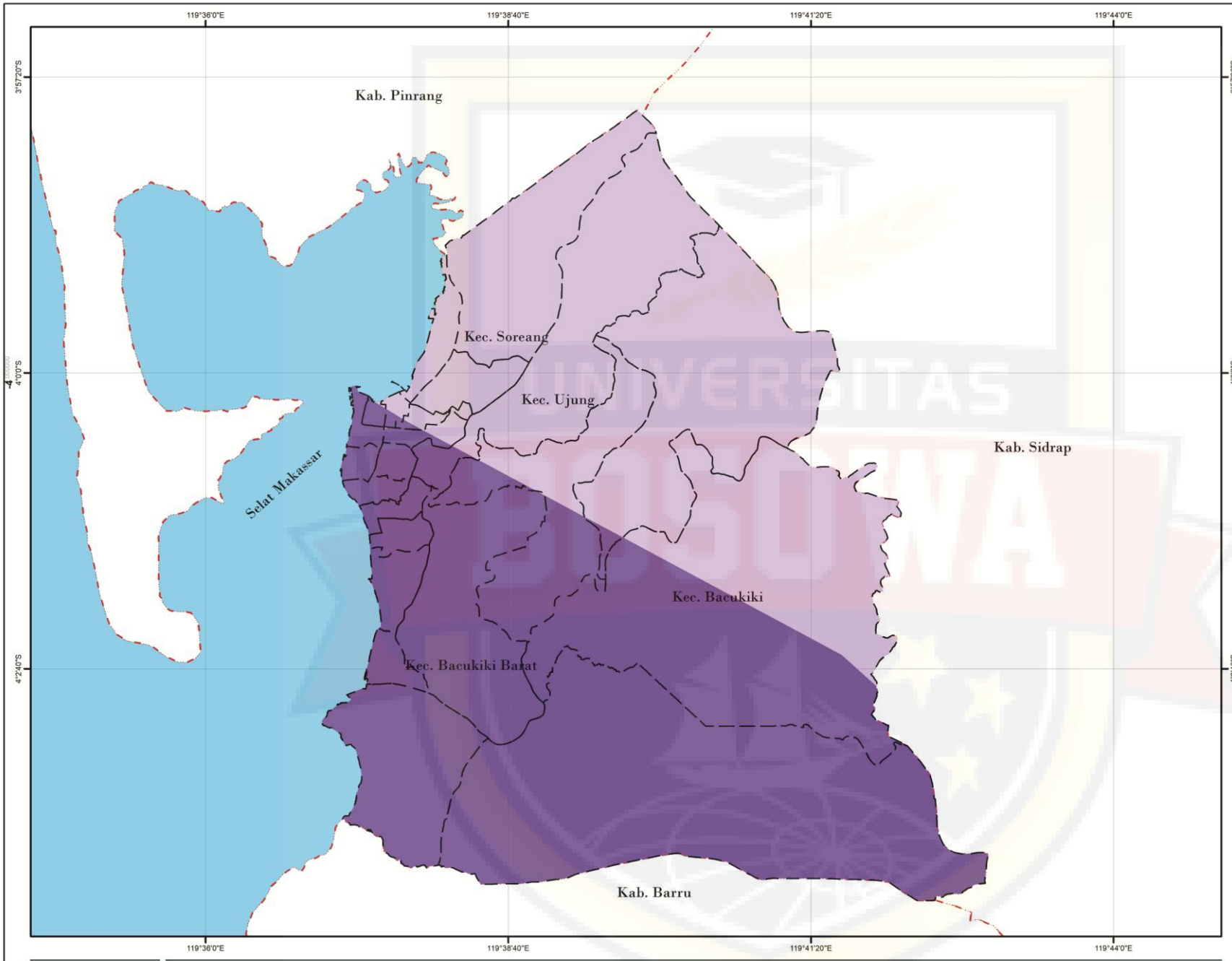

PETA KLIMATOLOGI KOTA PAREPARE

STUDI PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN PESISIR SUMPANG MINANGAE KOTA PAREPARE

AZWAN ARMAN / 45 13 042 070

PETA KLIMATOLOGI KOTA PAREPARE

Skala :

1:60,000

0 600 1,200 2,400 Meter

Diagram Lokasi

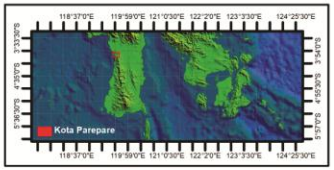

Proyeksi :..... *Universal Transverse Mercator*
Sistem Grid : ..... *Grid Geografi*
Datum : .....*world Geodetic system 1984 (WGS 84)*
Zona : .....*Selatan 50 S*

Keterangan :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Laut

Curah Hujan

- 1500-2000 mm/thn
- 2000-2500 mm/thn

Sumber Peta :

1. Peta Citra Satelit SAS Planet
2. Pemerintah Kota Parepare
3. RTRW Kota Parepare
4. Hasil Tim Survey 2017

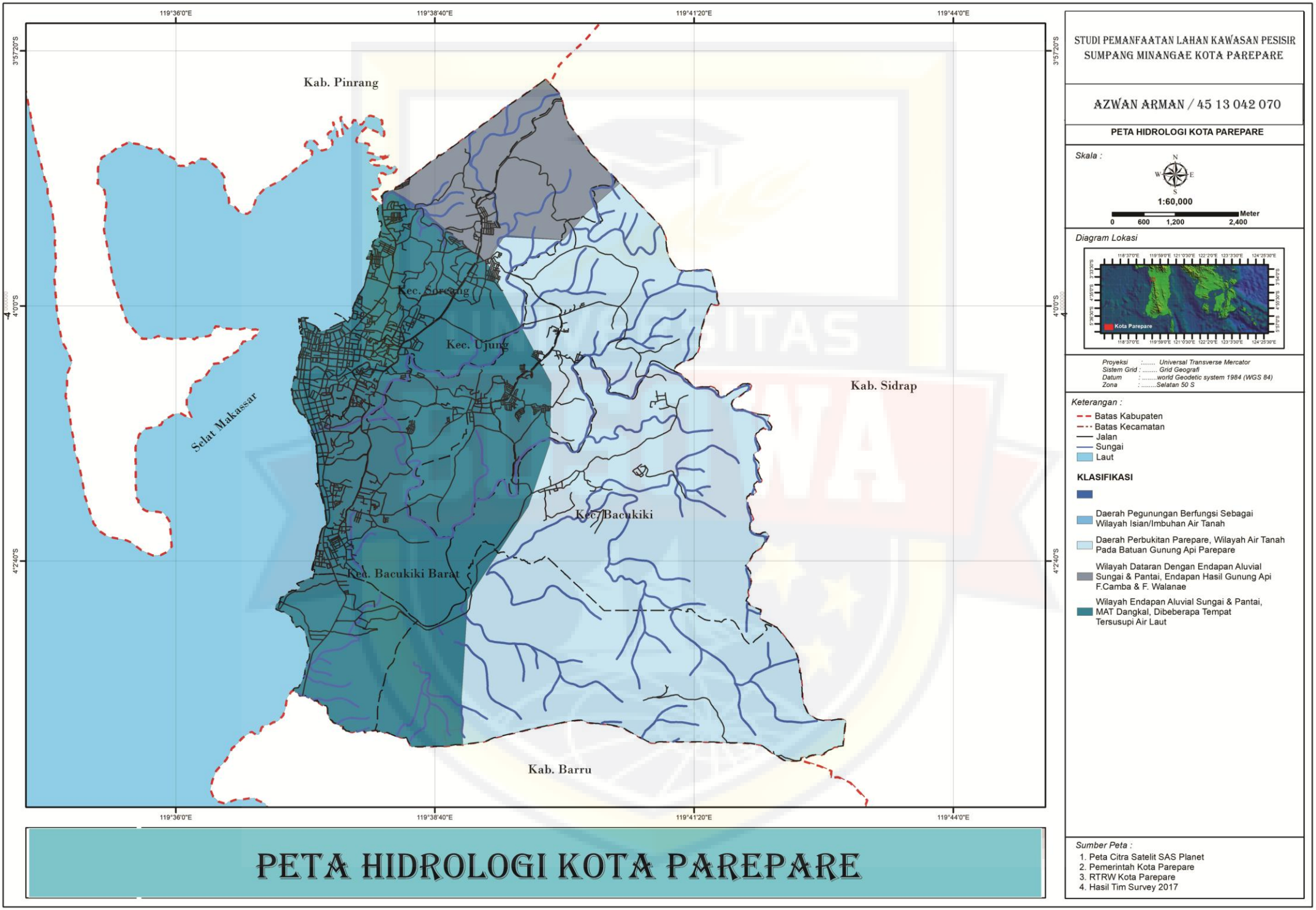

PETA HIDROLOGI KOTA PAREPARE

STUDI PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN PESISIR SUMPANG MINANGAE KOTA PAREPARE

AZWAN ARMAN / 45 13 042 070

PETA HIDROLOGI KOTA PAREPARE

Skala :

1:60,000

0 600 1,200 2,400 Meter

Diagram Lokasi

Proyeksi : ..... *Universal Transverse Mercator*
Sistem Grid : ..... *Grid Geografi*
Datum : ..... *world Geodetic system 1984 (WGS 84)*
Zona : ..... *Selatan 50 S*

Keterangan :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Laut

KLASIFIKASI

- Daerah Pegunungan Berfungsi Sebagai Wilayah Isian/Imbuhan Air Tanah
- Daerah Perbukitan Parepare, Wilayah Air Tanah Pada Batuan Gunung Api Parepare
- Wilayah Dataran Dengan Endapan Aluvial Sungai & Pantai, Endapan Hasil Gunung Api F.Camba & F. Walanae
- Wilayah Endapan Aluvial Sungai & Pantai, MAT Dangkal, Dibeberapa Tempat Tersusupi Air Laut

Sumber Peta :

1. Peta Citra Satelit SAS Planet
2. Pemerintah Kota Parepare
3. RTRW Kota Parepare
4. Hasil Tim Survey 2017

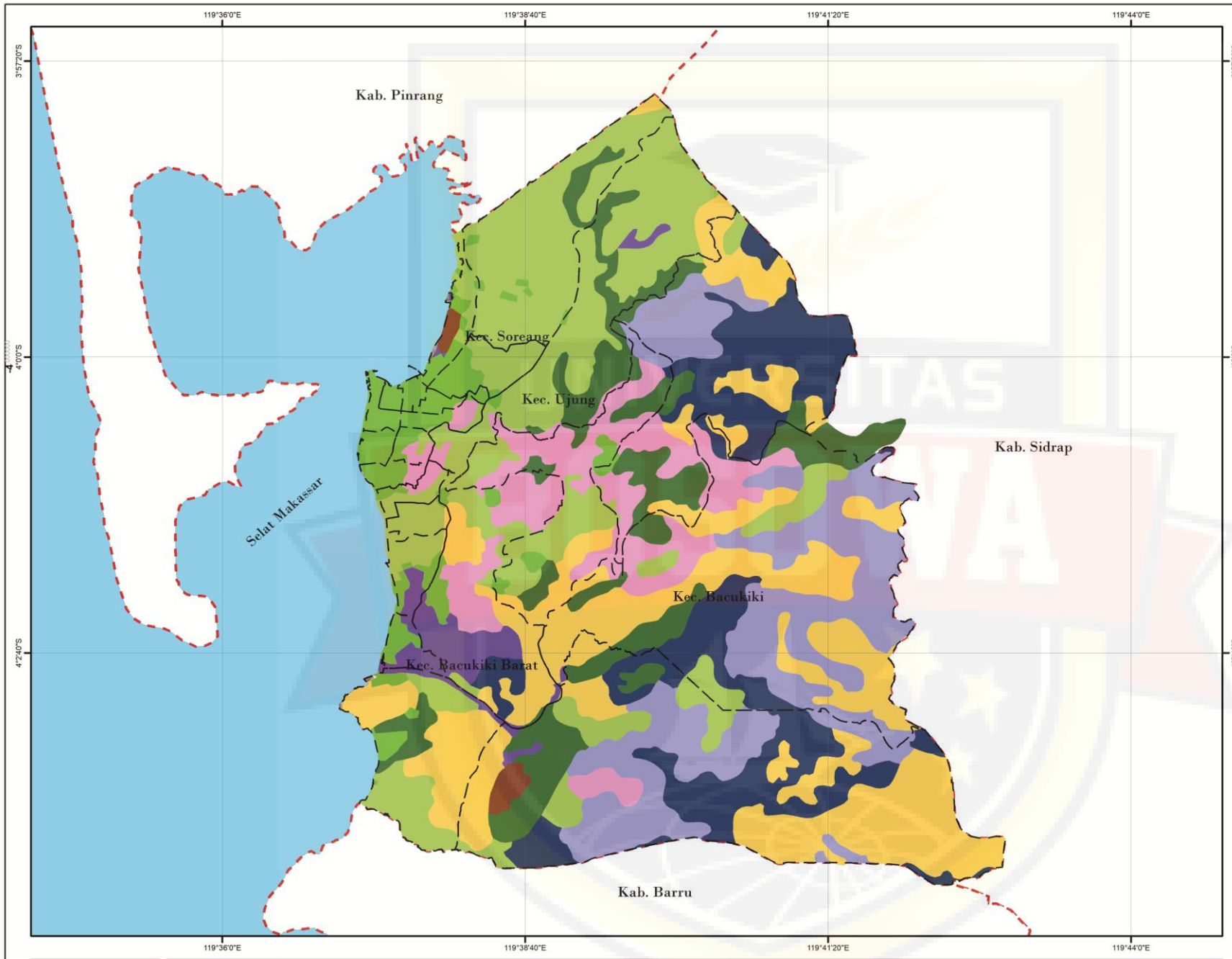

PETA TATA GUNA LAHAN KOTA PAREPARE

STUDI PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN PESISIR SUMPANG MINANGAE KOTA PAREPARE

AZWAN ARMAN / 45 13 042 070

PETA TATA GUNA LAHAN KOTA PAREPARE

Skala :

1:60,000

0 600 1,200 2,400 Meter

Diagram Lokasi

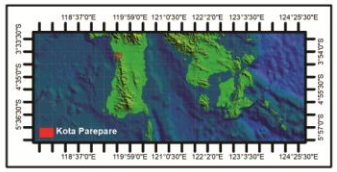

Proyeksi : ..... *Universal Transverse Mercator*
Sistem Grid : ..... *Grid Geografi*
Datum : ..... *world Geodetic system 1984 (WGS 84)*
Zona : ..... *Selatan 50 S*

Keterangan :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Laut

Penggunaan Lahan

- Hutan
- Permukiman
- Kebun
- Padang
- Sawah
- Semak
- Tambak
- Tegalan

Sumber Peta :

1. Peta Citra Satelit SAS Planet
2. Pemerintah Kota Parepare
3. RTRW Kota Parepare
4. Hasil Tim Survey 2017

B. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Bacukiki Barat

1. Aspek Fisik Dasar

Aspek fisik dasar wilayah Kecamatan Bacukiki Barat, dalam hal ini meliputi kondisi geografis, Topografi, Geologi, Jenis Tanah, Klimatologi, Hidrologi dan kondisi pola penggunaan lahan;

a. Letak Geografis

Kecamatan Bacukiki Barat terletak diantara dengan Posisi S: 04 02. 749, E; 1130 37 ‘ 435” dan merupakan salah satu kelurahan pesisir di kota Parepare. Sepanjang wilayah barat kelurahan ini berbatasan langsung dengan teluk Parepare.. Berbeda misalnya dengan beberapa kelurahan yang lain berbentuk memanjang-membujur (Utara-Selatan), terhadap keseluruhan kota Parepare.

Keadaan geografi Kecamatan Bacukiki Barat merupakan daerah pesisir pantai. Kecamatan Bacukiki Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 39.085 jiwa. Kecamatan Bacukiki Barat merupakan kecamat terluas di Kota Parepare dengan luas kurang lebih 66,70 Km2 atau sekitar 67,15% dari luas Kota Parepare. Kelurahan yang berada di Kecamatan Bacukiki Barat meliputi Kelurahan Lumpue, Kelurahan Sumpang Minangae, Kelurahan Cappa Galung, Kelurahan Tiro Sompe, Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Bumi Harapan.

Tabel 4.6

Luas,Letak dan Ketinggian Kelurahan Darl Permukaan Laut

Di Kecamatan Bacukiki Barat Tahun 2017

Kelurahan	Luas (km)	Persentase Luas Kelurahan	Pantai/Bukan Pantai	Ketinggian Dari Permukaan Laut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lumpue	4,99	38,38	Pantai	4 M
Bumi Harapan	6,16	47,38	Bukan Pantai	75 M
Sumpang Minangae	0,31	2,38	Pantai	4 M
CappaGal	0,70	5,38	Pantai	3 M
Tiro Sompe	0,38	2,92	Bukan Pantai	20 M
Kampung Baru	0,46	3,54	Pantai	4 M

Sumber : BPS Kota ParePare 2017

Grafik

Distribusi Persentase Luas Kecamatan Bacukiki Barat

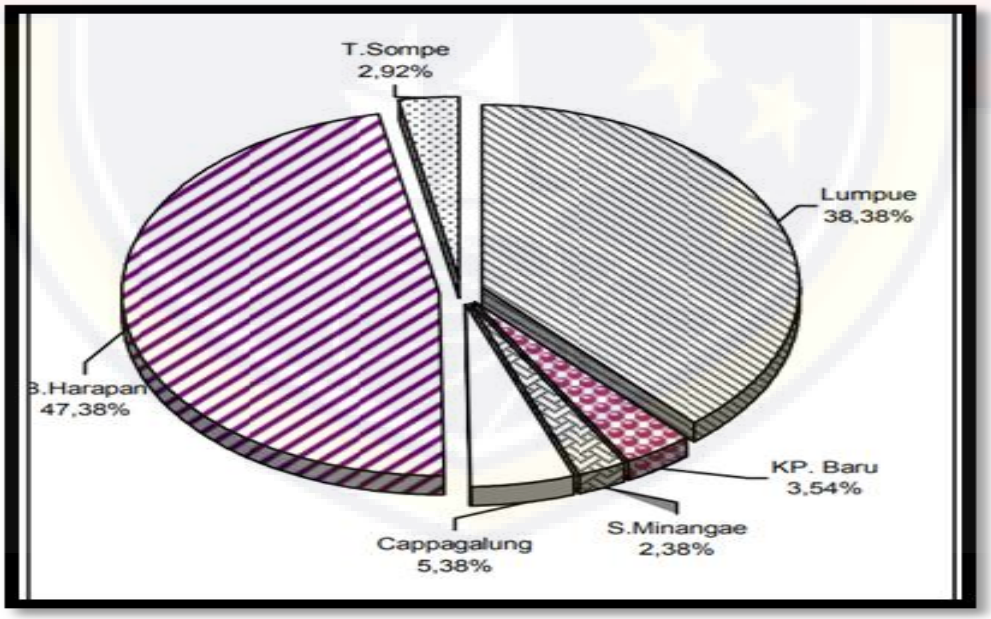

Sumber :Badan Pusat Statistik 2017

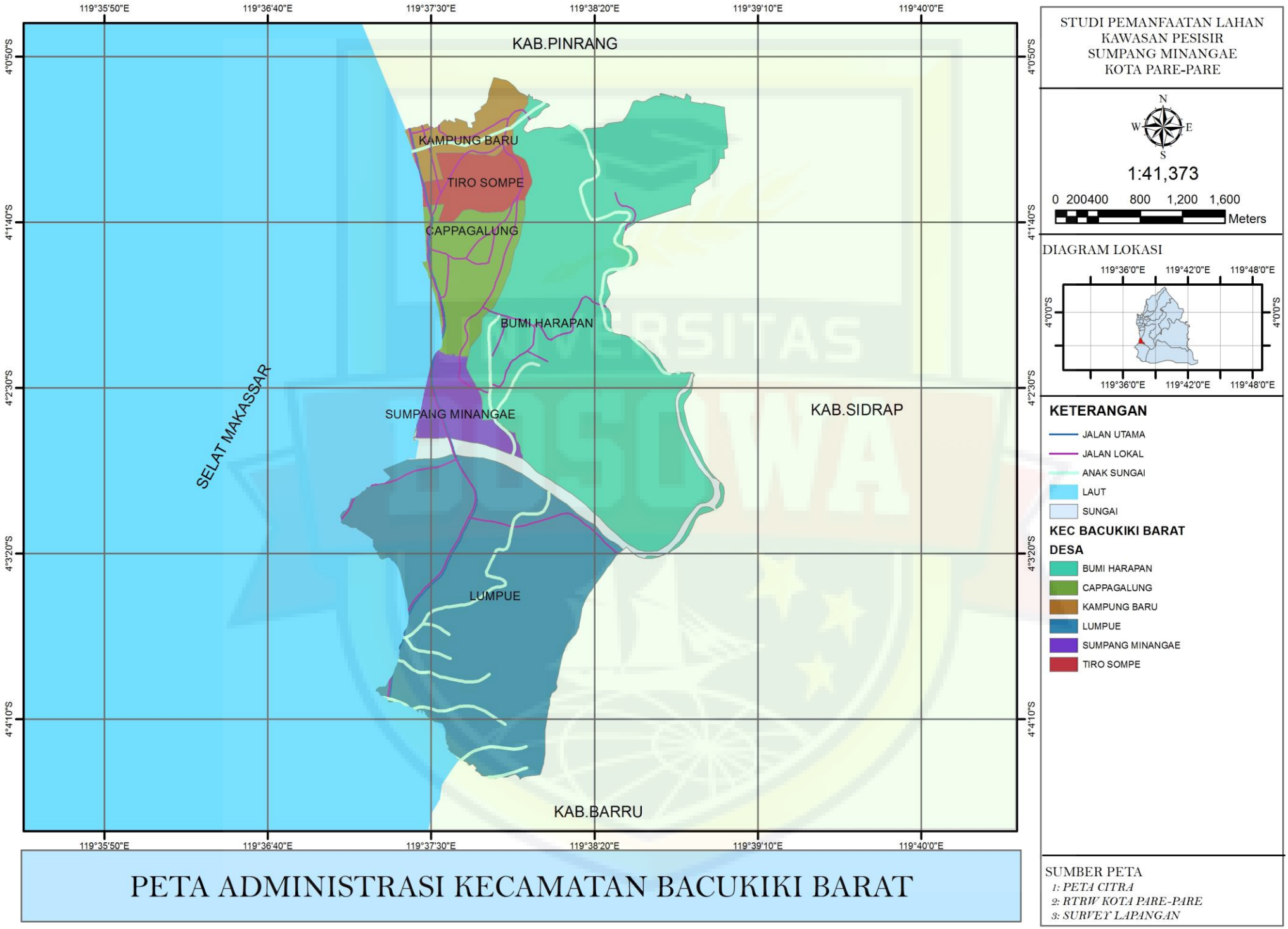

STUDI PEMANFAATAN LAHAN
KAWASAN PESISIR
SUMPANG MINANGAE
KOTA PARE-PARE

N
W E
S

1:41,373

0 200400 800 1,200 1,600
Meters

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

- JALAN UTAMA
- JALAN LOKAL
- ANAK SUNGAI
- LAUT
- SUNGAI

KEC BACUKIKI BARAT

DESA

- BUMI HARAPAN
- CAPPAGALUNG
- KAMPUNG BARU
- LUMPUE
- SUMPANG MINANGAE
- TIRO SOMPE

SUMBER PETA
1: PETA CITRA
2: RTRW KOTA PARE-PARE
3: SURVEY LAPANGAN

PETA ADMINISTRASI KECAMATAN BACUKIKI BARAT

b. Kondisi Hidrologi

Secara hidrologis, penyediaan air bersih bagi masyarakat bersumber dari permukaan air bersih bagi masyarakat bersumber dari air permukaan, yaitu Sungai Karajae dan air tanah yang tersebar pada beberapa titik di Kota Parepare yang sumbernya terletak di Kecamatan Bacukiki Barat. Ditinjau dari keadaan hidrologisnya, Kecamatan Bacukiki Barat dalam memanfaatkan sumber air baku yang melayani masyarakat adalah air permukaan dari aliran air sungai Karajae. Sungai ini mempunyai debit air 99 liter/detik pada musim kemarau dan 500 liter/detik pada musim hujan.26 Selain pemanfaatan air permukaan, pengembangan pemanfaatan air baku bagi sistem penyediaan air bersih di Kota Parepare juga memanfaatkan air tanah dengan kedalaman 100 m yang terletak di dalam wilayah Kota Parepare.

Oleh sebab itu untuk terus memperoleh manfaat sumber air baku dari air tanah yang terletak di wilayah Kecamatan Bacukiki Barat perlu diadakan penghijauan dan revegetasi daerah aliran air tanah

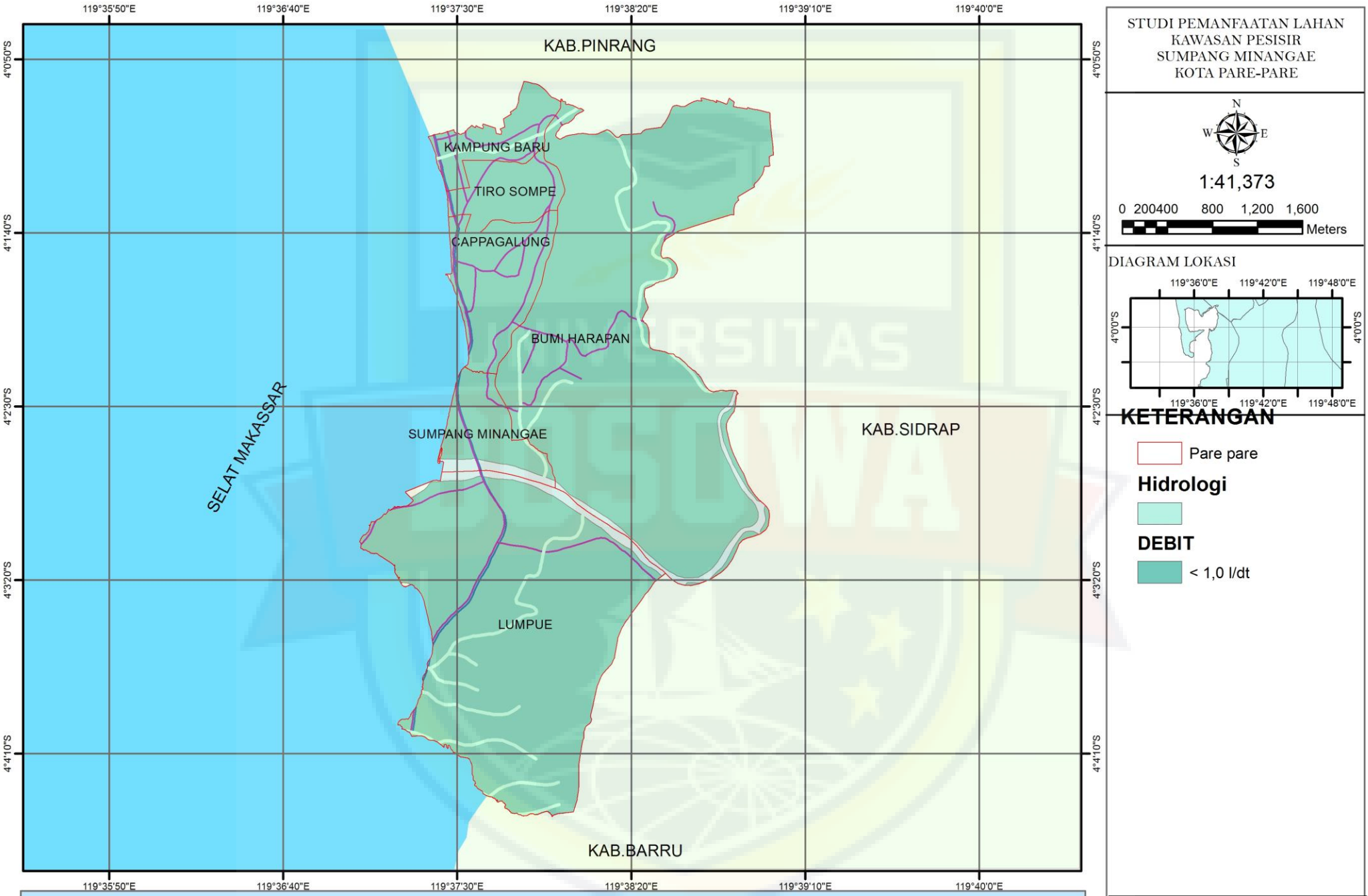

STUDI PEMANFAATAN LAHAN
KAWASAN PESISIR
SUMPANG MINANGAE
KOTA PARE-PARE

N
W E
S

1:41,373

0 200400 800 1,200 1,600
Meters

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Pare pare

Hidrologi

DEBIT

< 1,0 l/dt

SUMBER PETA
1: PETA CITRA
2: RTRW KOTA PARE-PARE
3: SURVEY LAPANGAN

PETA HIDROLOGI KECAMATAN BACUKIKI BARAT

c. Kondisi Jenis Tanah

Kondisi Jenis Tanah di Kecamatan Bacukiki Barat Merupakan Tatanan statigrafi pada umumnya terdiri dari endapan Aluvium, Miosen tengah-akhir serta Eosen akhir-Miosen tengah dengan sedikit terobosan Andesit. Endapan Aluvium terdiri dari lempung, pasir, lumpur, kerikil dan bongkah batuan yang tidak padu (lepas). Endapan ini berasal dari hasil desintegrasi batuan yang lebih tua. Struktur tanah yang terbentuk meliputi jenis tanah entisol, inceptisol, molisol, dan ultisol. Morfologi dataran rendah dan pantai terdapat di sebelah barat, memanjang dari utara ke selatan dan pada umumnya diisi oleh endapan sedimen Sungai dan pantai berpotensi pengembangan pertanian dan perikanan (tambak). (2) Satuan Batugapamping yang dijumpai di daerah Tanah Mailiye dalam komposisi kalkarenit. Kemudian menumpang tidak selaras di atas satuan tufa yaitu satuan breksi vulkanik. Satuan batuan ini terdiri dari fragmen dan matrik yang bersifat andesitan. Batuan ini tersingkap dengan baik di bagian Selatandan Barat Kota Parepare. (3) Satuan Batuan Bekuyang dijumpai di pantai Lumpue, batuan beku ini bersifat masam. (4) Satuan keempat termuda, yaitu satuan alluvial yang menempati sebagian pantai Kota Parepare. Bahannya berupa bongkahan, kerakal, kerikil, pasir dan lempung serta endapan'pantai.

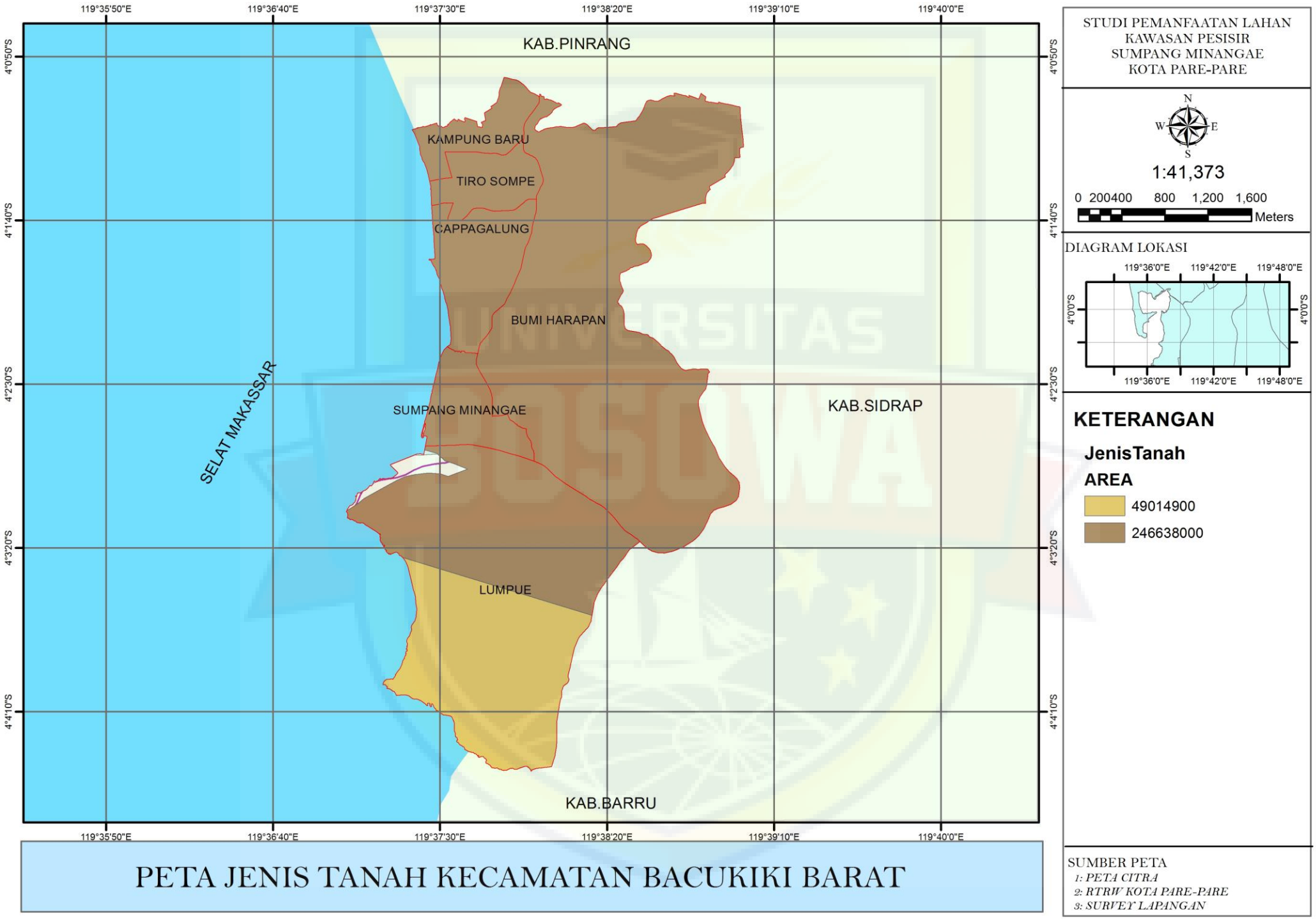

STUDI PEMANFAATAN LAHAN
KAWASAN PESISIR
SUMPANG MINANGAE
KOTA PARE-PARE

N
W
E
S

1:41,373

0 200400 800 1,200 1,600
Meters

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

JenisTanah

AREA

- 49014900
- 246638000

SUMBER PETA

1: PETA CITRA
2: RTRW KOTA PARE-PARE
3: SURVEY LAPANGAN

PETA JENIS TANAH KECAMATAN BACUKIKI BARAT

d. Kemiringan Lereng

Tingkat kemiringan lereng merupakan kondisi fisik topografi suatu wilayah yang sangat mempengaruhi terhadap kesesuaian lahan dan penataan lingkungan alami. Untuk kawasan terbangun, kondisi topografi berpengaruh terhadap terjadinya longsor dan ketahanan konstruksi bangunan. Kemiringan lereng adalah faktor utama yang menentukan fungsi kawasan, untuk diarahkan sebagai kawasan lindung atau kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kawasan fungsional sepertipersawahan, ladang dan kawasan terbangun membutuhkan lahan dengan kemiringan dibawah15%, sedangkan lahan dengan kemiringan diatas 40% akan sangat sesuai untuk perkebunan, pertanian tanaman keras dan hutan.Karakteristik tiap kemiringan lereng diuraikan sebagai berikut : Kelerengan 0% - 5% dapat digunakan secara intensif dengan pengelolaan kecil.

- Kelerengan 5% - 10% dapat digunakan untuk kegiatan perkotaan dan pertanian, namun bila terjadi kesalahan dalam pengelolaannya masih mungkinterjadi erosi.
- Kelerengan 10% - 30% yakni daerah yang sangat mungkin mengalami erosi, terutama bila tumbuhan pada permukaannya ditebang, daerah ini masihdapat dibudidayakan namun dengan usaha’lebih.

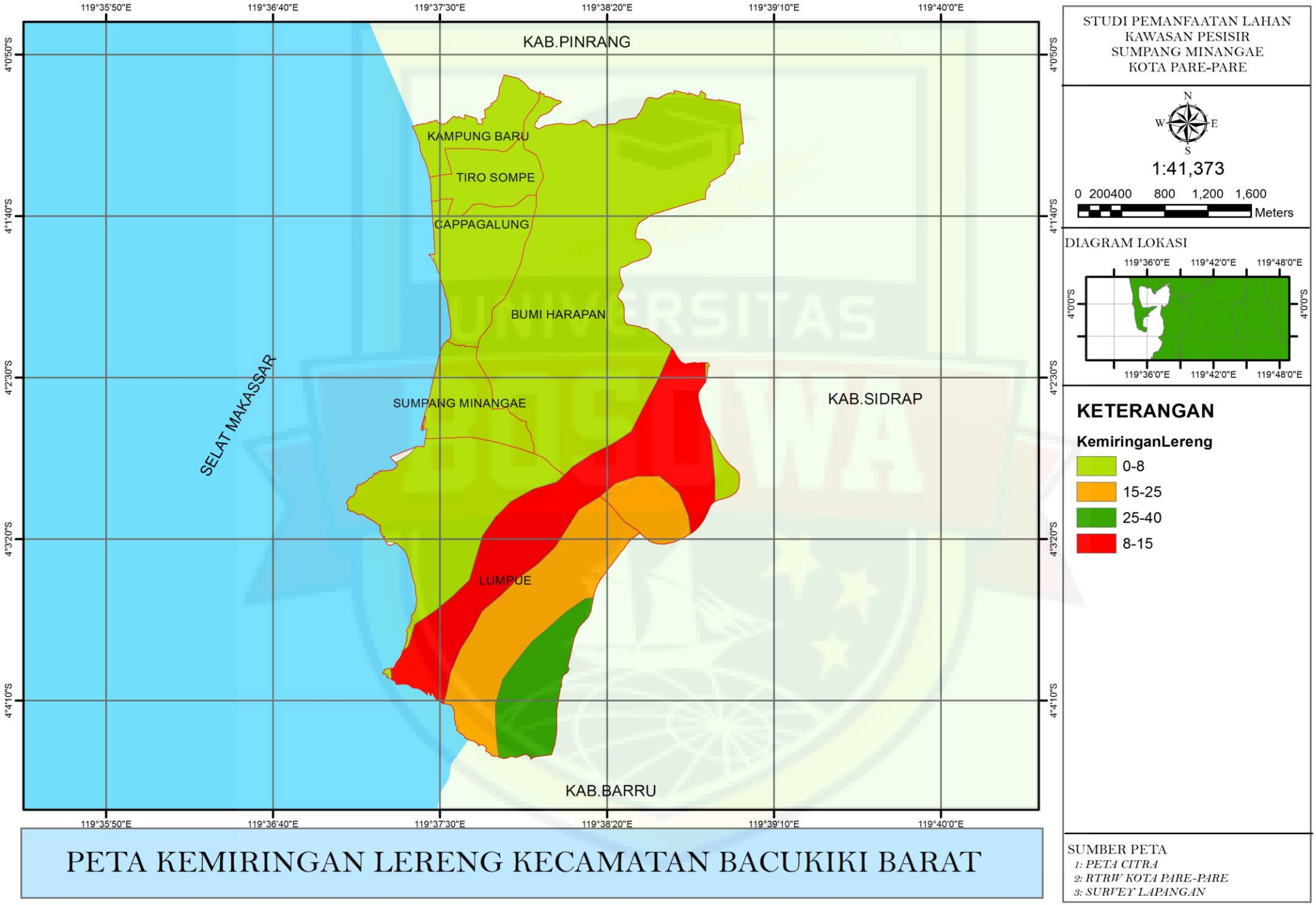

PETA KEMIRINGAN LERENG KECAMATAN BACUKIKI BARAT

STUDI PEMANFAATAN LAHAN
KAWASAN PESISIR
SUMPANG MINANGAE
KOTA PARE-PARE

N
W E
S

1:41,373

0 200400 800 1,200 1,600
Meters

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

KemiringanLereng

- 0-8
- 15-25
- 25-40
- 8-15

SUMBER PETA

1: PETA CITRA
2: RTRW KOTA PARE-PARE
3: SURVEY LAPANGAN

2. Penggunaan Lahan

a. Penggunaan Lahan 2013

Kecamatan Bacukiki Barat merupakan Kawasan yang sepenuhnya memiliki kawasan Pesisir. Jenis penggunaan lahan yang bervariasi menjadikan Kecamatan Bacukiki Barat memiliki wilayah yang berkarakteristik dengan jenis tanah yang Berpariasi menjadikan Kecamatan Bacukiki Barat sebagai kelurahan yang memiliki potensi. Selain penggunaan lahan kawasan, Kecamatan Bacukiki Barat memiliki penggunaan lahan lain, yang didalamnya terdapat unsur-unsur penggunaan lahan sangat bervariatif, seperti sawah, permukiman, tambak, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut

Tabel 4.7
Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan
Di Kota ParePare

No	Penggunaan Lahan	2013	
		Ha	%
1	Hutan	10.897,579	10,059
2	Permukiman	251,433	0,232
3	Kebun	841,390	0,777
4	Sawah	393,767	0,363
5	Semak	242,032	0,223
6	Tegalan	464,153	0,428
Jumlah		13.090,354	

Sumber : Badan Pusat Statistik 2013

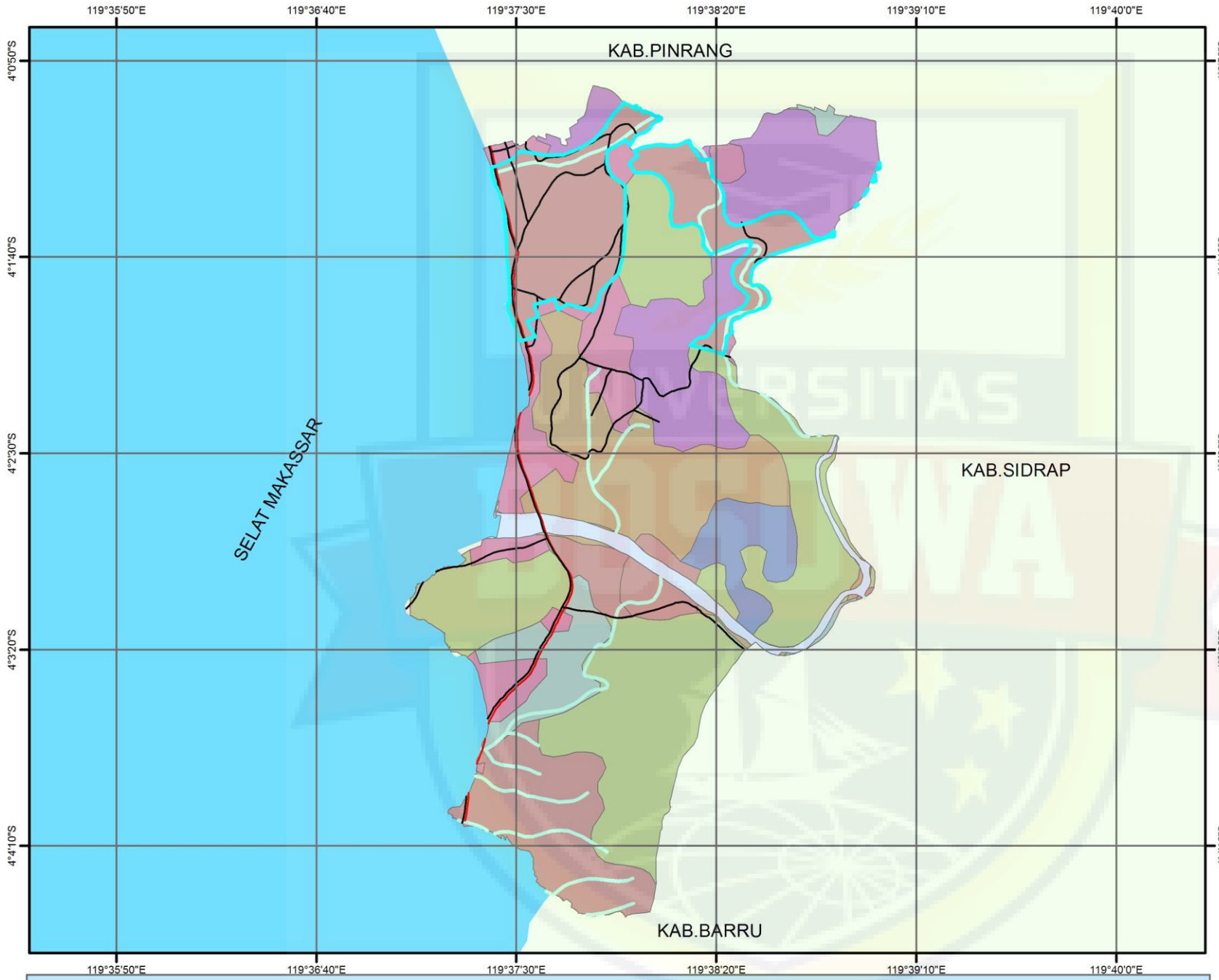

PETA TATAGUNALAHAN 2013 KECAMATAN BACUKIKI BARAT

STUDI PEMANFAATAN LAHAN
KAWASAN PESISIR
SUMPANG MINANGAE
KOTA PARE-PARE

N
W E
S

1:40,000

0 195390 780 1,170 1,560
Meters

DIAGRAM LOKASI

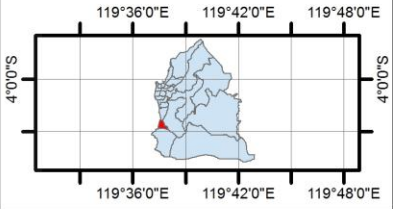

KETERANGAN

PenggunaanLahan_Clip2

LUSE

- hutan
- kampung/permukiman
- kebun
- sawah
- semaka
- tegalan/ladang

SUMBER PETA

1: PETA CITRA
2: RTRW KOTA PARE-PARE
3: SURVEY LAPANGAN

b. Penggunaan Lahan 2017

Dalam pertumbuhan dan perkembangan wilayah akan berdampak pada penggunaan lahan yang akan semakin sedikit antara lahan terbangun dan tidak terbangun. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan kawasan terbangun serta terjadinya perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Bacukiki Barat Kota ParePare. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil survey lapangan dapat dilihat bahwa terjadi perubahan lahan di Kecamatan Bacukiki Barat pada tahun 2017 yaitu bertambahnya kawasan industri Tambak di Kecamatan Bacukiki Barat dengan luas lahan kawasan Tambak yaitu 92,98Ha.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8
Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan
Di Kota ParePare

No	Penggunaan Lahan	2017	
		Ha	%
1	**Hutan**	10.897,579	10,059
2	**Permukiman**	382,609	0,353
3	**Kebun**	14.886,399	13,741
4	**Sawah**	373,434	0,345
5	**Semak**	526,782	0,486
6	**Tegalan**	156,935	0,145
7	**Tambak**	45,341	0,042
Jumlah		83.897.066	

Sumber : Badan Pusat Statistik 2017

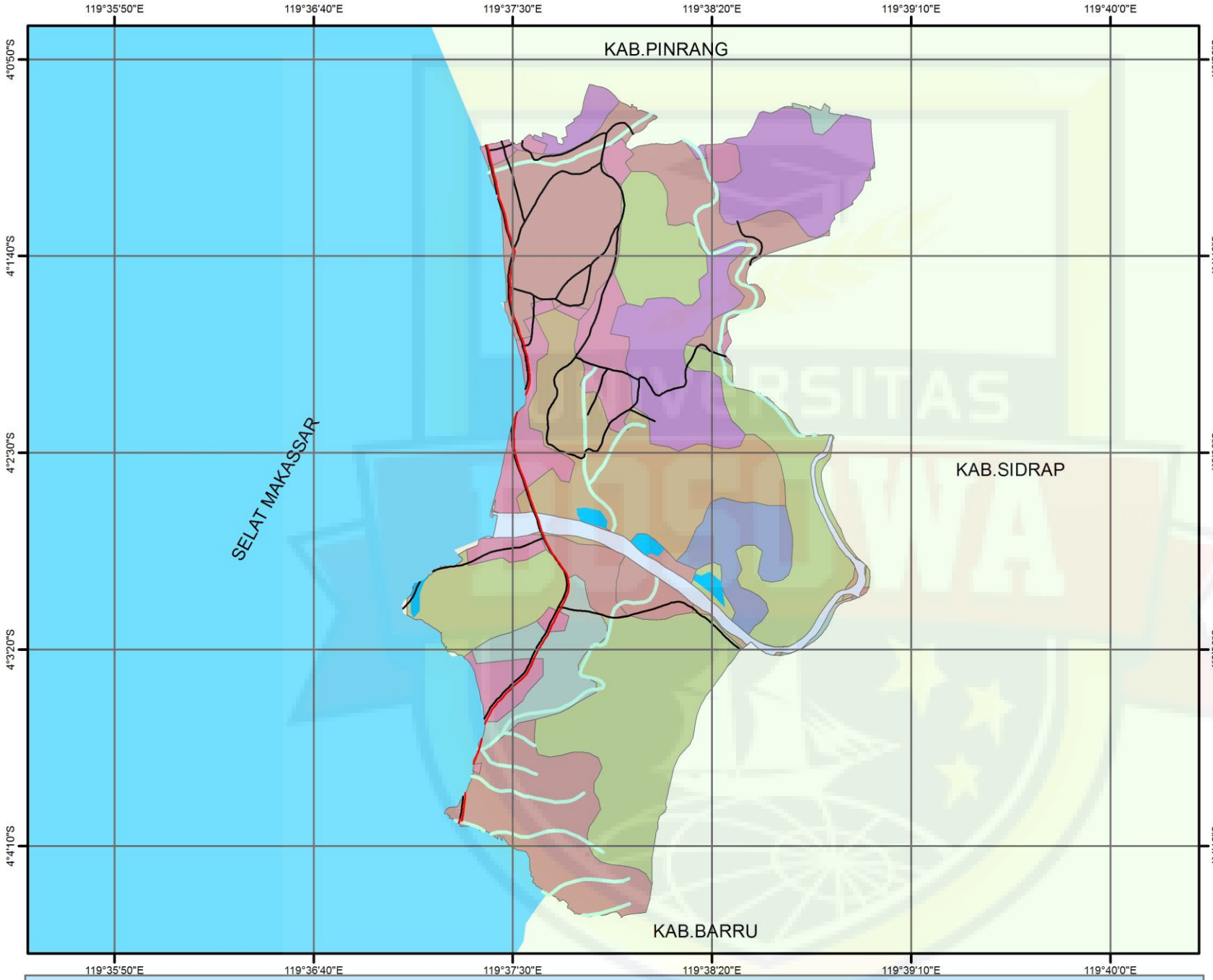

PETA TATAGUNALAHAN 2017 KECAMATAN BACUKIKI BARAT

STUDI PEMANFAATAN LAHAN
KAWASAN PESISIR
SUMPANG MINANGAE
KOTA PARE-PARE

N
W E
S

1:40,000

0 195390 780 1,170 1,560
Meters

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

- JALAN UTAMA
- JALAN LOKAL
- SUNGAI
- ANAK SUNGAI
- Tambak

PenggunaanLahan 2017

LUSE

- hutan
- kampung/permukiman
- kebun
- sawah
- semaka
- tegalan/ladang

SUMBER PETA
1: PETA CITRA
2: RTRW KOTA PARE-PARE
3: SURVEY LAPANGAN

3. Kependudukan

Seiring dengan mekarnya Kecamatan Bacukiki Barat, dinamika kependudukan juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka pertambahan jumlah penduduk yang cenderung disebabkan oleh angka migrasi akibat dari terbukanya berbagai lapangan kerja pada beberapa sektor. Pesatnya pertumbuhan penduduk ini merupakan salah satui konsekuensi dan karakteristik sumberdaya alam agraris. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel berikut ini;

Tabel 4.9
Jumlah Penduduk,sex Ratio Dan Kepadatan Penduduk
Kecamatan Bacukiki Barat Kota ParePare

Kelurahan	Penduduk		Sex Ratio	Luas (Km2)	Kepadatan Penduduk
	Laki-laki	Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lumpue	3.369	4.050	83	4,99	1.487
Bumi Harapan	3.610	3.571	88	0,31	16.410
Cappa Galung	3.492	3.566	98	0,70	10.083
Tiro Sompe	3.154	3.178	99	0,30	21.107
Kampung Baru	2.330	2.383	98	0,46	10.246
Jumlah	18.329	19.461	941183	13,00	29.069

Sumber : Badan Pusat Statistik 2017

C. Gambaran Khusus Kawasan Pesisir Sumpang Minangae

1. Aspek Fisik Dasar

Aspek fisik dasar wilayah Kelurahan Sumpang Minangae, dalam hal ini meliputi kondisi geografis, Topografi, Geologi, Jenis Tanah:

a. Letak Geografis

Kelurahan Sumpang Minangae terletak diantara Kelurahan Lumpue dengan Posisi S: 04 02. 749, E; 1190 37 ‘ 601”dengan Kelurahan Sumpang Minangae pada posisi S: 04 02. 268” E: 1190 37’ 435”dan merupakan salah satu kelurahan pesisir di kota Parepare. Sepanjang wilayah barat kelurahan ini berbatasan langsung dengan teluk Parepare. Jika dilihat dari posisi wilayah kota Pare-pare secara keseluruhan, wilayah kelurahan ini berposisi melintang. Berbeda misalnya dengan beberapa kelurahan yang lain berbentuk memanjang-membujur (Utara-Selatan), terhadap keseluruhan kota Parepare. Kelurahan Sumpang Minangae memiliki luas wilayah sebesar 0,31 km2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut Sebelah Utara : Kelurahan Sumpang Minangae, sebelah Timur : Kelurahan Bumi Harapan, sebelah Selatan : Kelurahan Lumpue dan sebelah Barat : Laut.

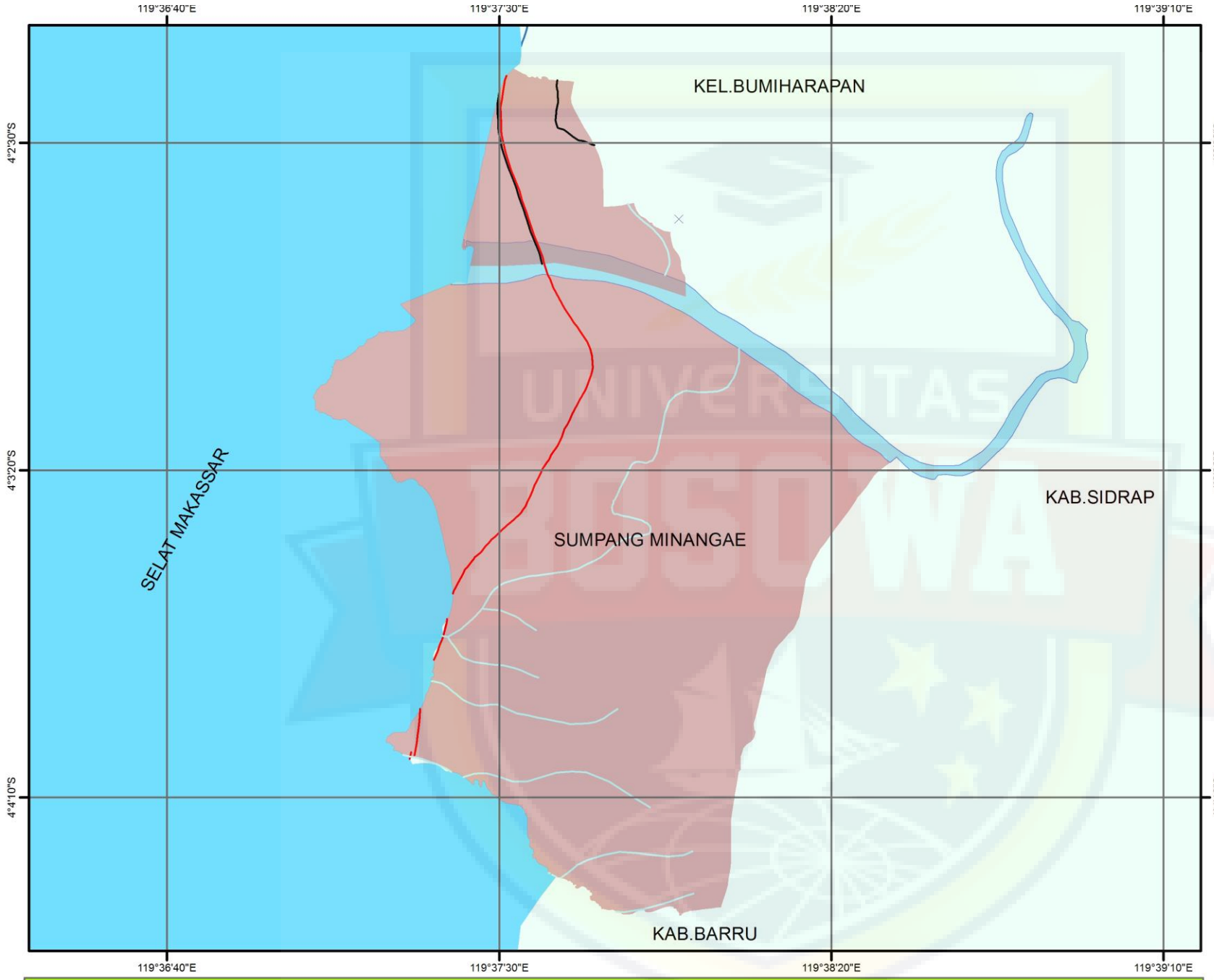

PETA ADMINISTRASI KELURAHAN SUMPANG MINANGAE

STUDI PEMANFAATAN LAHAN
KAWASAN PESISIR
SUMPANG MINANGAE
KOTA PARE-PARE

N
W E
S

1:24,000

0 120240 480 720 960
Meters

DIAGRAM LOKASI

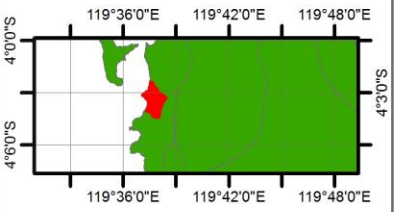

KETERANGAN

- KAWASAN PENELITIAN
- JALAN UTAMA
- JALAN LOKAL
- SUNGAI
- ANAK SUNGAI
- LAUT

SUMBER PETA
1: PETA CITRA
2: RTRW KOTA PARE-PARE
3: SURVEY LAPANGAN

b. Kemiringan Lereng

Tingkat kemiringan lereng merupakan kondisi fisik topografi suatu wilayah yang sangat mempengaruhi terhadap kesesuaian lahan dan penataan lingkungan alami. Untuk kawasan terbangun, kondisi topografi berpengaruh terhadap terjadinya longsor dan ketahanan konstruksi bangunan. Kemiringan lereng adalah faktor utama yang menentukan fungsi kawasan, untuk diarahkan sebagai kawasan lindung atau kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kawasan fungsional sepertipersawahan, ladang dan kawasan terbangun membutuhkan lahan dengan kemiringan dibawah15%, sedangkan lahan dengan kemiringan diatas 40% akan sangat sesuai untuk perkebunan, pertanian tanaman keras dan hutan.Karakteristik tiap kemiringan lereng diuraikan sebagai berikut : Kelerengan 0% - 5% dapat digunakan secara intensif dengan pengelolaan kecil.

- Kelerengan 5% - 10% dapat digunakan untuk kegiatan perkotaan dan pertanian, namun bila terjadi kesalahan dalam pengelolaannya masih mungkinterjadi erosi.
- Kelerengan 10% - 30% yakni daerah yang sangat mungkin mengalami erosi, terutama bila tumbuhan pada permukaannya

ditebang, daerah ini masihdapat dibudidayakan namun dengan usaha lebih.

- Kelerengan > 30% yakni daerah yang sangat peka terhadap bahaya erosi, dan kegiatan di atasnya harus bersifat non budidaya. Apabila terjadi penebangan hutan akan membawa akibat terhadap lingkungan yang lebih luas.

Faktor kemiringan lereng sangat berkaitan dengan kemampuan lahan untuk mengakomodasikan berbagai aktifitas masyarakat dalam suatu ruang. Aktifitas masyarakat akan relatif mudah dilakukan pada lahan yang landai dengan kemiringan 0-2%. Kemiringan lahan untuk kegiatan perkotaan sebaiknya tidak melebihi dari 15% agar memudahkan pembangunan sarana dan prasarana kota. Lahan dengan kemiringan lereng lebih dari 15% . Morfologi wilayah Kecamatan Bacukiki Barat secara umum dapat dibagi menjadi tiga satuan yaitu: dataran rendah, perbukitan dan pegunungan. (1) Morfologi dataran rendah terdapat pada bagian yang sempit sekitar muara Sungai Karajae, sepanjang pesisir dan melebar di sekitar Sumpang Minangae.

Tingginya berkisar antara 0 sampai 50 meterdi atas muka laut, dengan lereng landai hingga datar. (2) Morfologi perbukitan secara luas menempati bagian barat wilayah kota, memanjang dengan arah kurang lebih Utara Selatan,

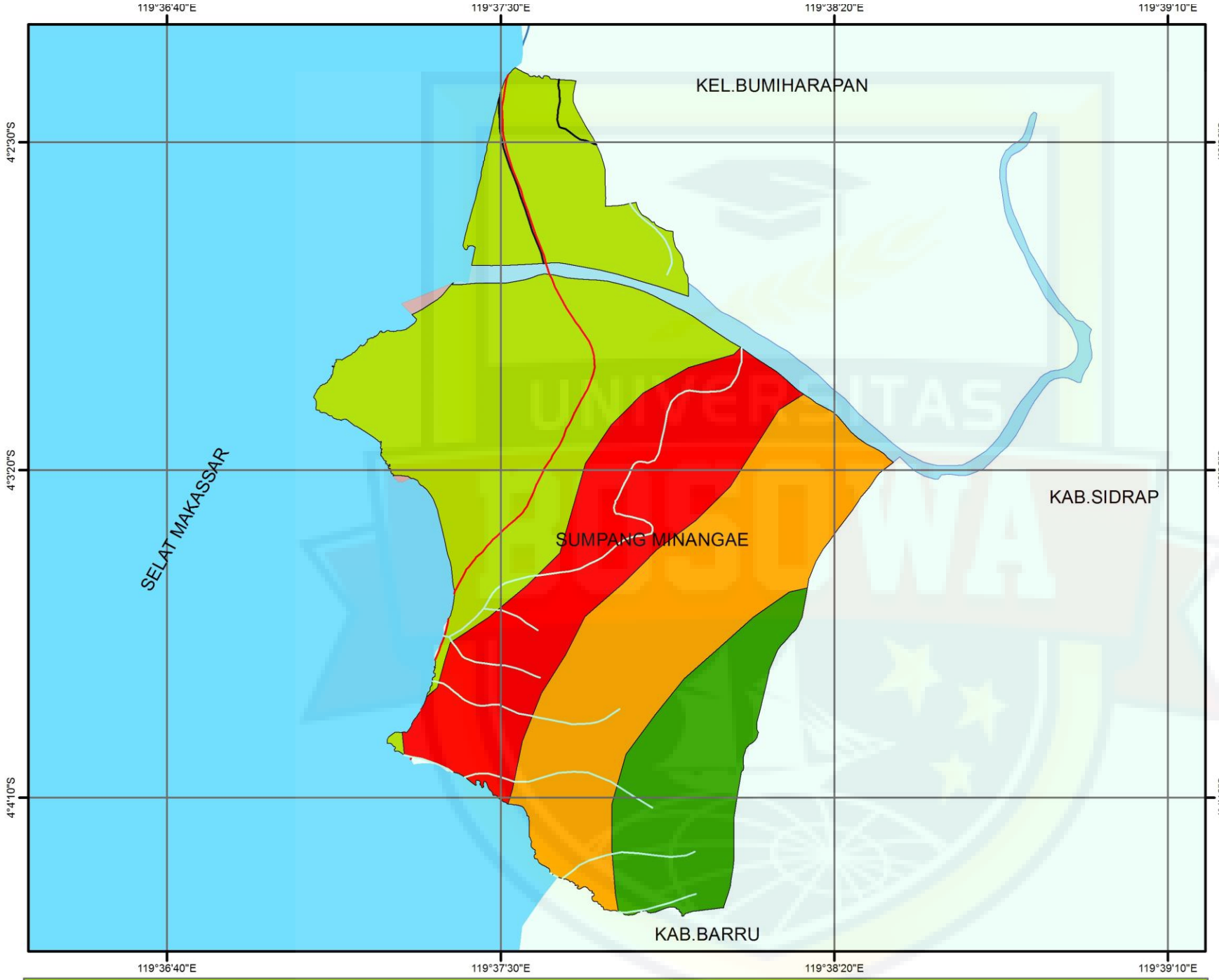

STUDI PEMANFAATAN LAHAN
KAWASAN PESISIR
SUMPANG MINANGAE
KOTA PARE-PARE

N
W E
S

1:24,000

0 120240 480 720 960
Meters

DIAGRAM LOKASI

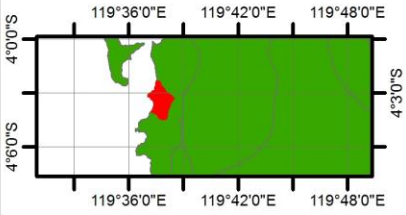

KETERANGAN

Kawasan Penelitian

LERENG

- 0-8
- 15-25
- 25-40
- 8-15

SUMBER PETA
1: PETA CITRA
2: RTRW KOTA PARE-PARE
3: SURVEY LAPANGAN

PETA KEMIRINGAN LERENG KELURAHAN SUMPANG MINANGAE

c. Kondisi Jenis Tanah

Kondisi Jenis Tanah di wilayah pesisir Sumpang Minangae adalah Tatanan statigrafi pada umumnya terdiri dari endapan Aluvium, Miosen tengah-akhir serta Eosen akhir-Miosen tengah dengan sedikit terobosan Andesit. Endapan Aluvium terdiri dari lempung, pasir, lumpur, kerikil dan bongkah batuan yang tidak padu (lepas). Endapan ini berasal dari hasil desintegrasi batuan yang lebih tua. Struktur tanah yang terbentuk meliputi jenis tanah entisol, inceptisol, molisol, dan ultisol. Morfologi dataran rendah dan pantai terdapat di sebelah barat, memanjang dari utara ke selatan dan pada umumnya diisi oleh endapan sedimen Sungai dan pantai berpotensi pengembangan pertanian dan perikanan (tambak). (2) Satuan Batugapamping yang dijumpai di daerah Tanah Mailiye dalam komposisi kalkarenit. Kemudian menumpang tidak selaras di atas satuan tufa yaitu satuan breksi vulkanik. Satuan batuan ini terdiri dari fragmen dan matrik yang bersifat andesitan. Batuan ini tersingkap dengan baik di bagian Selatandan Barat Kota Parepare. (3) Satuan Batuan Bekuyang dijumpai di pantai Lumpue, batuan beku ini bersifat masam. (4) Satuan keempat termuda, yaitu satuan alluvial yang menempati sebagian pantai Kota Parepare. Bahannya berupa bongkahan, kerakal, kerikil, pasir dan lempungserta endapan pantai yang sampai sekarang pembentuknya

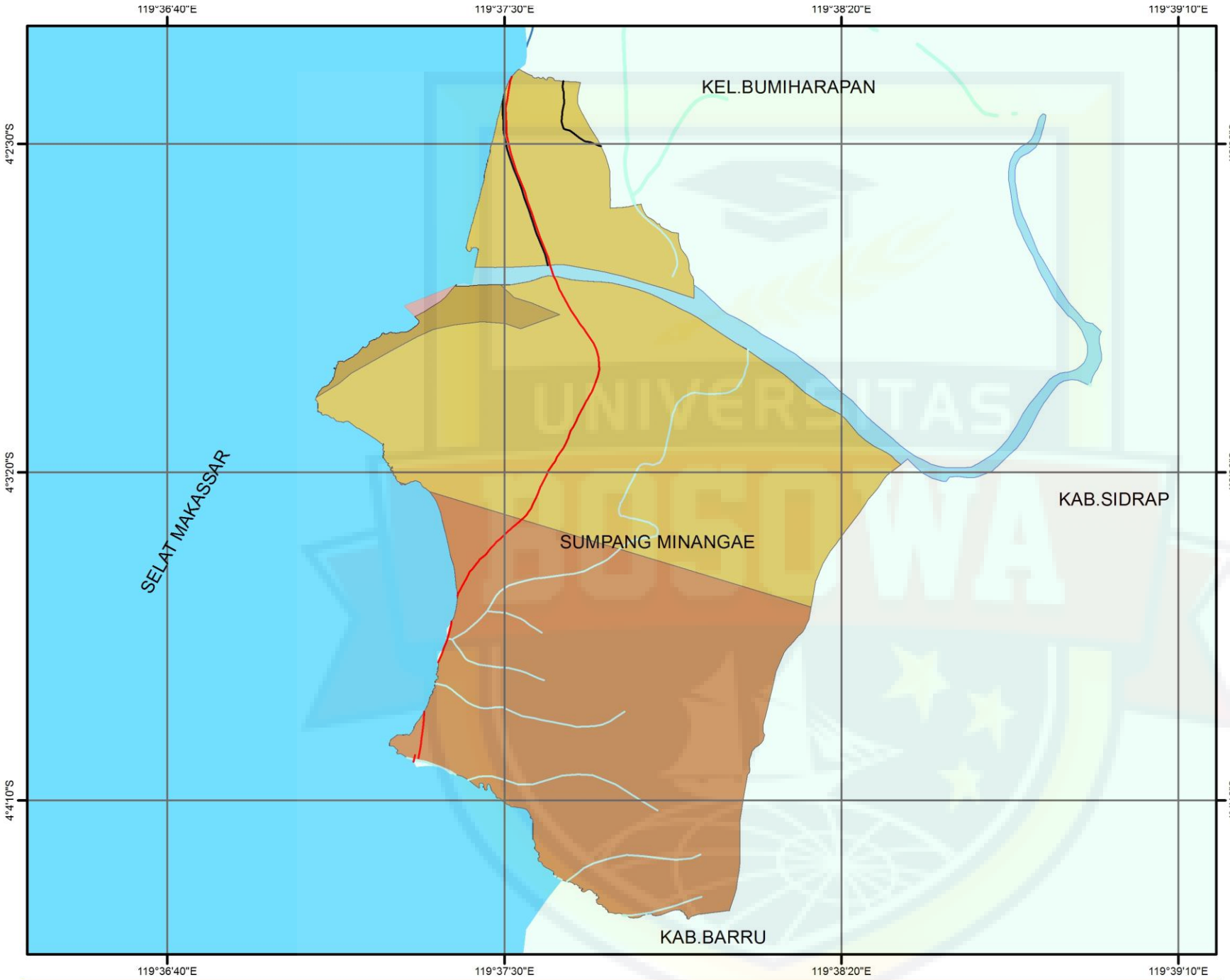

PETA JENIS TANAH KELURAHAN SUMPANG MINANGAE

STUDI PEMANFAATAN LAHAN
KAWASAN PESISIR
SUMPANG MINANGAE
KOTA PARE-PARE

N
W E
S

1:24,000

0 112.5 225 450 675 900
Meters

DIAGRAM LOKASI

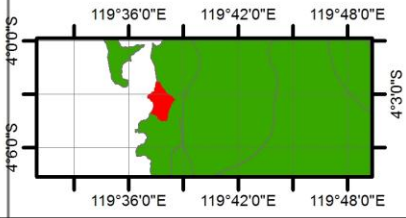

KETERANGAN

JenisTanah

MACAM_TANAH

- Aluvial_Kelabu_Tua
- Komplex_Mediteran_Coklat_Kekelabuan

SUMBER PETA

1: PETA CITRA
2: RTRW KOTA PARE-PARE
3: SURVEY LAPANGAN

e. Kondisi Geomorfologis

Formasi geologi yang terdapat di Kelurahan Sumpang Minangae sebagai pembentuk struktur batuan di Kelurahan tersebut antara lain endapan alluvial, batu gamping koral dan batuan vulkanik seperti tuff, breksi, konglomerat dan lava. Sedangkan struktur tanah dan batuan meliputi struktur batuan (geologi) yang terdiri dari struktur batuan gunung api kering (Qv) dan batuan gunung api bersipat menengah dan basah (Tnv) dan struktur batuan Tnv yang terletak di daerah sebelah selatan Bentuk dataran rendah di Kelurahan terdapat dua (2) jenis, yakni alluvial dan martin, Untuk jenis alluvial terbentuk dari deposit alluvium berbahan halus yang berasal bagian hulu sungai dan daerah sekitarnya, sungai utama dan anak sungainya beserta aliran permukaan mendeposisikan bahan-bahan suspensi, debu, pasir, kerikil dan kerakal sehingga terbentuk dataran alluvial luas yang berumur subresen yang dijumpai dalam bentuk lahan tanggul sungai, alur-alur drainase.

Proses-proses erosi, deposisi dan sedimentasi serta pergerakan air dapat membentuk lahan baru dengan bentuk wilayah datar, sedangkan kelompok martin adalah bentuk daratan pantai yang terbentuk karena adanya proses agradasi yakni proses pengendapan material yang diangkut dari sungai, sehingga

terjadinya penambahan daratan. Di samping itu adanya proses lain seperti pengangkatan daratan atau penurunan air laut, namun kedua proses ini terjadi secara terpisah sehingga dapat membentuk teras martin, sedangkan bentuk martin yang terdapat di Keluran Sumpang Minangae berupa daratan pasang surut, endapan delta dan betting pasir. Luas wilayah yang termasuk kelurahan dataran rendah sebesar 40 ha/m2, Kelurahan berbukit-bukit 35 ha/m2. Sedangkan luas wilayah daerah pesisir sebesar 500 ha/m2., dengan panjang garis pantai 1,26 km.

f. Kondisi Ocenografi dan Kualitas Air

Dalam upaya pengembangan wilayah pesisir informasi tentang kondisi dinamika perairan yang meliputi arus, gelombang, dan pasang surut sangat diperlukan. Informasi tentang hidrodinamika tersebut diperlukan untuk pemeliharaan, perencanaan. Sebagaimana Dijkstra, (2008) mengemukakan bahwa Arus, gelombang, dan pasang surut merupakan parameter penting dinamika perairan yang memberikan pengaruh terhadap perubahan wilayah pesisir dan laut.

Secara sederhana arus dapat diartikan sebagai sirkulasi massa air dari satu tempat ke tempat lain (Trujillo and Thurman, 2008). Sementara Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang dapat menimbulkan energi untuk membentuk pantai,

menimbulkan arus dan transport sedimen dalam arah tegak lurus dan sepanjang pan tai serta menyebabkan gaya-gaya yang bekerja pada bangunan pantai (Cruz, 2008). Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoide. Selain radiasi elektromagnetik, dan mungkin radiasi gravitasional, yang bisa berjalan lewat vakum, gelombang juga terdapat pada medium (yang karena perubahan bentuk dapat menghasilkan gaya memulihkan yang lentur) di mana mereka dapat berjalan dan dapat memindahkan energi dari satu tempat kepada lain tanpa mengakibatkan partikel medium berpindah secara permanen; yaitu tidak ada perpindahan secara masal. Malahan, setiap titik khusus berosilasi di sekitar satu posisi tertentu.

Suatu Medium disebut :

1. linear jika gelombang yang berbeda di semua titik tertentu di medium bisa dijumlahkan,
2. Terbatas Jika Terbatas, Selain itu disebut tak terbatas
3. Seragam jika cirri fisiknya tidak berubah pada titik yang berbeda
4. Isotropic jika fisiknya “sama” pada arah berbeda

Sedangkan pasang surut merupakan gerak fluktuasi massa air secara periodic dan harmonik, yang disebabkan oleh adanya gaya tarik benda-benda langit terutama matahari dan bulan terhadap bumi (Park dalam The Open Univer- sity, 2006). Arus,

gelombang dan pasut berperan aktif dalam mempengaruhi proses – proses biologi, fisika dan kimia dalam ruang dan waktu yang terjadi di pantai dan laut (Trujillo and Thurman, 2008).

a) Pasang Surut

Yang dimaksud dengan pasang surut laut adalah fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik menarik dari benda-benda astronomi terutama oleh matahari, bumi dan bulan. Pasang surut dan arus yang dibangkitkan pasang surut sangat dominan dalam proses sirkulasi massa air di perairan pesisir (Duxbury et al., 2002). Pasang surut merupakan gerak fluktuasi massa air secara periodic dan harmonik, yang disebabkan oleh adanya gaya tarik benda-benda langit terutama matahari dan bulan terhadap bumi (Park dalam The Open University, 2006).

Pengetahuan mengenai pasang surut dan pola sirkulasi arus pasang surut di perairan pesisir dapat memberikan indikasi tentang pergerakan massa air serta kaitannya sebagai faktor yang dapat mempengaruhi distribusi suatu material di dalam kolom air (Mann dan Lazier, 2006). Tersedianya informasi pasang surut dan arus pasang surut di perairan Pesisir Kota Makassar dengan menggunakan pemodelan numerik hidrodinamika. Model hidrodinamika dipilih karena dapat memberikan data pasang surut

dan arus pasang surut secara komprehensif dan simultan dengan tingkat akurasi yang tinggi (Ramming dan Kowalik, 1980).

b) Tipe Pasang

Tipe pasang dapat dibedakan menjadi beberapa tipe antara lain :

- Pasang surut harian ganda (semi diurnal tide). Tipe pasang ini dalam satu hari terjadi dua kali pasang dan dua kali air surut dengan tinggi yang hampir sama dan pasang surut terjadi secara berurutan secara teratur. Periode pasang surut rata-rata adalah 12 jam 24 menit. Jenis harian tunggal misalnya terdapat di perairan sekitar selat Karimata, antara Sumatra dan Kalimantan.,
- Pasang surut harian tunggal (diurnal tide). Dalam satu hari terjadi satu kali air pasang dan satu kali air surut. Periode pasang surut adalah 24 jam 50 menit. Pada jenis harian ganda misalnya terdapat di perairan Selat Malaka sampai ke Laut Andaman.
- Pasang surut campuran condong ke harian ganda (mixed tide prevailing semidiurnal). Tipe pasang ini dalam satu hari terjadi dua kali air pasang dan dua kali air surut, tetapi tinggi dan periodenya berbeda. Pada pasang-surut campuran condong ke harian ganda (mixed tide, prevailing semidiurnal)

misalnya terjadi di sebagian besar perairan Indonesia bagian timur.

- Pasang surut campuran condong ke harian tunggal (mixed tide prevailing diurnal). Pada tipe ini dalam satu hari terjadi satu kali air pasang dan satu kali air surut, tetapi kadang-kadang untuk sementara waktu terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dengan tinggi dan periode yang sangat berbeda. Sedangkan jenis campuran condong ke harian tunggal (mixed tide, prevailing diurnal) contohnya terdapat di pantai selatan Kalimantan dan pantai utara Jawa Barat

Tipe pasang surut

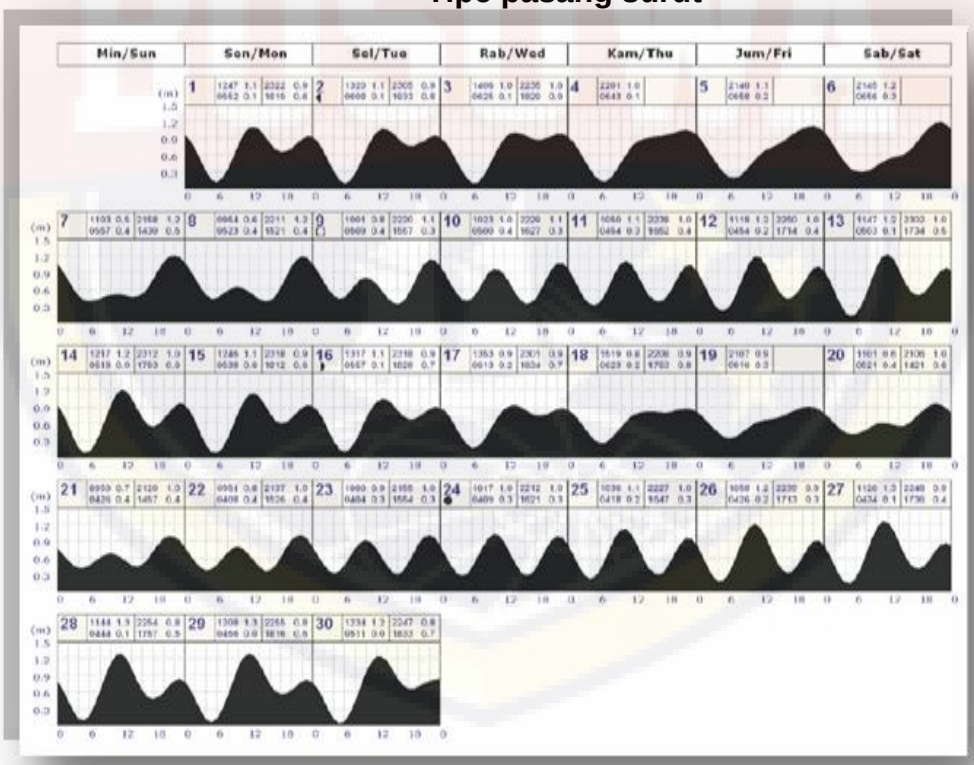

c. Kedalaman

Batimetri (dari bahasa Yunani. Barus, berarti kedalam dan ukuran) adalah ilmu yang mempelajari kedalaman di bawah air dan studi tentang tiga dimensi lantai samudra atau danau. Sebuah peta gatimetri umumnya menampilkan relief pantai atau daratan dengan garis-garis kontor (Contor lines) yang disebut kontor kedalaman (depth contous atau subath) (Aridianto, 2010). Kedalaman merupakan parameter yang penting dalam memecahkan masalah teknik berbagai pesisir seperti erosi. Pertambahan stabilitas garis pantai, pelabuhan dan kontraksi, pelabuhan, evaluasi, penyimpanan pasang surut, pergerakan, pemeliharaan, rute navigasi (Roonawale et al, 2010).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kedalaman di Kecamatan Bacukiki Barat termasuk di dalamnya Kelurahan Lumpue adalah Batimetri. Batimetri adalah ukuran tinggi rendahnya dasar laut. Perubahan kondisi hidrografi di sekitar wilayah perairan laut dan pantai Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat disebabkan oleh fenomena perubahan penggunaan lahan di wilayah tersebut dan proses-proses yang terjadi di wilayah hulu sungai. Terbawanya berbagai material partikel dan kandungan oleh aliran sungai semakin mempercepat proses pendangkalan di perairan pantai.

Kedalaman perairan sangat berpengaruh terhadap kualitas air pada lokasi tersebut. Lokasi yang dangkal akan lebih mudah terjadinya pengadukan dasar akibat dari pengaruh gelombang yang pada akhirnya kedalaman perairan lebih dari 3 m dari pengaruh gelombang yang pada akhirnya kedalaman perairan lebih dari dasar jaring. Kondisi tinggi rendahnya dasar laut perairan di Kecamatan Bacukiki Barat termasuk di dalamnya Kelurahan Lumpue berkisar antara <-2 m dan >-45 m. untuk lebih jelasnya Peta Batimetri di sajikan pada Gambar 3.4.

d. Arus

Arus merupakan salah satu faktor oseanografi yang sangat menarik untuk dikaji terutama dalam menghasilkan informasi hidrografi yang penting diketahui dalam penetapan batas wilayah atau daerah di laut, studi dinamika pesisir dan pengelolaan sumberdaya laut. Pola arus permukaan sangat dipengaruhi oleh pola angin musiman yang terjadi (Stewart, 2002). Selain itu apabila dilihat dari pola pasut yang terjadi, pola arah dan kecepatan arus juga mempunyai kecenderungan berfluktuasi yang hampir sama dengan pola pasang surut. Apabila pola arus di suatu perairan menunjukkan pola yang fluktuatif mengikuti pola pasut, maka dapat dikatakan bahwa arus pasang surut merupakan arus yang dominan di perairan tersebut (Thurman,2007)

- **Pola Dan Kecepatan Arus Perairan ParePare Bulan April**

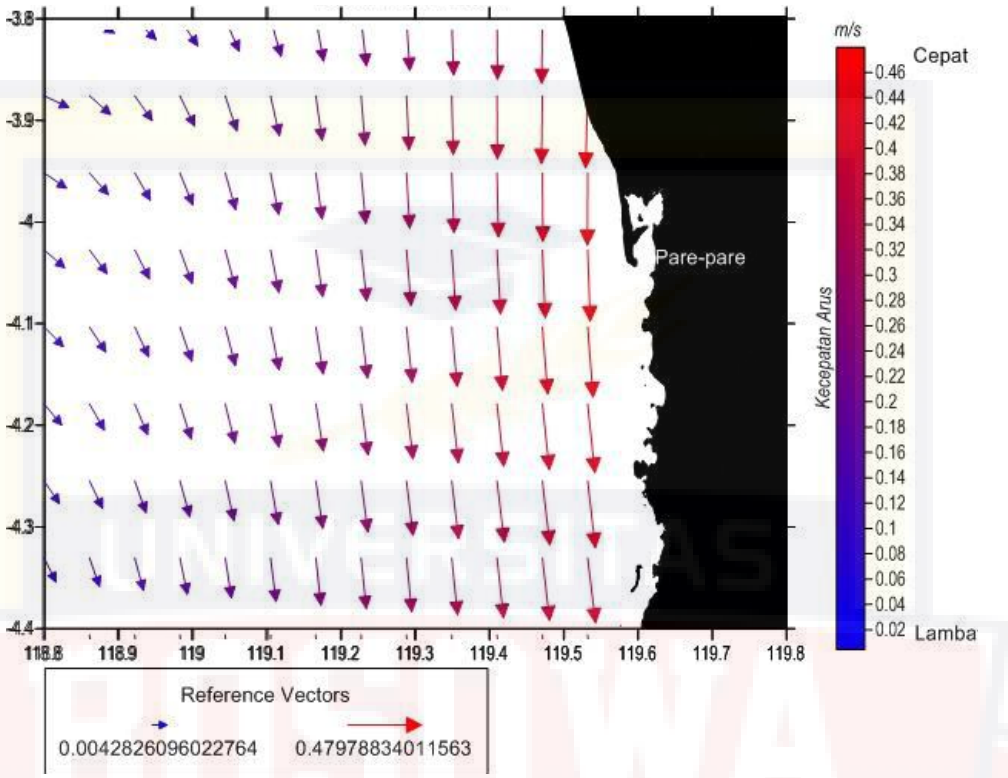

- **Pola Dan Kecepatan Arus Perairan ParePare Bulan Mei 2014**

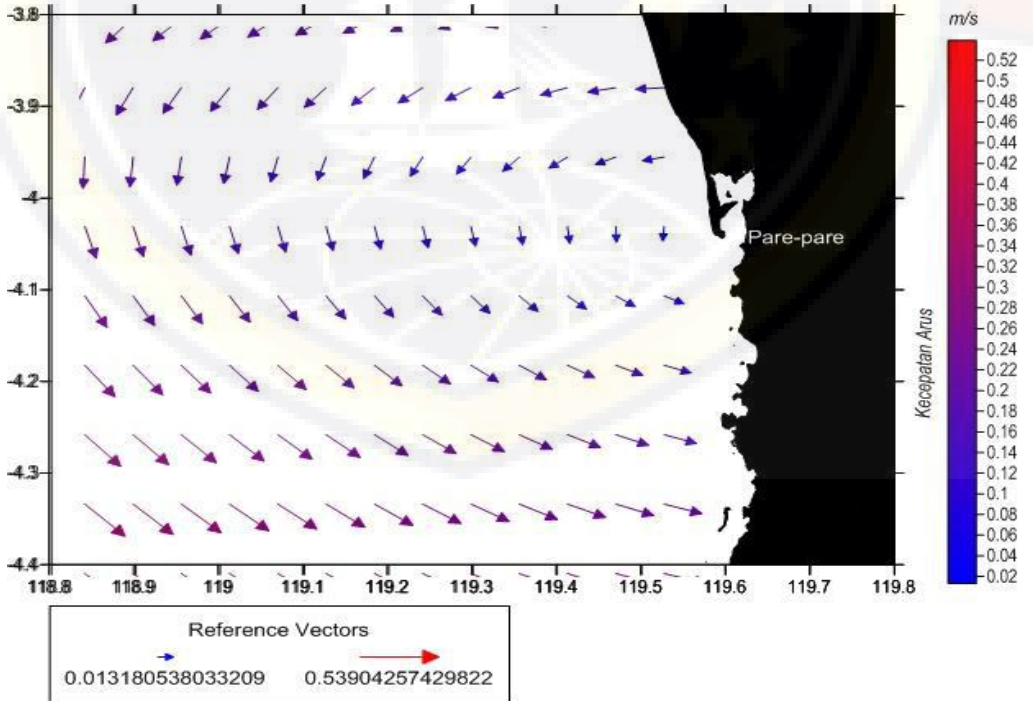

- **Pola Dan Kecepatan Arus Perairan ParePare Bulan Juni**

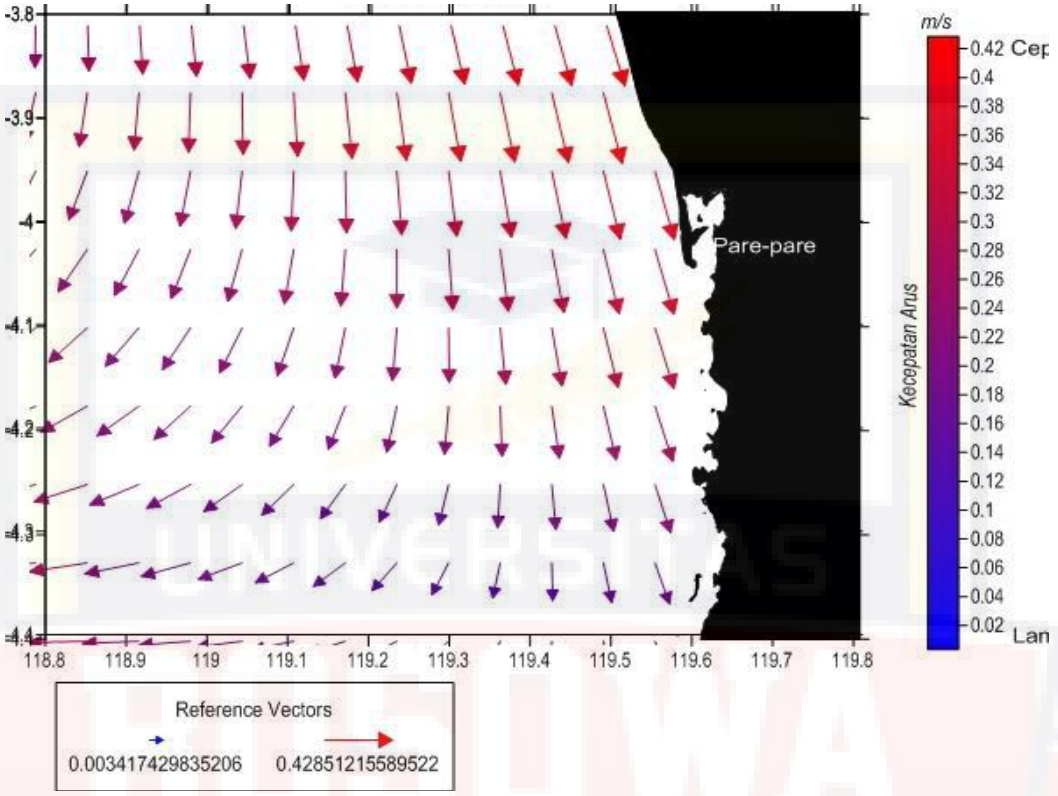

- **Pola Dan Kecepatan Arus Perairan ParePare Bulan Juli 2014**

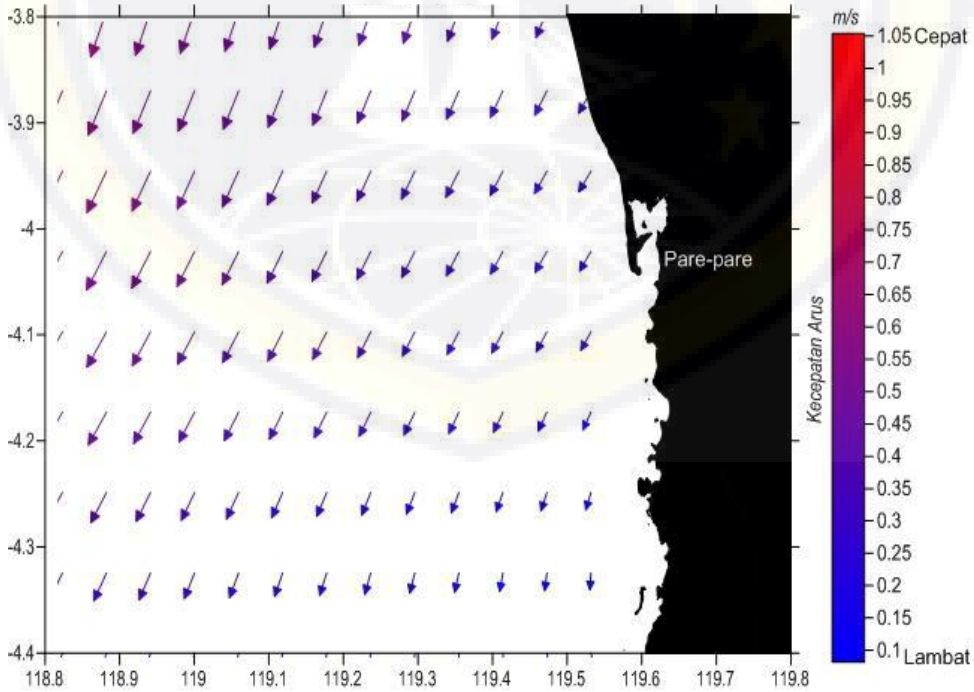

- **Pola Dan Kecepatan Arus Perairan ParePare Bulan Agustus 2014**

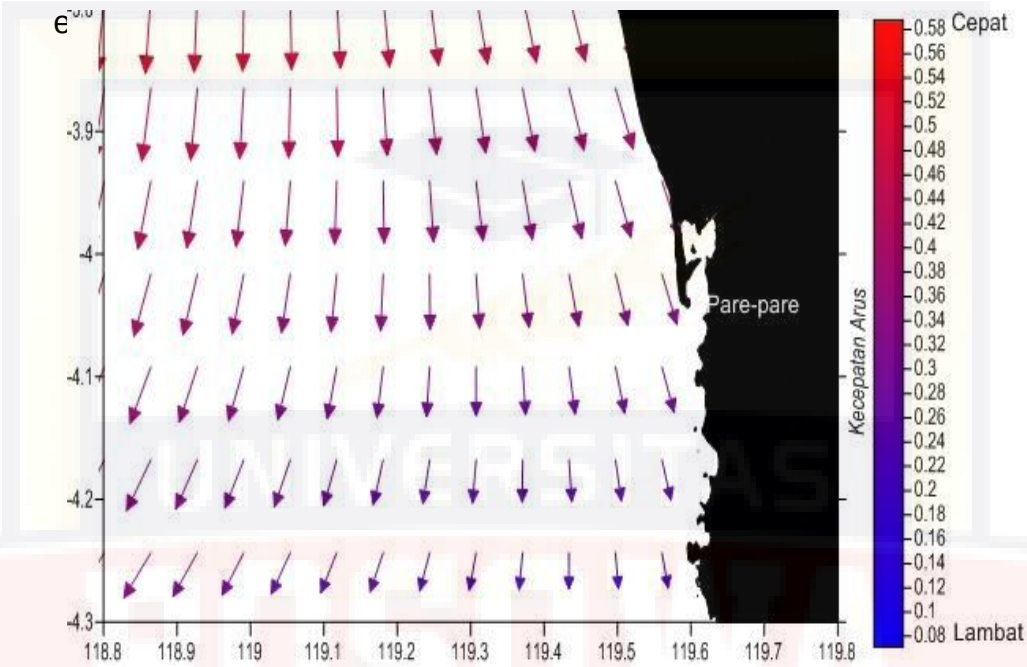

f. Suhu

Suhu air dipengaruhi oleh musim, letak lintang (latitude), ketinggian tempat dari permukaan laut (altitude), waktu dalam hari, sirkulasi udara, penutupan awan, dan aliran serta kedalaman air. Perubahan suhu berpengaruh pada proses fisika, kimia dan biologi.

Suhu air mempunyai pengaruh terhadap metabolisme hewan air, dimana semakin tinggi suhu pada batas-batas optimum maka metabolisme hewan air semakin meningkat. Suhu air juga mempengaruhi aktivitas mikroorganisme dalam

penguraian bahan-bahan organik, dimana semakin tinggi suhu maka aktivitas mikroorganisme semakin meningkat yang menyebabkan pengambilan atau pemanfaatan oksigen terlarut dalam air semakin meningkat. Suhu air laut di wilayah pesisir Kota Pare-pare berkisar 25-28OC, Nybakken (1992) mengemukakan bahwa perkembangan paling optimal terjadi di perairan yang rata-rata suhu tahunan antara 23-25OC dengan suhu toleransi kira-kira antara 36-40OC.

2. Ekosistem Pesisir Sumpang Minangae

Ekosistem pesisir terdiri dari ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove. Di Kelurahan Lumpue masih terdapat ketiga ekosistem ini, namun kondisinya relatif rusak.

a. Ekosistem Terumbu Karang Kawasan Pesisir

Ekosistem terumbu karang di Kelurahan Sumpang Minangae terletak di perairan Tonrangang dengan posisi geografi S: 04o03’06.94” dan E: 119o36’45.15” dan di perairan Lumpue dengan posisi geografi S: 04o03’22.48” dan E: 119o36’42.68”. Untuk terumbu karang di perairan Tonrangang relatif lebih baik dibandingkan dengan di perairan Lumpue, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar

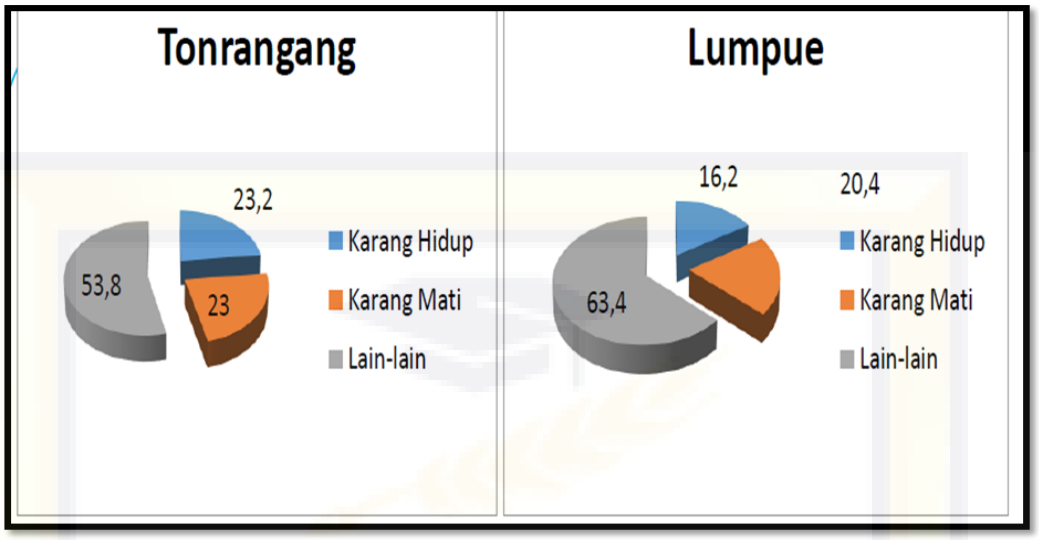

Keadaan ekosistem terumbu karang di Kelurahan Sumpang Minangae diperlihatkan pada gambar-gambar berikut ini.

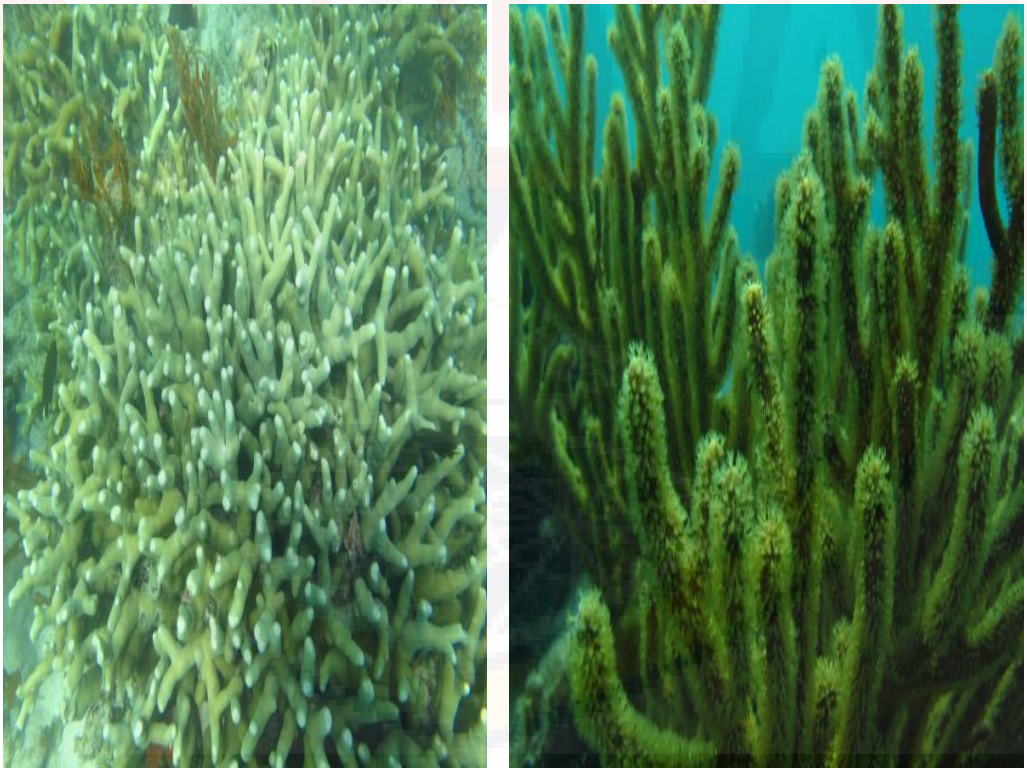

Gambar : Keadaan Terumbu Karang Pesisir Sumpang Minangae

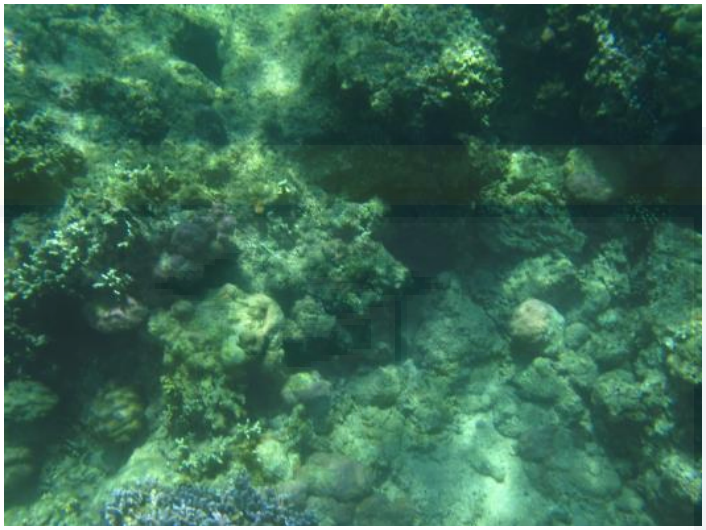

Gambar : Keadaan Terumbu Karang Kelurahan Lumpue

b. Ekosistem Mangrove Kawasan Pesisir Sumpang Minangae

Ekosistem mangrove/bakau di Kelurahan Sumpang Minangae terletak pada posisi geografi S: 04o03’034” dan E: 119o37’071”. Mangrove di Kelurahan Sumpang Minangae posisinya membentuk Pulau sebagaimana diperlihatkan pada

c. Penggunaan Lahan

1. Penggunaan Lahan Tahun 2013

Kelurahan SumpangMinangae yang merupakan salah satu dari kelurahan yang terdapat di Kecamatan Bacukiki Barat Kota ParePare merupakan kelurahan yang memiliki kawasan Pesisir. Jenis penggunaan lahan yang bervariasi menjadikan Kelurahan SumpangMinangae memiliki wilayah yang berkarakteristik dengan jenis tanah yang Berpariasi menjadikan Kelurahan Sumpang Minangae sebagai kelurahan yang memiliki potensi.

Selain penggunaan lahan Permukiman, Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat memiliki penggunaan lahan lain, yang didalamnya terdapat unsur-unsur penggunaan lahan sangat bervariatif, seperti sawah, permukiman, tambak, Kebun Dan Hutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10
Luas Penggunaan Lahan dan Persentase Terhadap Luas Kelurahan Sumpang Minangae Tahun 2013

No	Penggunaan Lahan	2013	
		Ha	%
1	Permukiman	105,291	1,870143
2	Kebun	3646,758	64,7726
3	Hutan	369,498	6,56291
4	Sawah	285,804	5,076371
Jumlah			

Sumber: Sumber: Kantor Kelurahan Sumpang Minangae

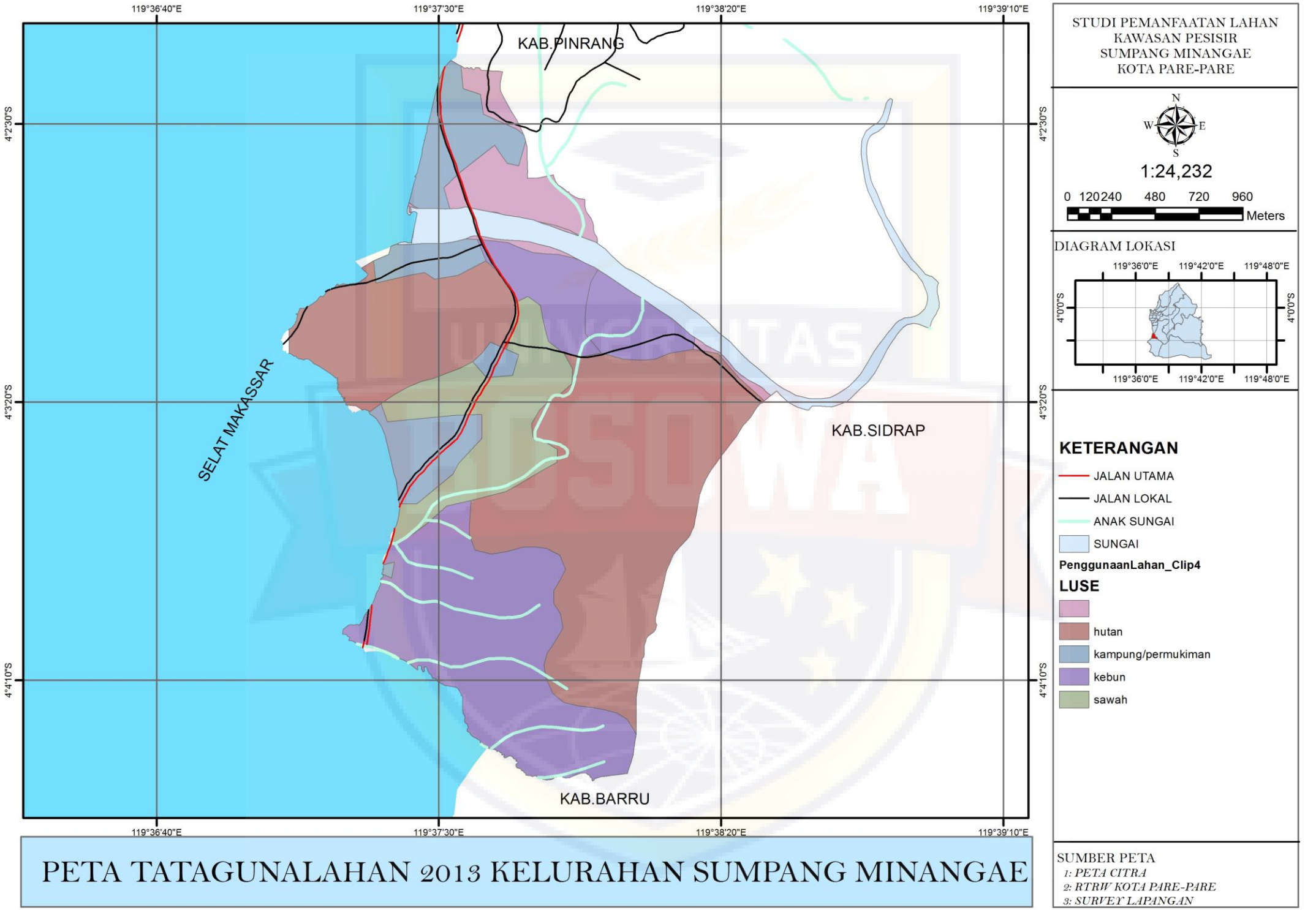

PETA TATAGUNALAHAN 2013 KELURAHAN SUMPANG MINANGAE

2. Penggunaan Lahan Tahun 2017

Kelurahan Sumpang Minangae yang merupakan salah satu dari kelurahan yang terdapat di Kecamatan Bacukiki Barat Kota ParePare merupakan kelurahan yang memiliki kawasan Daerah Pesisir. Jenis penggunaan lahan yang bervariasi menjadikan Kelurahan Sumpang Minangae memiliki wilayah yang berkarakteristik dengan jenis tanah yang juga megandung minyak dan gas menjadikan Kelurahan Sisipan sebagai kelurahan yang memiliki potensi pertambangan.

Selain penggunaan lahan kawasan industri dan kawasan pertambangan, Kecamatan Batui memiliki penggunaan lahan lain, yang didalamnya terdapat unsur-unsur penggunaan lahan sangat bervariatif, seperti sawah, permukiman, tambak, tegal/ladang, perkebunan kelapa, kawasan industri dan kawasan pertambangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.11
Luas Penggunaan Lahan dan Persentase Terhadap Luas KelurahanDi Sumpang Minangae Tahun 2017

No	Penggunaan Lahan	2017	
		Ha	%
1	Permukiman	100,291	1,781
2	Kebun	3513,088	62,398
3	Hutan	895,900	15,913
4	Sawah	419,474	7,451
5	Tambak	108,890	1,934
Jumlah			

Sumber: Kantor Kelurahan Sumpang Minangae

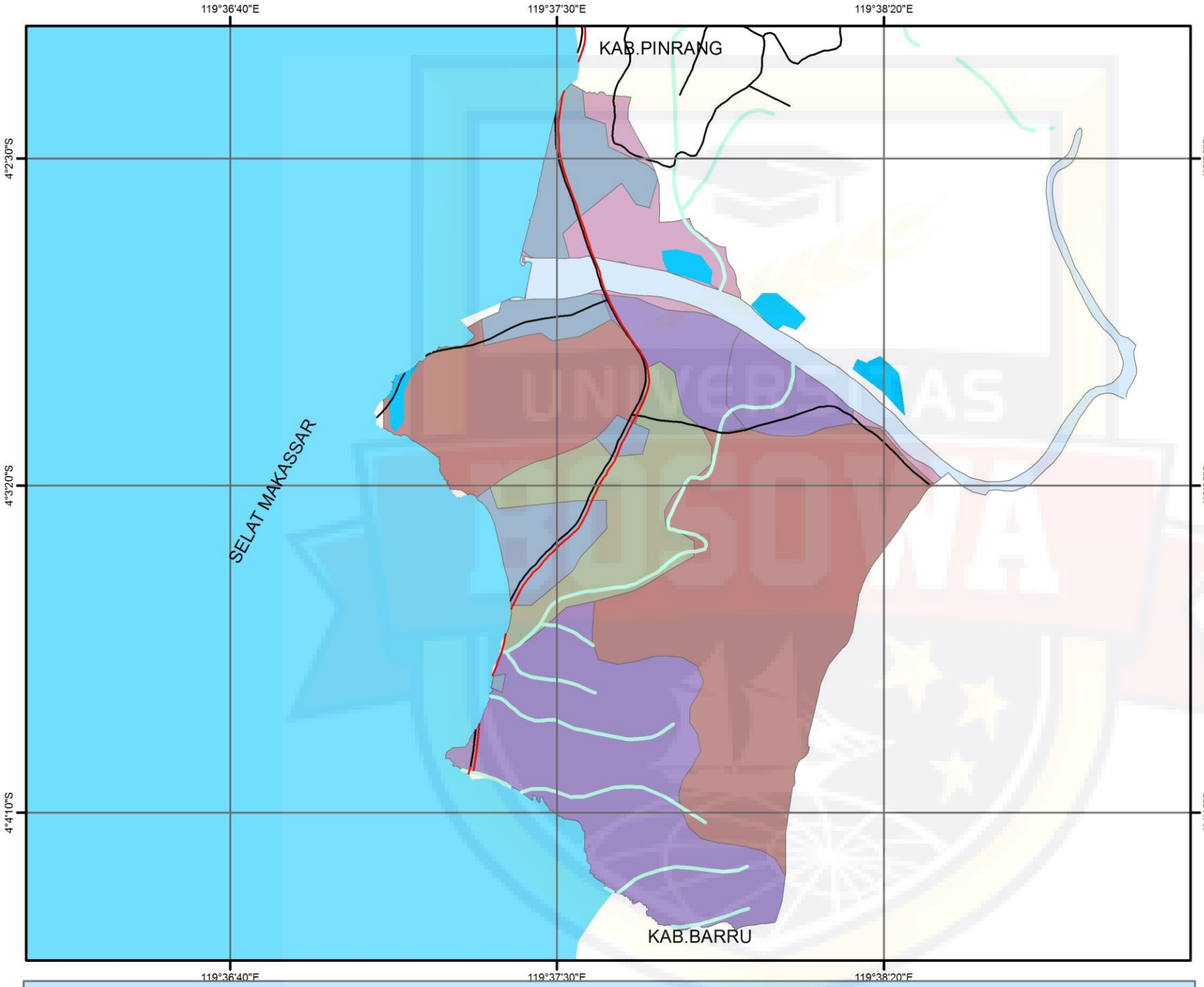

PETA TATAGUNALAHAN 2017 KELURAHAN SUMPANG MINANGAE

STUDI PEMANFAATAN LAHAN
KAWASAN PESISIR
SUMPANG MINANGAE
KOTA PARE-PARE

N
W E
S

1:24,232

0 120240 480 720 960
Meters

DIAGRAM LOKASI

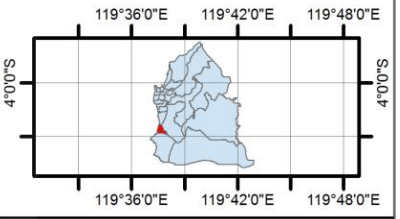

KETERANGAN

- JALAN UTAMA
- JALAN LOKAL
- ANAK SUNGAI
- SUNGAI
- Tambak

PenggunaanLahan_Clip4

LUSE

- hutan
- kampung/permukiman
- kebun
- sawah
- LAUT

SUMBER PETA
1: PETA CITRA
2: RTRW KOTA PARE-PARE
3: SURVEY LAPANGAN

3. Perkembangan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Lumpue tahun 2017 sebanyak 6945 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3261 orang dan perempuan sebanyak 3684 orang (Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan, 2011) Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kelurahan Sumpang Minangae sebanyak 6783 orang. Perkembangan jumlah penduduk Kelurahan Lumpue diperlihatkan pada Tabel

Tabel 4.12

Perkembangan Jumlah Penduduk Kelurahan Sumpang Minangae 2016-2017

Jumlah	**Jenis Kelamin**	
	Laki-Laki	**Perempuan**
Jumlah Penduduk Tahun ini	3261 Orang	3684 Orang
Jumlah Penduduk Tahun Lalu	3188 Orang	3595 Orang
Persentase Perkembangan	0,9 %	0,9 %

Sumber:Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan

Perkembangan Jumlah keluarga Kelurahan Sumpang Minangae pada tahun 2016-2017 diperlihatkan pada Tabel 3.2.

Tabel 4.13
Perkembangan Jumlah Keluarga Kelurahan Sumpang Minangae Tahun 2016-2017

Jumlah	KK Laki-Laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga Tahun Ini	2164 KK	593 KK	2223 KK
Jumlah Kepala Keluarga Tahun lalu	2133 KK	639 KK	2196 KK
Persentase Perkembangan	0,98 %	1,1 %	0,98 %

Sumber:Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan

Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kelurahan Sumpang Minangae sebesar 7340 terdiri dari 3349 orang laki-laki dan 3991 orang perempuan. Sex rasio sebesar 84% dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1471 orang/km2 (Kecamatan Bacukiki Barat dalam Angka, 2013). Perkembangan jumlah penduduk, sex rasio dan kepadatan penduduk Kelurahan Sumpang Minangae dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 diperlihatkan pada Tabel 3.3.

Tabel 4.14
Perkembangan Jumlah Penduduk,Sex Rasio dan Kepadatan Penduduk Kelurahan Sumpang Minangae Tahun 2016-2017

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Rasio	Luas (Km)	Kepadatan (Jiwa/Km)
2015	3168	3595	6783	0,89	4,99	1359
2016	3261	3684	6945	0,89	4,99	1392
2017	3349	3991	7340	0,84	4,99	1471

Sumber:Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan,

D. Faktor Yang menyebabkan perubahan pemanfaatan Lahan Kawasan Pesisir Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota ParePare

Chi-Kuadrat adalah analisis yang digunakan Untuk menjawab Rumusan Masalah pertama yaitu Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya Perubahan Pemanfaatan Lahan Kawasan Pesisir Sumpang Minangae Kota ParePare. Maka, Adapun rumus chi-kuadrat yaitu **:**

$$X^2 = \frac{(f_o - fh)^2}{(fh)}$$

Dimana :

: Hasil Chi-Kuadrat yang dihitung

: Frekuensi yang diperoleh

: Frekuensi yang diharapkan

Untuk menghitung frekuensi yang diharapkan digunakan rumus :

$$fh = \frac{\left(n_o^i - n_o^j\right)^2}{N}$$

Dimana :

fh**:** Frekuensi yang diharapkan

: Jumlah Baris

: Jumlah Kolom

: Jumlah Sampel (Sugiyono 1999)

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan apabila keadaan berikut dicapai, yakni : X^2 hitung < X^2 tabel yang berarti $H_{\circ}$ diterima, sebaliknya apabils X^2 hitung > X^2 tabel berarti $H_{\circ}$ ditolak atau H^1.

Untuk mengetahui koefisien korelasi variabel X terhadap variabel Y berdasarkan hasil yang diperoleh, digunakan uji kontingensi, yaitu :

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}} \quad C_{max} = \sqrt{\frac{m}{(m-1)}}$$

Dimana :

: Hasil koefisien kontigensi

C_{max} : Hasil maksimal koefisien kontigensi

X^2 : Hasil Chi-kuadrat yang dihitung

N : Jumlah sampel (Rahman 1991 : 136)

Untuk mengetahui besarnya hubungan variabel X dengan Y digunakan sebagai patokan interpretasi nilai persentase yang digunakan, yaitu :

Tabel 4.15
Skala Nilai Hasil Uji Kontingensi

Interval Kontingensi	Tingkat Hubungan
0,0-0,199	Sangat Lemah
0,20-0,399	Lemah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80,1	Sangat Kuat

Sumber : Hasil Analisis

1. Harga Lahan Terhadap Perubahan Pemanfaatan Lahan Kawasan Pesisir Sumpang Minangae Kota ParePare

Berdasarkan survey pemanfaatan Lahan Kawasan Pesisir Sumpang Minangae Kota Parepare dimana Harga lahan merupakan salah satu faktor yang disebabkan adanya aktivitas Konversi Hutan Mangrove Menjadi tambak masyarakat. Hal ini dikarenakan sejalan dengan pembangunan di Kawasan Pesisir Sumpang Minangae Kota ParePare, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga harga lahan di sekitarnya meningkat.

Berdasarkan hasil survey lapangan dengan membagikan kuesioner kepada masyarakat, dapat dilihat bahwa dari jumlah 44 responden, 24 responden menyatakan aktivitas industri sangat berpengaruh terhadap harga lahan, 12 responden menyatakan aktivitas industri berpengaruh terhadap harga lahan, dan 8 responden menyatakan aktivitas industri tidak berpengaruh terhadap harga lahan.

Tabel 4.16

Aktivitas Industri Terhadap Harga Lahan

di Kelurahan Sumpang Minangae Tahun 2017

Aktivitas Industri	Harga Lahan					
	Sangat Berpengaruh		Berpengaruh		Tidak Berpengaruh	
	f	%	f	%	f	%
Tinggi	20	45,45	2	4,55	1	2,27
Sedang	2	4,55	7	15,91	2	4,55
Rendah	2	4,55	3	6,82	5	11,36
Jumlah	24	54,55	12	27,27	8	18,18

Sumber : Hasil Survey Lapangan Tahun 2017

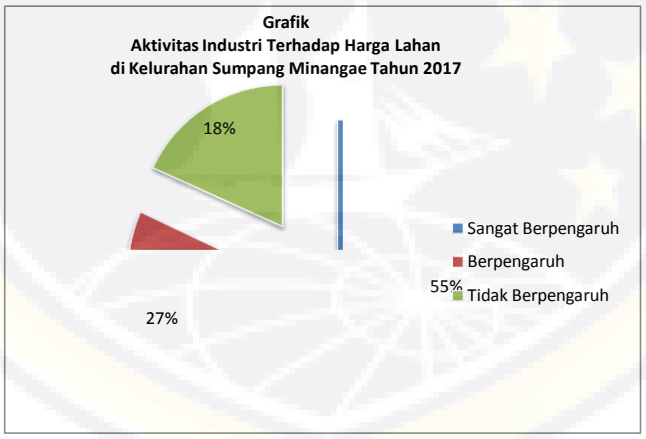

2. Potensi Ekonomi Terhadap Perubahan Pemanfaatan Lahan Kawasan Pesisir Sumpang Minangae Kota ParePare

Potensi Ekonomi masyarakat pesisir mempunyai potensi yang sangat besar, namun terkadang masyarakat pesisir tidak mampu untuk mengelolanya. Tidak semua masyarakat pesisir tidak mampu mengelola sumber daya alam yang ada disekitarnya. Sebagian masyarakat pesisir yang mampu mengelola sumber daya alamnya terkadang tidak dihargai . Berdasarkan hasil survey lapangan dengan metode kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang berjumlah 44 orang, 24 responden menyatakan Potensi Ekonomi sangat berpengaruh terhadap meningkatnya Perekonomian di wilayah pesisir, 14 responden menyatakn aktivitas Ekonomiberpengaruh terhadap Pemanfaatan Lahan dan 6 responden menyatakan aktivitas Ekonomi tidak berpengaruh terhadap potensi Ekonimi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.17

Pemanfaatan Lahan Terhadap Potensi Ekonomi

di Kelurahan Sumpang Minangae Tahun 2017

Aktivitas Industri	Pencemaran Lingkungan					
	Sangat Berpengaruh		Berpengaruh		Tidak Berpengaruh	
	f	%	f	%	f	%
Tinggi	20	45,45	2	4,55	1	2,27
Sedang	2	4,55	10	22,73	2	4,55
Rendah	2	4,55	2	4,55	3	6,82
Jumlah	24	54,55	14	31,82	6	13,64

Sumber : Hasil Survey Lapangan Tahun 2017

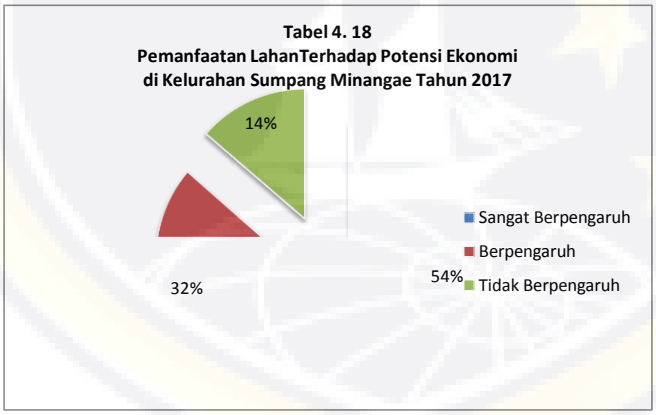

3. Daya Dukung Lahan Terhadap Perubahan Pemanfaatan Lahan Kawasan Pesisir Sumpang Minangae Kota ParePare

Daya Dukung lahan di wilayah pesisir Sumpang Minangae menunjukkan dalam keadaan deficit yaitu dimana keadaan lahan wilayah pesisir sumpang minangae sudah tidak memenuhi kebutuhan akan produksi hayati di wilayah pesisir Sumpang Minangae karna adanya pemanfaatan wilayah pesisir yang beralih fungsi dimana perubahan fungsi laha hutan mangrove menjadi tambak masyarakat yangmenjadikannya salah satu factor deposit utama.

Tabel 4.18

Perubahan Pemanfaatan Lahan Terhadap Terhadap Daya Dukung Lahan di Kelurahan Sumpang Minangae Tahun 2017

Aktivitas Industri	Alih Fungsi Lahan Permukiman					
	Sangat Berpengaruh		Berpengaruh		Tidak Berpengaruh	
	f	%	F	%	f	%
Tinggi	19	43,18	3	6,82	2	4,55
Sedang	4	9,09	6	13,64	3	6,82
Rendah	3	6,82	2	4,55	2	4,55
Jumlah	26	59,09	11	25,00	7	15,91

Sumber : Hasil Survey Lapangan Tahun 2017

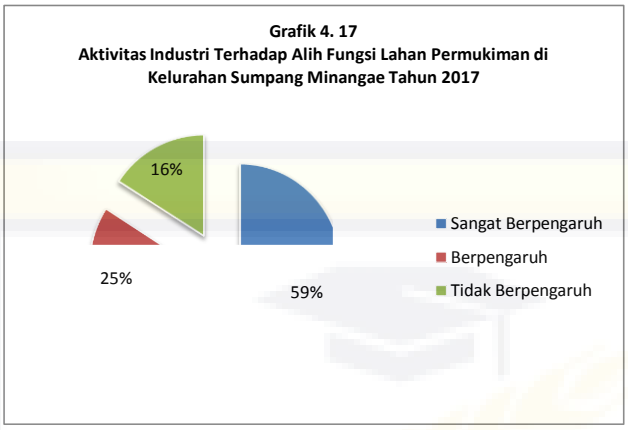

4. Konversi Lahan Terhadap Perubahan Pemanfaatan Lahan

Adanya aktivitas industri di Kelurahan Sumpang Minagae Kecamatan bacukiki Barat selama lima tahun terakhir telah mengubah perubahan lahan. Salah satunya mengakibatkan berkurangnya lahan produktif di Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota ParePare.

Tabel 4.19
Konversi Lahan Terhadap Pemanfaatan Lahan di Kelurahan Sumpang Minangae Tahun 2017

Aktivitas Industri	Konversi Lahan					
	Sangat Berpengaruh		Berpengaruh		Tidak Berpengaruh	
	f	%	f	%	f	%
Tinggi	14	31,82	1	2,27	1	2,27
Sedang	2	4,55	13	29,55	1	2,27
Rendah	2	4,55	1	2,27	9	20,45
Jumlah	18	40,91	15	34,09	11	25,00

Sumber : Hasil Survey Lapangan Tahun 2017

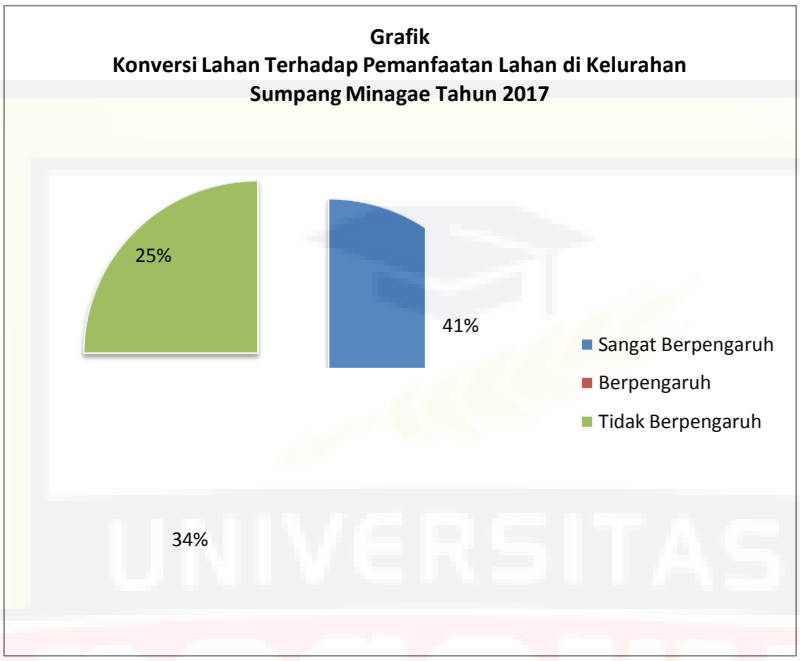

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan survey lapangan menunjukkan jumlah frekuensi responden mengenai Konversi Lahan terhadap pemanfaatan lahan di Lokasi Penelitian.Sebanyak 18 orang atau (40,91%) menyatakan sangat berpengaruh, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 15 orang atau (34,09%) dan sebanyak 11 orang (25,00%) menyatakn tidak berpengaruh.

F. Analisis Faktor Yang Menyebabkan Perubahan Pemanfaatan Lahan Kawasan Pesisir Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota ParePare

Dalam menganalisis Faktor yang menyebabkan perubahan pemanfaatan Lahan Kawasan Pesisir Sumpang Minangae, perlu diperhatikan adalah mengkaji beberapa variabel yang menjadi masalah dalam Pemanfaatan Lahan Pesisir.

Pada bagian ini disajikan hasil analisis Chi-Square secara sistematis, dianalisis seberapa besar Harga lahan,Potensi Ekonomi,Daya Dukung Lahan Dan Konversi Lahan Dengan demikian untuk lebih jelasnya sebagaimana pada pembahasan berikut;

1. Harga Lahan

   Pemanfaatan Lahan Kawasan Pesisir Sumpang Minangae Kota Parepare dimana Harga lahan merupakan salah satu faktor yang disebabkan adanya aktivitas Konversi Hutan Mangrove Menjadi tambak masyarakat. Hal ini dikarenakan sejalan dengan pembangunan di Kawasan Pesisir Sumpang Minangae Kota ParePare, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya

permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga harga lahan di sekitarnya meningkat.

Tabel 4.20
Hubungan Faktor Harga Lahan dengan Aktivitas Industri di Kelurahan Sumpang Minangae Tahun 2017

Aktivitas Industri	Harga Lahan						Jumlah	
	Sangat Berpengaruh		Berpengaruh		Tidak Berpengaruh			
	f	%	f	%	f	%	f	%
Tinggi	20	45,45	2	4,55	1	2,27	23	52,27
Sedang	2	4,55	7	15,91	2	4,55	11	25,00
Rendah	2	4,55	3	6,82	5	11,36	10	22,73
Jumlah	24	54,55	12	27,27	8	18,18	44	100,00

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2017

Berdasarkan hasil tabel 4.23 menunjukkan bahwa hubungan faktor harga lahan dengan aktivitas industri di Kelurahan Sumpang Minangae Kota ParePare memiliki hubungan atau pengaruh. Berdasarkan rekapitulasi hasil frekuensi responden menunjukkan bahwa pada kategori Tinggi23 orang (52,27%), kategori Sedang 11 orang (25,00%) dan kategori Sedang 10 orang (22,73%). Dari hasil X^2 hitung yang diperoleh adalah = 25,54 (lampiran-4), pada taraf signifikan 0.05 dan derajat kebebasan (dk) = (3-1)+(3-1)=4 dan X^2 tabel = 9.49 dengan demikian diperoleh bahwa X^2 hitung lebih besar (>) dari pada X^2

tabel jadi H_o ditolak dan H^1 diterimah. Hal ini menunjukan bahwa pengaruh antara faktor harga lahan dengan aktivitas industri memiliki nilai Uji Kontingensi (C) =0.60 yang artinya memiliki tingkat hubungan yang Kuat.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dinyatakan bahwa pengaruh antara faktor harga lahan dengan aktivitas industri Tambak memiliki tingkat hubungan yang kuat yang artinya berpengaruh, ini disebabkan karenasejalan dengan pembangunan kawasan industri di Kelurahan Sumpang Minangae, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga harga lahan di sekitarnya meningkat. Denganadanya aktivitas industri mengakibatkan hargalahan pada kawasan tersebut menjadi meningkat karna adanya tawaran dari pihak Investor kepada masyarakat pemilik lahan dengan harga yang sangat tinggisehingga masyarakat setempat rela melepas lahan yang mereka miliki karena tergiur dengan harga lahan yang ditawarkan pihak perusahaan industri tersebut.

2. Potensi Ekonomi

Potensi Ekonomi masyarakat pesisir mempunyai potensi yang sangat besar, namun terkadang masyarakat pesisir tidak mampu untuk mengelolanya. Tidak semua masyarakat pesisir tidak mampu mengelola sumber daya alam yang ada disekitarnya. Sebagian masyarakat pesisir yang mampu mengelola sumber daya alamnya terkadang tidak dihargai

Tabel 4.21
Hubungan Pemanfaatan Lahan Terhadap Potensi Ekonomi di Kelurahan Sumpang Minangae Tahun 2017

Aktivitas Industri	Potensi Ekonomi						Jumlah	
	Sangat Berpengaruh		Berpengaruh		Tidak Berpengaruh			
	f	%	f	%	f	%	f	%
Tinggi	20	45,45	2	4,55	1	2,27	23	52,27
Sedang	2	4,55	10	22,73	2	4,55	14	31,82
Rendah	2	4,55	2	4,55	3	6,82	7	15,91
Jumlah	24	54,55	14	31,82	6	13,64	44	100,00

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2017

Berdasarkan hasil tabel menunjukkan bahwa hubungan Potensi Ekonomi dengan Pemanfaatan Lahan di Kelurahan Sumpang Minagae memiliki hubungan atau pengaruh. Berdasarkan rekapitulasi hasil frekuensi responden menunjukkan bahwa pada kategori Tinggi23 orang (52,27%), kategoriSedang 14 orang (31,82%) dan kategori Rendah7 orang (15,91%).

Dari hasil X^2 hitung yang diperoleh adalah = 26,09 (lampiran-3), pada taraf signifikan 0.05 dan derajat kebebasan (dk) =(3-1)+(3-1)=4 dan X^2 tabel = 9.49 dengan demikian X^2 hitung lebih besar (>) dari pada X^2 tabel jadi H_o ditolak dan H^1 diterima. Hal ini menunjukan bahwa pengaruh antara faktor Pemanfaatan Lahan dengan Potensi Ekonomi memiliki nilai Uji Kontingensi (C)=0.62 yang artinya memiliki tingkat hubungan yang Kuat.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dinyatakan bahwa pengaruh antara faktor Pemanfaatan Lahn dengan Potensi Ekonomi memiliki tingkat hubungan yang kuat yang artinya berpengaruh, ini disebabkan karena Potensi Ekonomi masyarakat pesisir mempunyai potensi yang sangat besar, namun terkadang masyarakat pesisir tidak mampu untuk mengelolanya. Tidak semua masyarakat pesisir tidak mampu mengelola sumber daya alam yang ada disekitarnya. Sebagian masyarakat pesisir yang mampu mengelola sumber daya alamnya terkadang tidak dihargai dan perlu adanya pembinaan dari pemerintah setempat guna potensi ekonomi yang ada di wilayah pesisir dapat berkembang.

3. Daya Dukun lahan

Daya Dukung lahan di wilayah pesisir Sumpang Minangae menunjukkan dalam keadaan deficit yaitu dimana keadaan lahan wilayah pesisir sumpang minangae sudah tidak memenuhi kebutuhan akan produksi hayati di wilayah pesisir Sumpang Minangae karna adanya pemanfaatan wilayah pesisir yang beralih fungsi dimana perubahan fungsi laha hutan mangrove menjadi tambak masyarakat yangmenjadikannya salah satu factor deposit utama.

Tabel 4.22
Hubungan Perubahan Pemanfaatan Lahan Terhadap Daya Dukun Lahan di Kelurahan Sumpang Minangae Tahun 2017

Aktivitas Industri	Daya Dukung Lahan						Jumlah	
	Sangat Berpengaruh		Berpengaruh		Tidak Berpengaruh			
	f	%	f	%	f	%	f	%
Tinggi	19	43,18	3	6,82	2	4,55	24	54,55
Sedang	4	9,09	6	13,64	3	6,82	13	29,55
Rendah	3	6,82	2	4,55	2	4,55	7	15,91
Jumlah	26	59,09	11	25,00	7	15,91	44	100,00

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2017

Berdasarkan hasil tabel menunjukkan bahwa hubungan faktor Perubahan Pemanfaatan Lahan Terhadap Daya Dukung Lahan kelurahan Sumpang Minangae memiliki hubungan atau pengaruh. Berdasarkan rekapitulasi hasil frekuensi responden menunjukkan

bahwa pada kategori Tinggi24 orang (54,55%), kategori Sedang 13 orang (29,55%) dan kategori Rendah 7 orang (15,91%). Dari hasil X^2 hitung yang diperoleh adalah = 9,57 (lampiran-2), pada taraf signifikan 0.05 dan derajat kebebasan (dk) = (3-1)+(3-1)=4 diperoleh X^2 tabel = 9.49 dengan demikian X^2 hitung lebih besar (>) dari pada X^2 tabel jadi H_o ditolak dan H^1 diterimah.Hal ini menunukkan bahwa pengaruh antara faktor Pemanfaatan Lahan dengan aktivitas Daya Dukung Lahan memiliki nilai Uji Kontingensi (C) =0.42 yang artinya memiliki tingkat hubungan yang Sedang.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dinyatakan bahwa pengaruh antara faktor Perubahan Pemanfaatan Lahan dengan Daya Dukung Lahan memiliki tingkat hubungan yang sedang yang artinya berpengaruh dimana keadaan lahan wilayah pesisir sumpang minangae sudah tidak memenuhi kebutuhan akan produksi hayati di wilayah pesisir Sumpang Minangae karna adanya pemanfaatan wilayah pesisir yang beralih fungsi dimana perubahan fungsi lahan hutan mangrove menjadi tambak masyarakat yang menjadikannya salah satu factor deposit utama.

4. Konversi Lahan

Adanya aktivitas industri di Kelurahan Sumpang Minagae Kecamatan bacukiki Barat selama lima tahun terakhir telah mengubah perubahan lahan. Salah satunya mengakibatkan berkurangnya lahan produktif di Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota ParePare.

Tabel 4.23
Hubungan Konversi Lahan Terhadap Pemanfaatan Lahan di Kelurahan Sumpang Minangae Tahun 2017

Aktivitas Industri	Konversi Lahan						Jumlah	
	Sangat Berpengaruh		Berpengaruh		Tidak Berpengaruh			
	f	%	F	%	f	%	f	%
Tinggi	14	31,82	1	2,27	1	2,27	16	36,36
Sedang	2	4,55	13	29,55	1	2,27	16	36,36
Rendah	2	4,55	1	2,27	9	20,45	12	27,27
Jumlah	18	40,91	15	34,09	11	25,00	44	100,00

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2017

Berdasarkan hasil tabel menunjukkan bahwa hubungan faktor Konversi Lahan Hutan Mangrove dengan aktivitas industri Tambak di Kelurahan Sumpang Minangae memiliki hubungan atau pengaruh. Berdasarkan

rekapitulasi hasil frekuensi responden menunjukkan bahwa pada kategori Tinggi16 orang (36,36%), kategori Sedang sebanyak 16 orang (36,36%) dan pada kategori Rendah 12 orang (27,27%) Dari tabel X^2 hitung yang diperoleh adalah =46,28 (lampiran-1), pada taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = (3-1)+(3-1) = 4 diperoleh X^2 tabel =9,49 dengan demikian X^2 hitung lebih besar (>) dari pada X^2 tabel jadi H_o ditolak dan diterima H^1. Hal ini menunjukkan terbukti bahwa pengaruh antara faktor alih fungsi lahan Hutan Mngrove dengan aktivitas industri Tambak memiliki nilai Uji Kontingensi (C) =0,71 yang artinya memiliki tingkat hubungan yang Sangat Kuat.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dinyatakan bahwa pengaruh antara faktor alih fungsi lahan Hutan Mangrove dengan aktivitas industri Tambak memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat yang artinya sangat berpengaruh terhadap penggunaan lahan di Kelurahan Sumpang Minangae sehingga terjadinya perubahan guna lahan yang membuat semakin berkurangnya lahan Hutan Mangrove di Kelurahan Sumpang Minangae.

G. Analisis Penggunaan Lahan 5 Tahun Terakhir

Analisis Superimpose adalah teknik overley yang merupakan pendekatan tata guna lahan/landscape. Analisis overley ini juga dimaksudkan untuk melihat deskripsi kegiatan yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria konstribusi. Teknik overlay ini dibentuk melalui penggunaan secara tumpang tindih (seri) suatu peta yang mewakili masing-masing faktor penting lingkungan/lahan.

Tujuan dan manfaat analisis overlay ini untuk melihat aktifitas kegiatan pemanfaatan lahan dimana terjadi perubahan fungsi ruang dalam suatu wilayah. Overlay ini merupakan suatu informasi dalam bentuk grafis yang dibentuk dari penggabungan berbagai peta individu (memiliki informasi/database yang spesifik) dari kumpulan peta individu ini atau biasa disebut peta komposit mampu memberikan informasi yang lebih luas dan bervariasi. Masing-masing peta memberikan informasi dan transparansi tentang komponen lingkungan dan sosial dalam objek lokasi studi. Peta yang di overlay adalah peta penggunaan lahan tahun 2013 dimana memberikan informasi sebelum terjadi tumpang tindih

perubahan lahan 5 tahun kedepan dan peta penggunaan lahan tahun 2017 menjabarkan tentang hasil dari tumpang tindih peta tahun 2013 dan akan terlihat seberapa besar lahan yang dimanfaatkan berdasarkan hasil dari analisis overley peta 5 tahun terakhir Terdapat pada table

Tabel 4.24

Penggunaan Lahan Presentase Luas Dan Presentase Perubahaan Di Kelurahn Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat tahun 2013-2017

Penggunaan Lahan	2013		2017		Perubahan (%)
	Ha	%	Ha	%	
Permukiman	105,291	1,870143	100,291	1,781	0,000
Kebun	3646,758	64,7726	3513,088	62,398	-0,975
Hutan	369,498	6,56291	895,900	15,913	-2,375
Sawah	285,804	5,076371	419,474	7,451	2,375
Tambak	-	-	108,890	1,934	-0,118
Jumlah	4.380,351	**78,2820**		**100**	**0,000**

Sumber; Hasil Analisis overlay Peta Tahun 2017

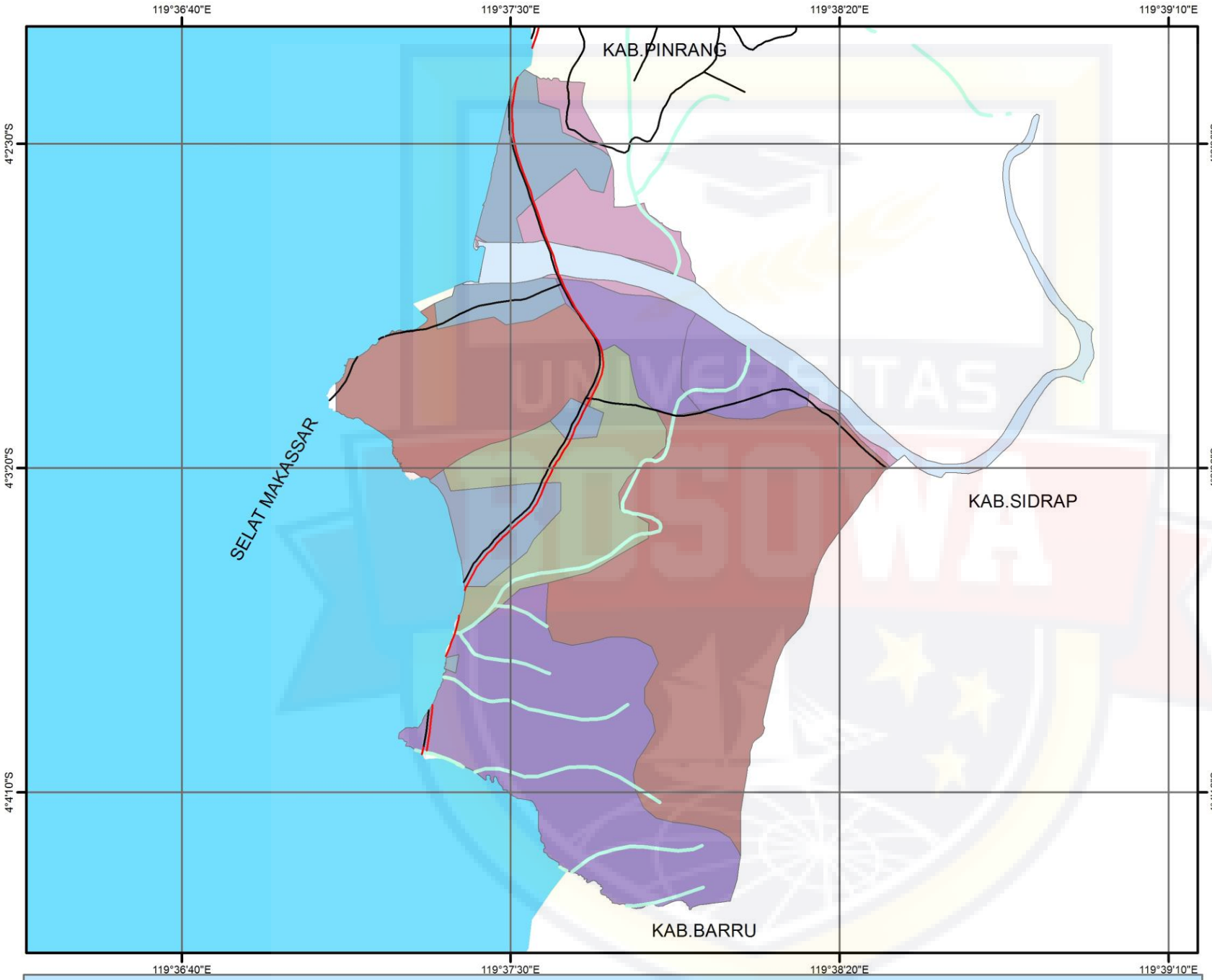

STUDI PEMANFAATAN LAHAN
KAWASAN PESISIR
SUMPANG MINANGAE
KOTA PARE-PARE

N
W E
S

1:24,232

0 120240 480 720 960
Meters

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

- JALAN UTAMA
- JALAN LOKAL
- ANAK SUNGAI
- SUNGAI

PenggunaanLahan_Clip4

LUSE

- hutan
- kampung/permukiman
- kebun
- sawah

SUMBER PETA
1: PETA CITRA
2: RTRW KOTA PARE-PARE
3: SURVEY LAPANGAN

PETA TATAGUNALAHAN 2013 KELURAHAN SUMPANG MINANGAE

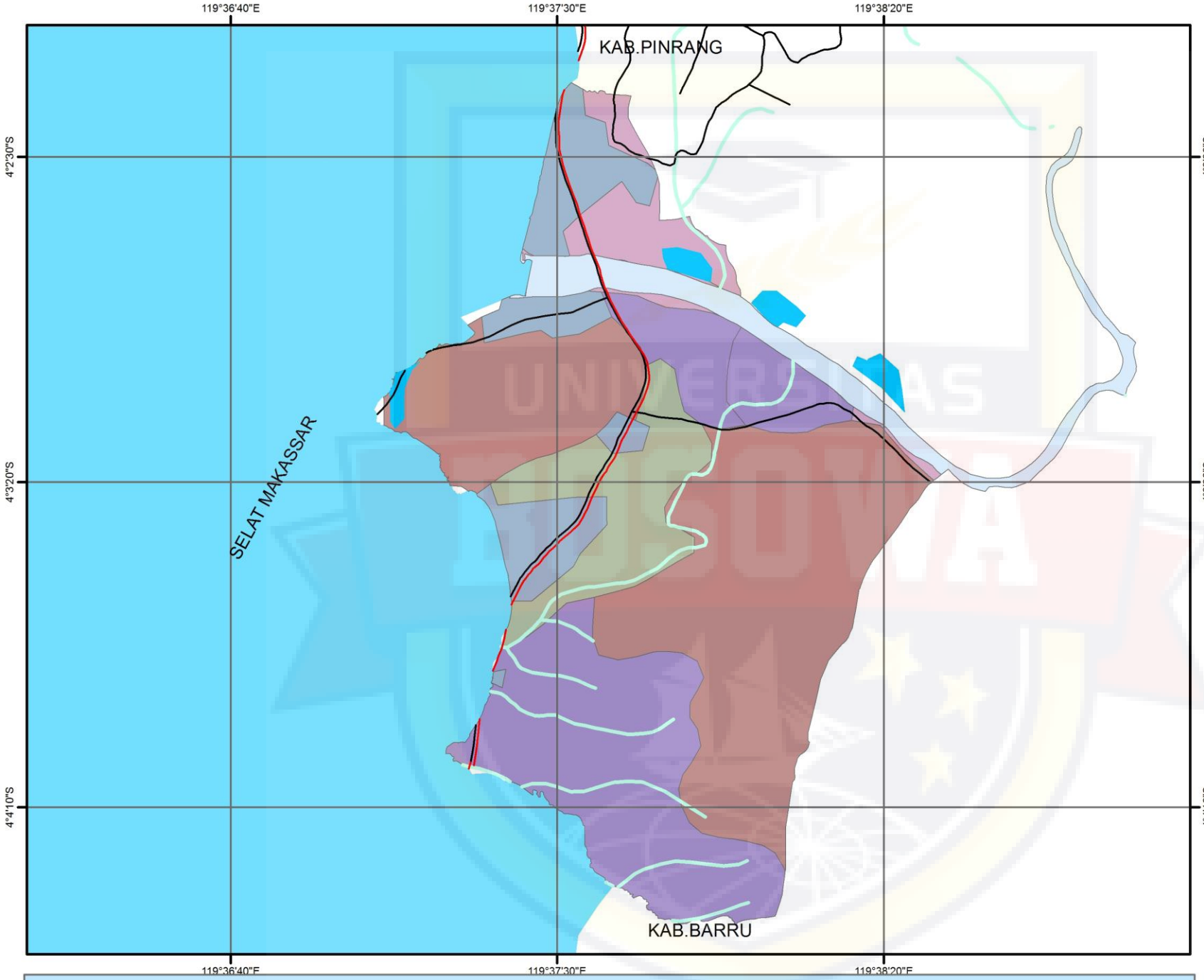

PETA TATAGUNALAHAN 2017 KELURAHAN SUMPANG MINANGAE

STUDI PEMANFAATAN LAHAN
KAWASAN PESISIR
SUMPANG MINANGAE
KOTA PARE-PARE

N
W E
S

1:24,232

0 120240 480 720 960
Meters

DIAGRAM LOKASI

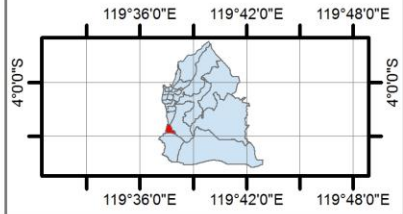

KETERANGAN

- JALAN UTAMA
- JALAN LOKAL
- ANAK SUNGAI
- SUNGAI
- Tambak

PenggunaanLahan_Clip4

LUSE

- hutan
- kampung/permukiman
- kebun
- sawah
- LAUT

SUMBER PETA
1: PETA CITRA
2: RTRW KOTA PARE-PARE
3: SURVEY LAPANGAN

Berdasarkan hasil analisis overlay peta pada peralihan fungsi lahan di Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat sebagian terdapat perubahan fungsi lahan seperti Permukiman dengan luas lahan pada tahun 2013 sebanyak 105,291 Ha, berkurang menjadi 100,291 Ha pada tahun 2017, Kebun dengan luas lahan pada tahun 2013 sebanyak 3646,758 Ha, berkurang menjadi 3513,088 Ha pada tahun 2017 , Hutan dengan luas lahan pada tahun 2013 sebanyak 896,498 Ha, berkurang menjadi 395,900 Ha pada tahun 2017 , sawah dengan luas lahan pada tahun 2013 sebanyak 4895,804 Ha, berkurang menjadi 219,474 Ha pada tahun 2017, Permukiman dengan luas lahan pada tahun 2013 sebanyak 105,291 Ha dan pada tahun 2017 Terdapat Tambak Dengan Luas 108,890 Ha

Tabel 4.25
Peralihan Penggunaan Lahan Tahun 2013 menjadi Kondisi Eksisting Tahun 2017

No.	Penggunaan Lahan Tahun 2013	Luas (Ha)	Penggunaan Lahan Tahun 2017	Luas (Ha)
1	Permukiman	**105,291**	Permukiman	**100,291**
2	Kebun	**3646,758**	Kebun	**3513,088**
3	Hutan	**869,498**	Hutan	**395,900**
4	Sawah	**485,804**	Sawah	**219,474**
5	Tambak	**-**	Permukiman	**108,890**
Jumlah		5.630,094	Jumlah	5.630,094

Sumber; Hasil Analisis overlay Peta Tahun 2017

PETA PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN

STUDI PEMANFAATAN LAHAN
KAWASAN PESISIR
SUMPANG MINANGAE
KOTA PARE-PARE

N
W E
S

1:24,232

0 120240 480 720 960
Meters

DIAGRAM LOKASI

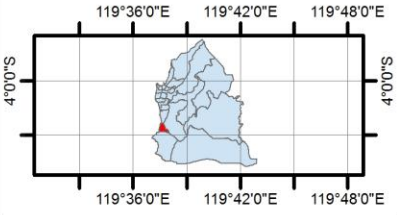

KETERANGAN

- JALAN UTAMA
- JALAN LOKAL
- ANAK SUNGAI
- SUNGAI
- Perubahan Penggunaan Lahan

PenggunaanLahan_Clip4

LUSE

- hutan
- kampung/permukiman
- kebun
- sawah
- LAUT

SUMBER PETA

1: PETA CITRA
2: RTRW KOTA PARE-PARE
3: SURVEY LAPANGAN

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi aktivitas kegiatan industri terhadap perubahan guna lahan di Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota ParePare adalah Faktor Harga Lahan ,Potensi Ekonomi, Daya Dukung Lahan Dan Konversi Lahan. Kemudian dari keempat variabel tersebut Sangat Berpengaruh Terhadap Perubahan Pemafaatan Lahan yaitu memiliki hubungan yang sangat kuat yang artinya aktivitas kegiatan industri sangat berpengaruh terhadap penggunaan lahan sehingga membuat semakin berkurangnya lahan produktif di Kelurahan Sumpang Minagae Kecamatan Bacukiki Barat Kota ParePare.
2. Berdasarkan hasil analisis overlay peta pada peralihan fungsi lahan di Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota ParePare sebagian terjadi perubahan fungsi lahan tahun 2013-2017 seperti Permukiman dengan luas lahan pada tahun 2013 sebanyak 105,291 Ha, berkurang menjadi 100,291 Ha pada tahun 2017, Kebun dengan luas lahan pada tahun 2013 sebanyak 3646,758 Ha, berkurang menjadi 3513,088 Ha pada tahun 2017 , Hutan dengan

luas lahan pada tahun 2013 sebanyak 896,498 Ha, berkurang menjadi 395,900 Ha pada tahun 2017 , sawah dengan luas lahan pada tahun 2013 sebanyak 4895,804 Ha, berkurang menjadi 219,474 Ha pada tahun 2017, Permukiman dengan luas lahan pada tahun 2013 sebanyak 105,291 Ha dan pada tahun 2017 Terdapat Tambak Dengan Luas 108,890 Ha

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka saran dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Disarankan untuk pemerintah agar membuat/menyusun peraturan zonasi kawasan untuk mempertegas zona-zona kawasan di Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota ParePare.
2. Diperlukan suatu persamaan persepsi dari segenap unsur yang terkait dalam pengembangan kawasan industri, seperti pihak pemerintah daerah, swasta, serta masyarakat pada umumnya.
3. Penelitian ini masih jauh dari kesan kesempurnaan, untuk itu bagi peneliti yang tertarik untuk meneliti tentang masalah"*Studi Pemanfaatan Lahan Kawasan Pesisir Sumpang Minangae Kota ParePare"* kiranya dapat mengkaji mengenai faktor-faktor sosial yang terjadi pada masyarakat pada kawasan Wilayah Pesisir.

LAMPIRAN